



Mengarungi Samudera

Terus berlayar berbekal ilmu dan kesadaran, dipandu kesabaran berbekal harapan,
batas cakrawala tempat menuju, meraih kaki langit tempat berlabuh.



BAGIAN 3

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Kebijakan Bank Indonesia selama 2011 ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global. Di sisi moneter, strategi kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan, melalui bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar Rupiah, dan dilengkapi dengan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan aliran modal asing dan akses likuiditas. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut juga didukung oleh strategi komunikasi dalam rangka mengelola ekspektasi inflasi, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengurangi ketidakpastian pelaku pasar. Di sisi perbankan, arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan serta memperkuat fungsi pengawasan di tengah upaya untuk mendorong peran intermediasi perbankan dalam perekonomian. Capaian stabilitas sistem keuangan juga ditopang oleh kebijakan sistem pembayaran dan pengedaran uang yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, penguatan infrastruktur sistem pembayaran di samping memenuhi kebutuhan uang di masyarakat sebagai alat transaksi. Bank Indonesia juga terus memperkuat jalinan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia disesuaikan dengan dinamika tantangan yang terjadi dalam perekonomian nasional. Selama semester I-2011, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan meningkatnya tekanan inflasi yang disertai dengan derasnya arus masuk modal asing, termasuk investasi portofolio pada aset keuangan domestik. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI Rate diiringi dengan kebijakan yang memberikan ruang bagi penguatan rupiah yang lebih besar untuk meredam tekanan inflasi yang bersumber dari eksternal (imported

inflation). Di samping besarnya surplus neraca transaksi berjalan, derasnya arus masuk modal asing berdampak pada peningkatan cadangan devisa sehingga dapat meningkatkan bantalan yang cukup untuk menghadapi risiko pembalikan (self insurance). Memasuki triwulan III-2011, memburuknya ketidakpastian ekonomi global telah berdampak pada pembalikan arus modal keluar emerging markets, termasuk Indonesia. Tekanan di pasar keuangan, termasuk terhadap nilai tukar semakin kuat. Menghadapi tekanan ini, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dengan memanfaatkan cadangan devisa yang diakumulasi sebelumnya. Upaya stabilisasi nilai tukar rupiah juga disertai dengan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder baik secara bilateral maupun melalui lelang. Di samping mengatasi secara langsung sumber tekanan rupiah dari pelepasan SBN oleh investor asing, langkah ini dilakukan untuk menghindari keketatan likuiditas di pasar uang rupiah akibat intervensi valas dan sekaligus sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menggunakan SBN sebagai instrumen moneter. Selanjutnya, sejalan dengan keyakinan akan tetap rendahnya tekanan inflasi dan untuk mengantisipasi potensi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi dunia pada perlambatan ekonomi domestik, pada triwulan IV 2011 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang cenderung akomodatif dan countercyclical dengan menurunkan BI rate.

Kebijakan suku bunga dan nilai tukar tersebut diperkuat dengan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas perbankan, dan dilengkapi dengan strategi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Untuk memitigasi dampak tingginya fluktuasi aliran modal asing khususnya yang berjangka pendek terhadap stabilitas sistem keuangan domestik, Bank Indonesia memperkuat kebijakan yang telah ditempuh tahun 2010 dalam pengelolaan aliran modal asing, antara lain melalui peningkatan GWM

A hand is shown stacking several tall columns of gold coins on a sandy beach. In the background, the ocean waves are breaking against dark rocks under a warm, golden sunset sky. The scene is a composite image used as a background for the text.

valas, perpanjangan masa endap pemilikan SBI menjadi minimal 6 bulan (six months holding period), dan pembatasan posisi harian pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan. Lebih dari itu, untuk memperkuat pasokan devisa secara struktural ke pasar valas domestik guna mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mewajibkan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan penarikan devisa utang luar negeri (DULN) melalui bank devisa di dalam negeri. Sementara itu, untuk memperkuat kebijakan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas perbankan yang diterapkan pada tahun 2010 antara lain melalui kenaikan GWM rupiah, pada tahun 2011 Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan baru yang meliputi perpanjangan profil jatuh waktu instrumen moneter dan pembatasan jumlah penawaran SBI di pasar primer. Kebijakan makroprudensial tersebut dilengkapi dengan strategi komunikasi yang berkesinambungan untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat tentang arah perekonomian ke depan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan memberikan kepastian kepada pelaku pasar.

Terjaganya stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi juga didukung oleh implementasi kebijakan perbankan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan memperkuat pengawasan, selain mendorong intermediasi perbankan. Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan perbankan merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan bank, daya saing dan kemampuan dalam menyerap risiko dengan tetap mengacu pada penguatan good governance. Sementara itu, kebijakan dalam memperkuat fungsi pengawasan perbankan serta mendorong fungsi intermediasi perbankan antara lain melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan dan peningkatan kualitas kredit ke sektor-sektor yang produktif.

Upaya untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan juga didukung oleh kebijakan di sistem pembayaran

dan pengedaran uang. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan pada peningkatan efisiensi, keamanan, penguatan infrastruktur sistem pembayaran dan interkoneksi dengan infrastruktur sistem lain. Sementara itu, kebijakan pengedaran uang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat sebagai alat transaksi dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar.

Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah juga semakin erat baik dalam pengendalian inflasi dan tercapainya stabilitas makroekonomi maupun untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah terutama dilakukan melalui penguatan dan perluasan forum TPI dan TPID. Dari sisi Pemerintah, kebijakan fiskal yang berhati-hati mampu menjaga kesinambungan operasi keuangan Pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus di tengah beban subsidi yang meningkat. Alokasi subsidi yang meningkat tersebut terutama ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi yang juga memberikan dukungan bagi terkendalinya stabilitas harga. Peran pemerintah dalam mendukung perekonomian domestik terlihat dari penyerapan belanja negara yang membaik dan pengeluaran belanja modal yang meningkat cukup signifikan. Kebijakan fiskal tersebut dilengkapi dengan berbagai kebijakan sektoral baik di sektor industri, perdagangan maupun pertanian yang diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian antara lain ditempuh melalui penyiapan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, sementara upaya untuk menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan ditempuh melalui pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.



Bab VII

KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL



KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL



Kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Implementasi kebijakan moneter tersebut dilakukan melalui kebijakan suku bunga dan nilai tukar yang konsisten serta didukung dengan kebijakan makroprudensial untuk mengelola likuiditas dan aliran modal asing sesuai dengan kondisi perekonomian. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan strategi komunikasi yang diarahkan untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat tentang arah perekonomian ke depan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan memberikan kepastian terhadap pelaku pasar. Selanjutnya, sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan untuk membangun sistem keuangan yang lebih siap dan kuat menghadapi krisis, Bank Indonesia telah membangun protokol manajemen krisis untuk nilai tukar dan perbankan, dan dengan koordinasi Pemerintah sedang mengintegrasikannya menjadi protokol manajemen krisis nasional. Secara keseluruhan, implementasi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.



7.1 KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter selama tahun 2011 diarahkan untuk mengendalikan inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan sehingga mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah tingginya volatilitas aliran modal asing. Pada semester I 2011, kebijakan moneter difokuskan untuk mengatasi tekanan inflasi yang meningkat akibat terganggunya pasokan dan tingginya harga pangan dengan mengelola ekspektasi inflasi, aliran modal asing, dan eksekusi likuiditas. Selanjutnya pada semester II 2011, dengan mempertimbangkan tekanan inflasi yang mereda dan adanya potensi perlambatan ekonomi domestik akibat ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, Bank Indonesia menempuh strategi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

KEBIJAKAN SUKU BUNGA

Kebijakan moneter pada awal tahun 2011 ditandai dengan dipertahankannya level BI Rate pada 6,5%. Kebijakan moneter tersebut merupakan kelanjutan dari *stance* kebijakan moneter selama tahun 2010. Level BI Rate sebesar 6,5% dipandang masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan dan tetap kondusif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong intermediasi perbankan.

Pada bulan Februari 2011, BI Rate dinaikkan 25 bps menjadi 6,75% sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan ekspektasi inflasi yang pada saat itu terindikasi mulai meningkat. Peningkatan ekspektasi

inflasi terutama dipicu oleh inflasi *volatile food* yang masih tinggi, selain akibat dari kenaikan harga komoditas internasional dan rencana kebijakan pemerintah di bidang komoditas strategis. Kebijakan suku bunga juga didukung dengan penguatan kebijakan nilai tukar rupiah untuk mengatasi tekanan inflasi dari kenaikan harga komoditas internasional (*imported inflation*) serta kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk pengendalian likuiditas dan aliran modal asing.

BI Rate dipertahankan tetap pada level 6,75% sampai dengan triwulan III 2011 dengan mempertimbangkan masih berlanjutnya risiko tekanan inflasi dan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan penguatan nilai tukar rupiah dipandang mampu menurunkan tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari *imported inflation*. Selain itu, respon suku bunga lebih lanjut dinilai akan mendorong semakin derasnya aliran masuk modal asing, khususnya yang berjangka pendek, yang akan meningkatkan kompleksitas kebijakan moneter dalam pengelolaan kinerja perekonomian Indonesia.

Memasuki triwulan IV 2011, BI Rate diturunkan 25 bps menjadi 6,5% dengan mempertimbangkan bahwa inflasi pada akhir tahun 2011 dan 2012 akan berada di bawah 5% atau masih dalam kisaran sasaran inflasi¹. Kebijakan tersebut juga merupakan langkah untuk mengantisipasi dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Selanjutnya, dengan pertimbangan tekanan inflasi ke depan yang semakin rendah, BI Rate kembali diturunkan 50 bps menjadi 6,0% pada bulan November 2011. Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Selain menetapkan BI Rate, Bank Indonesia juga memutuskan untuk menyesuaikan lebar koridor suku bunga. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong kegiatan di pasar uang antarbank di tengah besarnya eksekusi likuiditas. Penyesuaian lebar koridor suku bunga dilakukan melalui perubahan lebar koridor bawah yaitu suku bunga untuk fasilitas simpanan *overnight* (ON), sedangkan lebar koridor atas yaitu suku bunga untuk fasilitas pinjaman ON tidak berubah. Dengan penyesuaian tersebut, suku bunga fasilitas pinjaman ON (*lending facility*) tetap berada pada level BI Rate + 100 bps, sementara suku bunga fasilitas simpanan

1 Sasaran inflasi untuk tahun 2011 adalah 5% ± 1%, sementara untuk tahun 2012 adalah 4,5% ± 1%.

ON (*deposit facility*) diturunkan dari BI Rate – 100 bps menjadi BI Rate – 150 bps. Dengan level BI Rate sebesar 6,0% (Desember 2011), maka suku bunga fasilitas pinjaman ON menjadi 7,0% dan suku bunga fasilitas simpanan ON menjadi 4,5%.

KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Strategi kebijakan nilai tukar selama tahun 2011 turut mendukung pengendalian inflasi serta tercapainya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Rupiah mengalami apresiasi pada semester I 2011 dan kemudian terdepresiasi pada semester II 2011 seiring dengan dinamika ekonomi dan keuangan global yang memburuk. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan nilai tukar berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas aliran modal asing yang tinggi. Stabilitas nilai tukar rupiah yang relatif terjaga tercermin pada volatilitas rupiah pada tahun 2011 yang hanya sedikit meningkat menjadi 0,38% dibandingkan dengan 0,35% pada tahun 2010, walaupun pada akhir triwulan III 2011 sempat terjadi tekanan depresiasi yang cukup kuat. Daya tahan rupiah yang kuat di tengah gejolak ekonomi global yang meningkat juga terlihat dari rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2011 yang menguat sebesar 3,56% menjadi Rp8.768 per dolar AS dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2010 sebesar Rp9.080 per dolar AS.

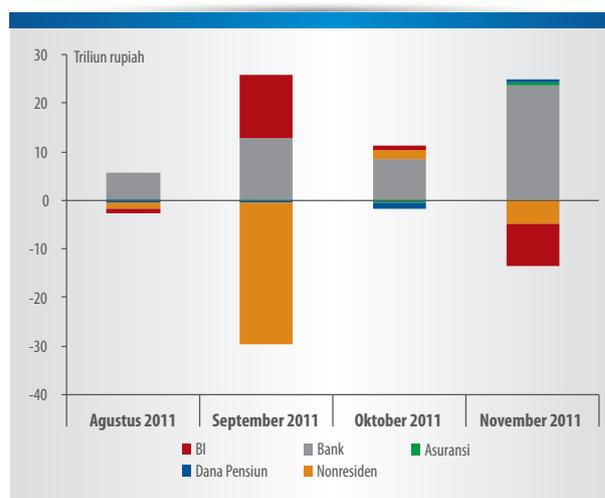
Pada semester I 2011, Bank Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan derasnya aliran masuk modal asing. Di tengah ekspektasi inflasi yang meningkat, penguatan nilai tukar rupiah dipandang dapat meredam tekanan inflasi khususnya yang bersumber dari tingginya kenaikan harga komoditas global. Besarnya ruang penguatan rupiah masih dalam skala yang terukur secara relatif terhadap mata uang regional, sehingga tidak mengganggu daya saing produk domestik di pasar global. Implementasi kebijakan ini, yang didukung pula oleh surplus neraca pembayaran baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun sisi neraca modal dan finansial, telah membuahkan akumulasi cadangan devisa yang meningkat. Kecukupan cadangan devisa berfungsi sebagai bantalan dalam menghadapi risiko pembalikan aliran modal asing (*self insurance*) dan karenanya memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

Memasuki semester II 2011, Bank Indonesia menempuh upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons atas meningkatnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah.

Gejolak pasar keuangan global mendorong investor untuk mengalihkan investasinya dari aset negara-negara *emerging markets* ke instrumen keuangan yang dianggap lebih aman (*safe haven*). Kondisi ini menyebabkan peningkatan tekanan depresiasi terhadap rupiah, didorong oleh aliran keluar modal asing, terutama dari instrumen SBN dan saham. Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dengan memanfaatkan cadangan devisa yang diakumulasi sebelumnya. Kebijakan ini juga disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder. Di samping mengatasi sumber tekanan rupiah dari pelepasan SBN oleh investor asing, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan likuiditas rupiah yang berkurang karena adanya intervensi valuta asing dan sekaligus menambah penggunaan SBN sebagai instrumen moneter (Grafik 7.1).

7.2 KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan saling terkait dan karenanya kebijakan di dua sisi stabilitas tersebut harus sinkron dan terkoordinasi dengan baik. Stabilitas sistem keuangan sangat menentukan efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi kegiatan perekonomian dan pengendalian inflasi melalui berbagai saluran transmisi moneter, baik suku bunga, kredit, uang beredar, nilai tukar maupun ekspektasi inflasi. Sebaliknya, respon kebijakan moneter berpengaruh pada risiko suku bunga, nilai tukar, harga aset, maupun risiko inflasi dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Keterkaitan dua sisi stabilitas tersebut semakin penting diperhatikan



Grafik 7.1 Perubahan Kepemilikan SBN

dengan tingginya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang sewaktu-waktu dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa mempertimbangkan eratnya kaitan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan tersebut dalam perumusan kebijakan moneter dan perbankan, khususnya melalui kebijakan makroprudensial.

Secara khusus, untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tersebut, Bank Indonesia memfokuskan kebijakan makroprudensial pada tiga hal. Pertama, mengendalikan likuiditas perekonomian terutama likuiditas perbankan. Kedua, mengelola aliran modal asing. Ketiga, meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. Perumusan kebijakan pada tiga fokus tersebut senantiasa disinkronkan dengan kebijakan moneter agar tetap konsisten dengan arah perkembangan makroekonomi ke depan. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan dapat dijaga untuk mendukung stabilitas moneter dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial di atas didukung pula oleh strategi komunikasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, dan memberikan kepastian kepada pelaku pasar sehingga dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat tentang arah perekonomian ke depan. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga telah membangun Protokol Manajemen Krisis (PMK) sebagai suatu mekanisme dan kerangka kerja yang tertata dan terintegrasi dalam langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis, khususnya krisis nilai tukar dan perbankan, untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di atas.

PENGENDALIAN EKSES LIKUIDITAS PERBANKAN

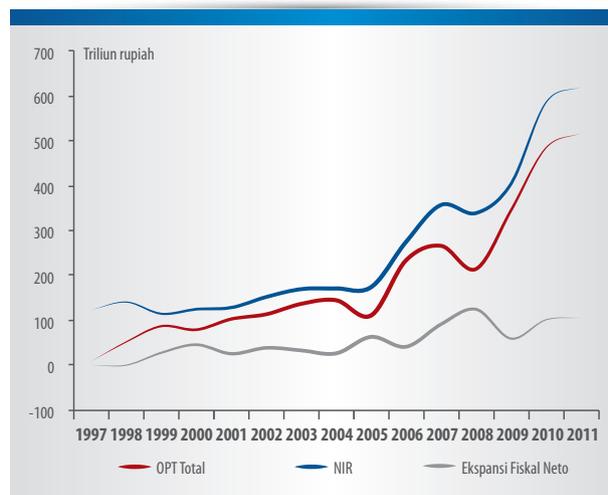
Kondisi likuiditas perbankan yang berlebih merupakan tantangan bagi peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan aktivitas perekonomian. Secara umum, kondisi eksekusi likuiditas perbankan dapat diukur dari besarnya likuiditas perbankan yang belum dapat disalurkan ke sektor riil dan karenanya ditempatkan pada instrumen moneter Bank Indonesia. Peningkatan eksekusi likuiditas terutama bersumber dari aliran masuk modal asing dan ekspansi keuangan pemerintah, di samping akumulasi likuiditas pada periode sebelumnya (Grafik 7.2). Besarnya eksekusi likuiditas perbankan tersebut merupakan cerminan dari masih rendahnya daya serap sektor riil dan belum berkembangnya pasar keuangan Indonesia dalam menawarkan

berbagai alternatif instrument yang bermanfaat bagi pembiayaan perekonomian. Karenanya, di samping pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia, penanganan eksekusi likuiditas tersebut perlu disertai dengan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan, perluasan kapasitas perekonomian, dan pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*).

Dalam jangka pendek, peningkatan eksekusi likuiditas berdampak pada operasi moneter yang meningkat. Pada tahun 2011, rata-rata posisi harian operasi moneter meningkat menjadi Rp462,9 triliun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010 sebesar Rp371,7 triliun. Dengan keterbatasan daya serap sektor riil dan belum berkembangnya pasar keuangan di tengah derasnya aliran masuk modal asing ke dalam negeri, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mengelola eksekusi likuiditas perbankan agar tetap konsisten dengan upaya untuk menciptakan stabilitas pasar keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan tersebut antara lain berupa perpanjangan profil jatuh waktu instrumen moneter dan pembatasan penawaran SBI di pasar primer. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dalam pengelolaan likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia pada tahun 2010, antara lain melalui kenaikan kewajiban giro wajib minimum (GWM) rupiah bagi perbankan menjadi 8% dari dana pihak ketiga (DPK) rupiah.

Perpanjangan Profil Jatuh Waktu Instrumen Moneter

Kebijakan perpanjangan profil jatuh waktu instrumen moneter merupakan salah satu upaya Bank Indonesia



Grafik 7.2 Sumber Eksekusi Likuiditas

untuk mengarahkan pengelolaan likuiditas perbankan ke dalam perspektif yang lebih panjang. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperbaiki struktur suku bunga yang tidak sempurna akibat komposisi instrumen operasi moneter yang terkonsentrasi di tenor sangat pendek dengan frekuensi jatuh waktu yang lebih sering (Grafik 7.3).

Kebijakan Perpanjangan Profil Jatuh Waktu untuk SBI (PPSBI) pada tahun 2011 merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang telah diterapkan sejak bulan Maret 2010. Secara umum, kebijakan PPSBI dilakukan melalui dua cara, yaitu menjarangkan atau mengurangi pelaksanaan lelang SBI dari mingguan menjadi bulanan dan secara bertahap menghentikan penerbitan SBI berjangka waktu 1,3 dan 6 bulan atau hanya menerbitkan SBI berjangka waktu 9 bulan. Kebijakan PPSBI bertujuan untuk mengurangi peran SBI jatuh waktu sebagai sumber peningkatan likuiditas bank. Selain itu, perbankan diharapkan dapat mengelola likuiditas perbankan dengan memperpanjang horizon waktu pengelolaan likuiditasnya.

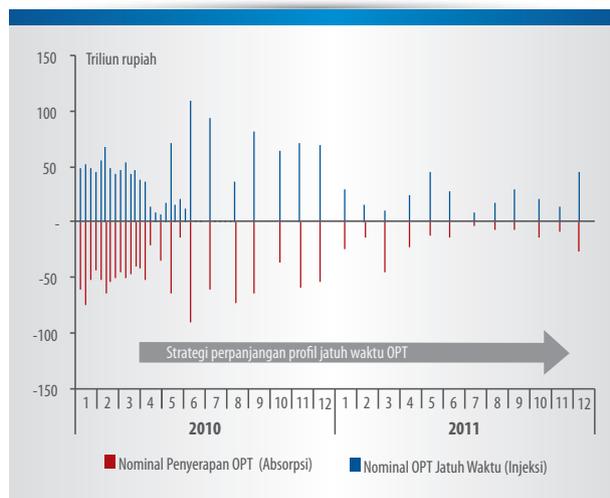
Kebijakan perpanjangan profil jatuh waktu juga berlaku untuk instrumen operasi moneter lainnya. *Term Deposit* (TD) dan *Reverse Repo* SBN (RR-SBN) diarahkan untuk selalu dilelang dengan variasi tenor yang lebih panjang dari 2 bulan. Namun, lelang untuk tenor pendek (kurang dari 1 bulan) masih mungkin untuk dilakukan sewaktu-waktu dengan jumlah yang terbatas guna menyerap likuiditas yang tidak dapat diserap dengan tenor panjang tersebut. Dengan lebih panjangnya jangka waktu eksekusi likuiditas tersimpan di instrumen moneter, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendalaman pasar keuangan melalui

bertambahnya transaksi antarbank serta mengurangi segmentasi yang terjadi di pasar uang antarbank. Hal itu akan memperkuat manajemen moneter dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi.

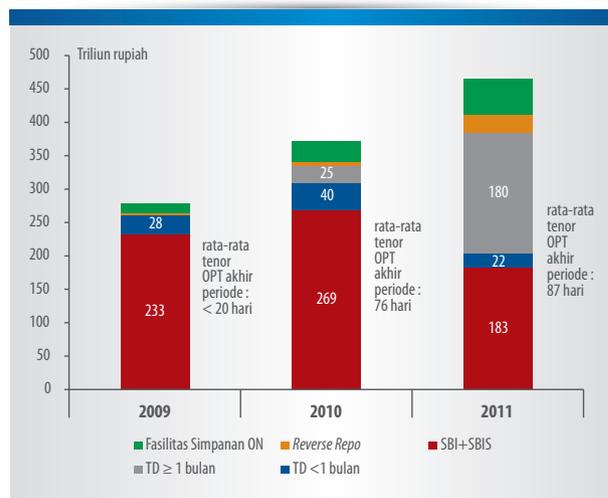
Evaluasi terhadap penerapan kebijakan perpanjangan profil jatuh waktu menunjukkan bahwa rata-rata tenor instrumen moneter telah beralih ke tenor yang lebih panjang (Grafik 7.4). Pada 2009, rata-rata sisa jangka waktu seluruh instrumen moneter adalah 18,23 hari mengingat lelang SBI dilakukan secara mingguan dan mayoritas SBI diterbitkan dengan tenor 1 bulan. Sejalan dengan penerapan kebijakan makprudensial dalam rangka pengelolaan eksekusi likuiditas perbankan, rata-rata tenor instrumen OPT meningkat menjadi 76 hari pada tahun 2010 dan 87 hari pada tahun 2011.

Mengurangi Jumlah Penawaran SBI di Pasar Primer

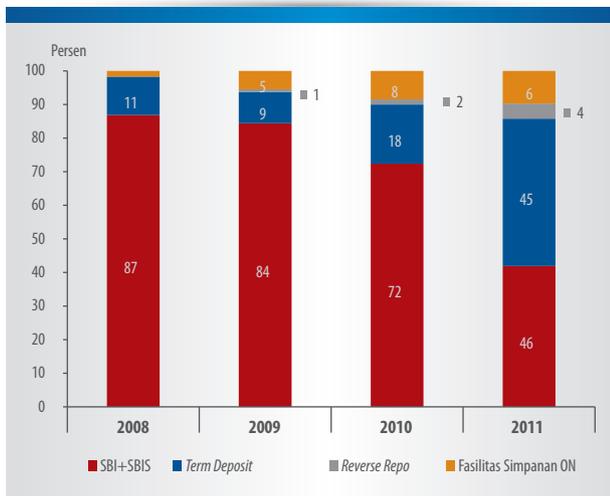
Penerapan kebijakan perpanjangan profil jatuh waktu dapat mengendalikan tambahan likuiditas yang berasal dari OPT jatuh waktu. Kebijakan pengelolaan likuiditas perbankan juga dilengkapi dengan kebijakan untuk mengurangi jumlah penawaran SBI di pasar primer. SBI merupakan satu-satunya instrumen moneter untuk menyerap eksekusi likuiditas perbankan yang dapat dibeli oleh pihak selain bank, termasuk nonresiden. Sementara itu, volatilitas kepemilikan SBI yang diakibatkan peningkatan transaksi SBI di pasar sekunder berpotensi mengganggu pengelolaan likuiditas dan stabilitas harga. Di samping untuk memperkuat manajemen moneter, pengurangan jumlah penawaran SBI di pasar primer juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi dampak negatif dari pembalikan modal asing (*large and sudden reversal*) dari SBI.



Grafik 7.3 Frekuensi Jatuh Waktu dan Penyerapan Instrumen Operasi Moneter



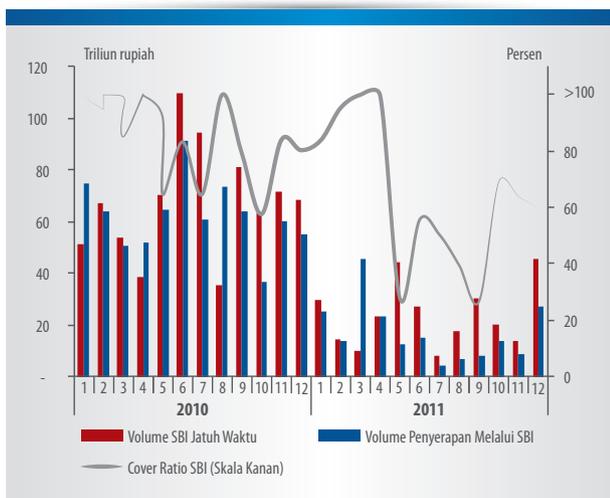
Grafik 7.4 Nominal Posisi Rata-rata Harian Instrumen Operasi Moneter dan Rata-rata Sisa Jangka Waktu



Grafik 7.5 Perkembangan Komposisi Instrumen Operasi Moneter

Selain itu, tujuan pengurangan jumlah penawaran SBI di pasar primer juga untuk meningkatkan peran instrumen moneter non-SBI dalam menyerap eksekusi likuiditas. Hal ini tercermin pada pangsa instrumen *Term Deposit* (TD) dan *Reverse Repo* (RR) SBN yang meningkat dari waktu ke waktu (Grafik 7.5). Dalam kaitan ini, peningkatan operasi moneter dengan RR-SBN juga dimungkinkan dengan adanya pembelian SBN di pasar sekunder oleh Bank Indonesia yang lebih besar khususnya pada semester II 2011.

Pengurangan jumlah penawaran SBI tersebut dilakukan melalui pengurangan secara bertahap atas target indikatif dan pemenang lelang SBI pada setiap lelang. Sepanjang tahun 2011 pemenang lelang SBI (*bid to cover ratio*) memperlihatkan tren yang terus menurun (Grafik 7.6). Kelebihan likuiditas yang tidak terserap dalam lelang SBI akan berpindah ke instrumen



Grafik 7.6 Profil Lelang SBI Tahun 2010 -2011

TD atau RR-SBN yang secara bersamaan tenornya juga diperpanjang untuk mendukung strategi perpanjangan profil jatuh waktu instrumen moneter.

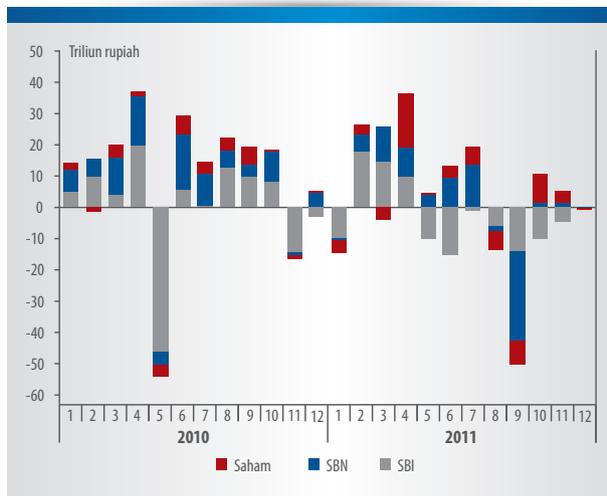
Instrumen Moneter TD dan RR-SBN merupakan instrumen moneter yang memiliki fungsi yang sama dengan SBI, yaitu untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar. Namun, dibandingkan dengan SBI, instrumen TD hanya dapat dibeli oleh perbankan dalam negeri dan tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) sehingga penyerapan likuiditas dengan TD menjadi lebih permanen sesuai dengan jangka waktunya. Karakteristik tersebut merupakan pertimbangan utama TD dapat menggantikan fungsi SBI dalam rangka penyerapan eksekusi likuiditas.

Sementara itu, operasi moneter dengan mekanisme RR-SBN yang menggunakan *underlying* SBN bila diaktifkan akan menambah dorongan terciptanya pasar SBN yang lebih dalam (*financial deepening*). Penggunaan SBN sebagai *underlying* instrumen RR-SBN juga sejalan dengan langkah-langkah Bank Indonesia untuk secara bertahap menggantikan SBI dengan SBN sebagai instrumen moneter.

PENGENDALIAN ALIRAN MODAL

Di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi ekonomi global, aliran masuk modal asing ke Indonesia terus berlanjut, meski secara kumulatif relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2010. Derasnya aliran masuk modal asing terutama terjadi pada semester I 2011, dan kemudian setelah itu berbalik arah seiring dengan memburuknya krisis di Eropa dan pelemahan ekonomi AS. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kondusif serta imbal hasil yang menarik merupakan faktor yang menarik aliran masuk modal asing tersebut (Grafik 7.7).

Derasnya aliran masuk modal asing perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi perekonomian nasional. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong aliran masuk modal asing tersebut ke jangka lebih panjang dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI), baik melalui percepatan program investasi dan infrastruktur maupun pendalaman pasar keuangan. Pada saat bersamaan, pengendalian perlu dilakukan terhadap aliran masuk modal asing jangka pendek karena sangat rentan terhadap pembalikan tiba-tiba dan dalam jumlah besar (*large and sudden reversal*) yang dapat menimbulkan gejolak nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan



Grafik 7.7 Portofolio Aliran Modal

pertimbangan tersebut, di samping terus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mendorong aliran modal asing masuk jangka panjang, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh tahun 2010 dalam rangka pengendalian aliran masuk modal asing jangka pendek. Kebijakan tersebut antara lain berupa kenaikan kewajiban GWM valuta asing, perpanjangan masa endap minimum untuk SBI, dan pemberlakuan batasan pinjaman luar negeri jangka pendek bagi perbankan. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) yang berlaku efektif pada awal tahun 2012.

Giro Wajib Minimum Valuta Asing (GWM Valas)

Kenaikan GWM valas ditujukan untuk pengelolaan likuiditas perbankan dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan valuta asing khususnya apabila terdapat tekanan aliran keluar modal asing yang besar atau bersamaan. Secara industri, kenaikan alat likuid dalam valuta asing yang wajib disimpan perbankan pada Bank Indonesia tersebut juga akan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kenaikan GWM valas tersebut apabila diperlukan juga dapat menambah pasokan likuiditas valuta asing di dalam negeri sehingga dapat membantu upaya stabilisasi nilai tukar rupiah khususnya dan stabilitas moneter pada umumnya.

Kenaikan GWM valas² pada tahun 2011 dilakukan secara bertahap, yaitu dari 1% dari DPK valuta asing

2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

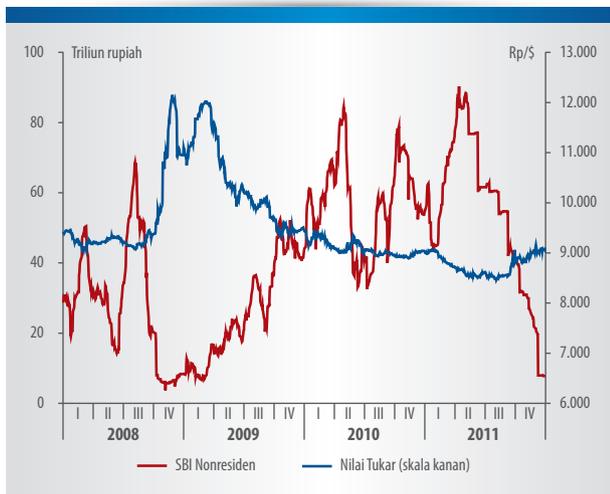
yang dimiliki bank menjadi 5% pada bulan Maret 2011 dan kemudian menjadi 8% pada bulan Juni 2011. Kenaikan GWM valas secara bertahap tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi perbankan untuk menyesuaikan pengelolaan likuiditas valuta asingnya.

Peningkatan GWM valas dinilai tidak memberatkan perbankan. Kenaikan GWM valas dari 1% menjadi 8% dilakukan pada waktu kondisi pasar valas yang mulai berlimpah, sejalan dengan derasnya aliran masuk modal asing, di samping besarnya eksekusi likuiditas rupiah yang dimiliki perbankan. Karenanya, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak minimal terhadap biaya dana sehingga tidak akan mengganggu intermediasi perbankan. Selain itu, level GWM valas sebesar 1% merupakan terendah di kawasan sehingga dikhawatirkan tidak cukup sebagai penahan (*buffer*) apabila terjadi gejolak di perekonomian.

Masa Endap Minimum untuk SBI (Minimum Holding Periods SBI)

Kebijakan perpanjangan masa endap minimum enam bulan untuk SBI yang mulai diterapkan pada tanggal 13 Mei 2011 merupakan penguatan dari kebijakan masa endap minimum satu bulan untuk SBI yang diterapkan pada tanggal 7 Juli 2010. Evaluasi terhadap penerapan masa endap minimum satu bulan untuk SBI menunjukkan bahwa minat investor asing terhadap instrumen SBI masih tinggi sejalan dengan masih menariknya imbal hasil dan likuidnya transaksi SBI di pasar sekunder, di tengah masih terbatasnya instrumen pasar keuangan di Indonesia. Dengan perpanjangan masa endap minimum untuk SBI, volume transaksi SBI di pasar sekunder menjadi berkurang karena investor hanya akan mampu membeli SBI dengan sisa jangka waktu lebih dari enam bulan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi potensi pembalikan aliran modal asing yang dapat mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan (Grafik 7.8). Semakin berkurangnya transaksi SBI sebagai instrumen moneter di pasar sekunder ini juga diharapkan dapat mendorong transaksi non-SBI, seperti *Repo* SBN di pasar uang.

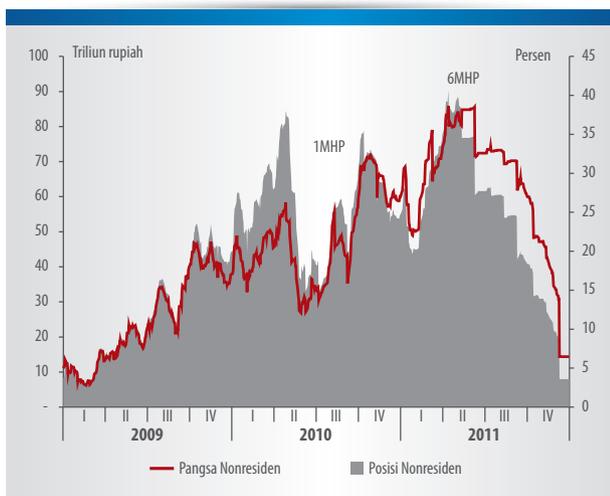
Kebijakan masa endap minimum enam bulan untuk SBI mewajibkan pembeli SBI, baik di pasar primer maupun di pasar sekunder, memegang kepemilikan SBI yang dimilikinya selama minimal 6 bulan (182 hari). Selama periode tersebut, pemilik SBI tidak diperbolehkan melepas kepemilikannya atas SBI baik secara *outright* maupun *repo* kepada pihak lain, kecuali kepada Bank



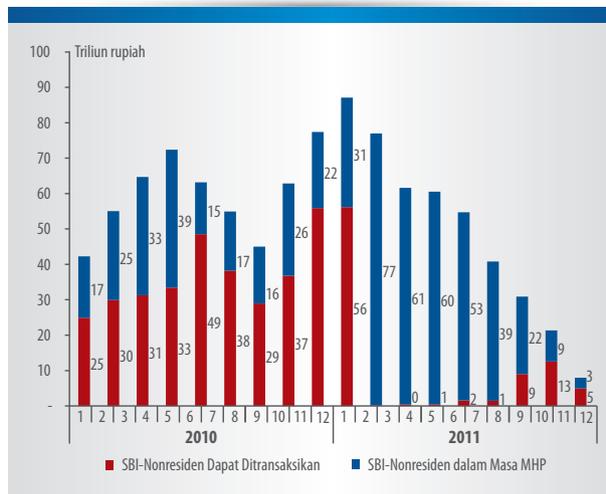
Grafik 7.8 Kepemilikan Asing di SBI dan Nilai Tukar Rupiah

Indonesia. Kebijakan itu diberlakukan kepada pemilik SBI baik residen maupun nonresiden dan dimaksudkan agar kepemilikan SBI maupun transaksinya di pasar sekunder dapat lebih berjangka panjang. Dengan demikian, kebijakan tersebut masih konsisten dengan sistem devisa bebas yang dianut Indonesia.

Sejalan dengan penerapan kebijakan masa endap minimum enam bulan untuk SBI, pangsa dan *outstanding* kepemilikan nonresiden cenderung turun (Grafik 7.9). Dengan pemberlakuan ketentuan tersebut, maka praktis investor asing hanya akan membeli SBI dengan sisa jangka waktu lebih dari enam bulan sehingga sebagian besar SBI dimiliki oleh perbankan dan investor dalam negeri. Hal itu juga mengingat pembelian SBI di pasar perdana hanya dapat dilakukan oleh pihak perbankan. Selain itu, penurunan kepemilikan asing dalam SBI tersebut juga dikarenakan



Grafik 7.9 Pangsa dan Posisi Kepemilikan SBI Nonresiden



Grafik 7.10 SBI Nonresiden yang Tersedia untuk Dijual

semakin terbatasnya pasokan SBI di pasar sejalan dengan langkah BI untuk memperpanjang jangka waktu maupun menggeser instrumen moneter ke non-SBI.

Penerapan kebijakan masa endap minimum enam bulan untuk SBI menyebabkan fleksibilitas nonresiden untuk melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya menjadi terbatas (Grafik 7.10). Karenanya, SBI yang dibeli di pasar sekunder secara otomatis menjadi bersifat *“hold to maturity”* dan umumnya dilakukan oleh investor yang bertujuan untuk investasi (bukan spekulasi). Hal tersebut dapat mengurangi dampak buruk pembalikan modal asing dengan tiba-tiba atas kepemilikan dalam SBI. Kondisi tersebut tercermin pada terbatasnya aliran keluar modal asing yang bersumber dari SBI ketika terjadi tekanan di pasar keuangan domestik pada bulan September 2011.

Kebijakan Pinjaman Luar Negeri (PKLN)

Penerapan pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank ditujukan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan dalam menghadapi gejolak eksternal dan sekaligus sebagai bagian integral dari pengelolaan aliran modal asing yang ditempuh Bank Indonesia³. Kebijakan itu merupakan normalisasi dari kebijakan yang berlaku sebelumnya⁴. Salah satu saluran dari derasnya aliran

3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

4 Ketentuan batasan posisi harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal dihapus pada 14 Oktober 2008 sebagai respon kebijakan untuk mengatasi keketatan likuiditas valas domestik dan perbankan akibat krisis global.

masuk modal asing ke Indonesia dilakukan melalui peningkatan pinjaman luar negeri jangka pendek yang diterima perbankan, termasuk rekening giro (*vostro*) dan instrumen pinjaman luar negeri jangka pendek lainnya. Dari sisi aktiva peningkatan pinjaman luar negeri tersebut menambah likuiditas valuta asing di dalam negeri, namun dari sisi pasiva juga meningkatkan kewajiban valuta asing dan karenanya meningkatkan eksposur perbankan terhadap risiko gejolak eksternal. Risiko ini semakin penting untuk dikendalikan karena jangka waktu pinjaman tersebut yang pendek dan cenderung fluktuatif. Dengan pertimbangan ini, pembatasan tersebut merupakan upaya untuk: (1) menerapkan prinsip kehati-hatian (*macroprudential*) dalam mengelola pinjaman luar negeri jangka pendek bank; (2) mendorong pinjaman luar negeri bank ke arah jangka panjang; dan (3) mendukung pencapaian stabilitas makro dan sistem keuangan.

Pada awal implementasi ketentuan tersebut, apabila bank memiliki saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek melebihi 30%, maka bank tidak dapat menambah saldo tersebut dan harus menurunkan posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendeknya menjadi paling tinggi 30% paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya ketentuan tersebut. Selanjutnya, setiap bank wajib menjaga posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendeknya paling tinggi 30% dari modal bank. Bank yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu per seratus) pertahun dari jumlah kelebihan per hari.

Kewajiban Penerimaan Devisa Melalui Bank Dalam Negeri

Peraturan Bank Indonesia⁵ yang mewajibkan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan penarikan devisa utang luar negeri (DULN) melalui bank devisa di dalam negeri ditujukan untuk memperkuat secara struktural pasokan devisa untuk mendukung stabilitas makro dan pembiayaan perekonomian. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa selama ini keseimbangan pasar valas domestik masih bergantung pada pasokan valas yang bersumber dari aliran masuk modal asing, termasuk dalam bentuk portofolio jangka pendek. Pada saat bersamaan, sebagian DHE dan DULN tersebut masih diterima

dan disimpan di perbankan luar negeri. Kondisi ini menyebabkan pasokan di pasar valas domestik dan perkembangan nilai tukar rupiah rentan terhadap fluktuasi aliran masuk portofolio asing tersebut. Rupiah cenderung sangat menguat pada waktu aliran portofolio asing sangat deras, dan sebaliknya melemah tajam ketika terjadi pembalikan modal asing. Selain itu, dengan sebagian DHE dan DULN yang masih disimpan di luar negeri tersebut, ketersediaan pembiayaan dalam bentuk valuta asing bagi perekonomian nasional menjadi belum optimal.

Kebijakan lalu lintas devisa yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2012. Dalam kaitan ini, seluruh DHE wajib dimasukkan oleh eksportir ke bank devisa dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sementara itu, setiap DULN wajib ditarik oleh debitur melalui bank devisa dalam negeri. Kewajiban DULN ini berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non-revolving* yang tidak digunakan untuk *refinancing*; selisih fasilitas *refinancing* dengan jumlah ULN lama; dan ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*) dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes (MTN)*, *Floating Rate Notes (FRN)*, *Promissory Notes (PN)*, dan *Commercial Paper (CP)*. Bagi eksportir dan atau debitur yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor bekerja sama dengan otoritas yang berwenang di bidang kepastian.

Dengan adanya kebijakan tersebut, dana valuta asing yang berasal dari DHE dan DULN diharapkan dapat memperkuat pasokan sumber dana valuta asing yang lebih permanen dan stabil bagi perekonomian nasional, dibandingkan dengan dana yang berasal dari aliran portofolio asing. Tambahan pasokan valuta asing dari DHE dan DULN tersebut akan memperkuat keseimbangan di pasar valas domestik sehingga mendukung stabilitas perkembangan nilai tukar rupiah, di samping akan meningkatkan ketersediaan pembiayaan dalam bentuk valuta asing bagi perekonomian nasional. Aktivitas transaksi devisa perbankan domestik dalam melayani eksportir dan korporasi terkait dengan perdagangan, pinjaman, investasi maupun pengelolaan dana valuta asing juga diharapkan akan meningkat dengan kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas statistik ekspor, impor,

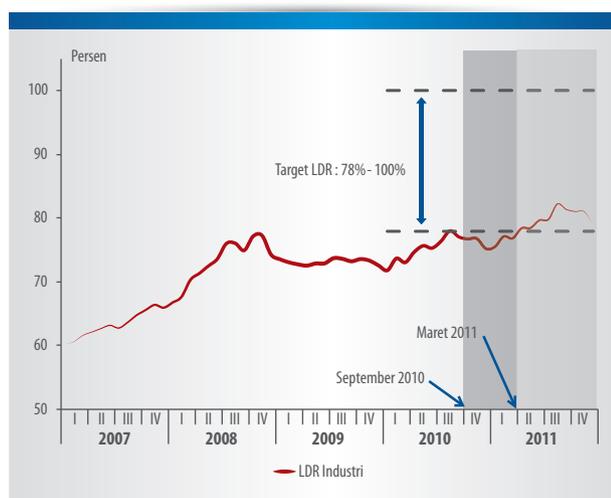
⁵ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/20/PBI/2011 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang mulai berlaku berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

utang luar negeri, neraca pembayaran (*balance of payment*) dan pemantauan devisa sehingga mendukung kebijakan moneter maupun kebijakan perpajakan dan kepabeanaan.

Ketentuan terkait DHE dan DULN tersebut masih sejalan dengan sistem devisa bebas yang dianut Indonesia sesuai dengan UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Kebijakan ini tidak mewajibkan eksportir dan debitur untuk menyimpan DHE dan DULN tersebut di perbankan dalam negeri dan/atau mengkonversikannya ke mata uang rupiah.

MENINGKATKAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN

Peningkatan fungsi intermediasi perbankan berperan penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneter maupun peran dan ketahanan perbankan bagi perekonomian nasional (Grafik 7.11). Berbagai kebijakan Bank Indonesia di bidang ini ditempuh melalui peningkatan dari sisi sumber maupun penyaluran dana perbankan. Dari sisi sumber dana, peningkatan pengumpulan dana perbankan dilakukan dengan memperluas cakupan deposito dan meningkatkan akses masyarakat kepada institusi perbankan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, penguatan dilakukan dengan meningkatkan transparansi antara pihak perbankan dengan masyarakat melalui publikasi suku bunga dasar kredit, memberikan insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit dan meningkatkan kualitas kredit.



Grafik 7.11 Perkembangan Fungsi Intermediasi Perbankan

Kebijakan GWM dikaitkan dengan *Loan to Deposit Ratio* (GWM LDR)

Kebijakan GWM LDR dimaksudkan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan sesuai dengan siklus perekonomian dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Selama ini, terdapat kecenderungan sejumlah bank yang mobilisasi dananya sangat besar tetapi lebih banyak ditempatkan pada berbagai aset keuangan, termasuk dalam instrumen moneter Bank Indonesia, dan kurang berminat dalam penyaluran kredit sehingga LDR sangat rendah. Sementara terdapat pula sejumlah bank yang terlalu agresif dalam penyaluran kredit tetapi tidak didukung dengan kemampuan mobilisasi dana yang memadai sehingga LDR sangat tinggi. Pada saat bersamaan, terdapat pula perilaku bank yang cenderung berlebihan dalam penyaluran kredit pada saat kegiatan ekonomi meningkat dan sebaliknya terlalu ketat pada waktu terjadi perlambatan ekonomi (*pro-cyclical*).

Dengan pertimbangan tersebut, pada bulan Maret 2011 Bank Indonesia mulai memberlakukan ketentuan GWM LDR⁶. Kebijakan ini ditempuh sebagai suatu mekanisme pemberian insentif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dalam suatu kisaran LDR yang dinilai optimal sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan penerapan kebijakan GWM LDR tersebut, maka penetapan GWM dalam rupiah mencakup: GWM Primer sebesar 8%, GWM Sekunder sebesar 2,5%, dan persentase tertentu GWM LDR sesuai dengan pencapaian LDR bank.

Ketentuan GWM LDR ditujukan untuk mendorong perbankan agar mencapai LDR dalam kisaran yang optimal sebesar 78%-100%. Bank yang memiliki LDR dalam kisaran tersebut diberikan insentif sehingga tidak terkena kewajiban untuk menambah GWM. Bank hanya diizinkan untuk mencapai level LDR di atas 100% apabila didukung oleh tingkat permodalan yang memadai yaitu memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 14%. Sebaliknya, bank yang memiliki level LDR di bawah 78% atau di atas 100% namun tidak memenuhi ketentuan KPMM terkena kewajiban untuk menambah GWM sebagai mekanisme disinsentif karena kurang optimal dalam penyaluran kreditnya. Besarnya tambahan GWM merupakan hasil perkalian antara selisih LDR Bank dengan batas LDR Target, DPK dalam rupiah, dan suatu parameter disinsentif tertentu.

6 Peraturan Bank Indonesia Nomor No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Peningkatan transparansi dan kualitas kredit

Kebijakan Bank Indonesia untuk peningkatan transparansi dan kualitas kredit dilakukan melalui kewajiban publikasi suku bunga kredit dan koordinasi dengan Pemerintah dalam penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk mengumumkan informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)⁷ mulai tanggal 31 Maret 2011 melalui papan pengumuman di setiap kantor bank, halaman utama *website* bank, dan surat kabar bersamaan dengan publikasi laporan keuangan triwulanan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, sekaligus untuk meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik. Sementara itu, untuk mendorong fungsi intermediasi pada sektor-sektor tertentu, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi Pemerintah terkait, seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini ditujukan untuk mensinergikan program masing-masing pihak dan sekaligus untuk menjembatani perbankan dengan pelaku usaha. Dari upaya-upaya ini diharapkan pembiayaan kredit dapat lebih optimal dan berkualitas.

7.3 KOMUNIKASI KEBIJAKAN MONETER

Penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial telah diperkuat dengan strategi komunikasi yang terarah dan berkesinambungan untuk pembentukan ekspektasi para pelaku ekonomi. Intensitas komunikasi kebijakan moneter menjadi semakin diperlukan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Para pelaku ekonomi dan masyarakat perlu terus diberikan informasi yang memadai mengenai perkembangan dan prospek perekonomian nasional, termasuk dampak dari ketidakpastian ekonomi dan keuangan global, serta dasar pertimbangan dan arah kebijakan yang ditempuh

7 SE No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Informasi lebih lengkap dapat dibaca pada publikasi Kajian Stabilitas Keuangan, Maret 2011.

Bank Indonesia. Komunikasi kebijakan moneter yang intensif berperan sangat penting tidak saja untuk memperkuat keyakinan pelaku pasar atas terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan pembentukan ekspektasi masyarakat mengenai arah perkembangan ekonomi ke depan, termasuk langkah-langkah Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Berbagai langkah ditempuh Bank Indonesia untuk memperkuat strategi komunikasi kebijakan moneter. Setiap keputusan kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang telah terjadwal diumumkan segera setelah keputusan itu diambil baik melalui siaran pers atau konferensi pers. Cakupan isi dari siaran pers juga diperkuat dengan penjelasan tidak saja mengenai dasar pertimbangan yang melandasi respon kebijakan yang ditempuh, tetapi juga mengenai arah perkembangan ekonomi dan respon kebijakan Bank Indonesia ke depan. Langkah serupa juga dilakukan untuk setiap kebijakan baru yang ditempuh Bank Indonesia. Strategi komunikasi kebijakan moneter juga diperkuat melalui pertemuan rutin dengan pengamat ekonomi dan pelaku pasar maupun penjelasan kepada para investor dalam dan luar negeri secara langsung dan melalui *teleconference*. Selain itu, publikasi Tinjauan Kebijakan Moneter secara bulanan dan Laporan Kebijakan Moneter secara triwulanan melalui *website* Bank Indonesia maupun publikasi cetak juga disempurnakan dengan pemilihan tema yang tepat sehingga dapat membentuk ekspektasi publik. Upaya lain yang ditempuh adalah publikasi melalui *web-site* Bank Indonesia pidato Dewan Gubernur pada berbagai acara serta penerbitan tulisan-tulisan di media massa untuk menambah wawasan publik dalam memahami kebijakan Bank Indonesia.

7.4 PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS (PMK)

Bank Indonesia telah membangun dan mengimplementasikan Protokol Manajemen Krisis (PMK)⁸. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak bisa sepenuhnya terbebas dari risiko yang dapat mengarah padaterjadinya suatu krisis. Meskipun berbagai

8 Informasi lebih lengkap dapat dibaca pada boks 7.1 Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia.

kebijakan telah ditempuh untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional, sejumlah perkembangan dapat menimbulkan tekanan dan kerentanan baik dari dalam negeri (seperti kebijakan BBM atau kegagalan suatu bank) maupun dari eksternal (seperti pembalikan modal asing secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar). Sejak krisis global tahun 2008, sumber kerentanan dari sisi eksternal semakin tinggi dan penuh ketidakpastian. Pengalaman pada semester II 2011 menunjukkan bagaimana memburuknya ketidakpastian ekonomi global telah menimbulkan dampak rambatan (*spillover effects*) berupa pembalikan modal asing dalam jumlah relatif besar yang meningkatkan tekanan pelemahan rupiah dan risiko instabilitas moneter dan sistem keuangan Indonesia. Lebih dari itu, risiko-risiko tersebut sering tidak dapat diduga dan diperkirakan secara tepat sebelumnya. Karena itu, langkah yang tepat adalah senantiasa meningkatkan kewaspadaan dengan mengidentifikasi sumber-sumber kerentanan tersebut serta membangun suatu mekanisme untuk pencegahan dan penanganan krisis.

PMK pada dasarnya merupakan suatu kerangka dan mekanisme yang baku dan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Di dalamnya diatur mengenai indikator kerentanan yang dapat menimbulkan suatu krisis, penetapan kondisi tekanan, mekanisme pengambilan keputusan, dan organisasi yang terkait. Secara nasional, PMK tersebut terbagi ke dalam bagian-bagian sesuai dengan area dimana krisis dapat terjadi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia lebih fokus pada PMK yang terkait dengan krisis nilai tukar dan krisis perbankan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sementara itu, Pemerintah membangun PMK yang terkait dengan krisis pasar keuangan, krisis fiskal, dan krisis lembaga keuangan bukan bank. Koordinasi yang erat juga dilakukan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mensinkronkan PMK yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Koordinasi yang erat antar lembaga/instansi diperlukan untuk membangun PMK Nasional yang menyeluruh dan terintegrasi, sekaligus untuk memperkuat landasan hukumnya. Beberapa elemen protokol koordinasi terkait dengan sektor keuangan telah dituangkan dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem keuangan (FKSSK) yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Akan tetapi koordinasi bagian-bagian PMK yang lain dan integrasinya ke dalam PMK Nasional, termasuk

mekanisme pengambilan keputusan dan pembiayaan yang mungkin diperlukan, belum dilakukan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengintegrasikan PMK Nasional tersebut ke dalam kerangka kerja Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang tengah disiapkan Pemerintah. Rancangan Undang-Undang JPSK tersebut merupakan landasan hukum untuk melakukan koordinasi antar otoritas/lembaga di sektor keuangan. Sementara itu, sambil menunggu proses RUU JPSK tersebut, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan LPS telah menyepakati nota kesepahaman sebagai acuan dalam mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan krisis yang menjadi kewenangan masing-masing.

7.5 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN MONETER

Penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia sejak tahun 2010 dan diperkuat tahun 2011 dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi kegiatan perekonomian dan pengendalian inflasi. Pengalaman di Indonesia menunjukkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam kondisi ekseklikuitas yang sangat besar dan aliran masuk modal asing yang deras menjadi semakin kompleks. Kebijakan moneter yang hanya bertumpu pada bekerjanya saluran transmisi suku bunga tidak selalu berjalan efektif. Dalam kondisi demikian, besarnya ekseklikuitas memerlukan kenaikan suku bunga yang tinggi dan akan mendorong semakin derasnya aliran masuk modal asing yang justru menyebabkan semakin besarnya ekseklikuitas tersebut. Dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, efektivitas kebijakan moneter melalui saluran transmisi suku bunga dapat diperkuat dengan sejumlah kebijakan yang dapat meningkatkan bekerjanya saluran transmisi moneter yang lain, baik saluran nilai tukar, uang beredar, kredit, harga aset keuangan, maupun ekspektasi.

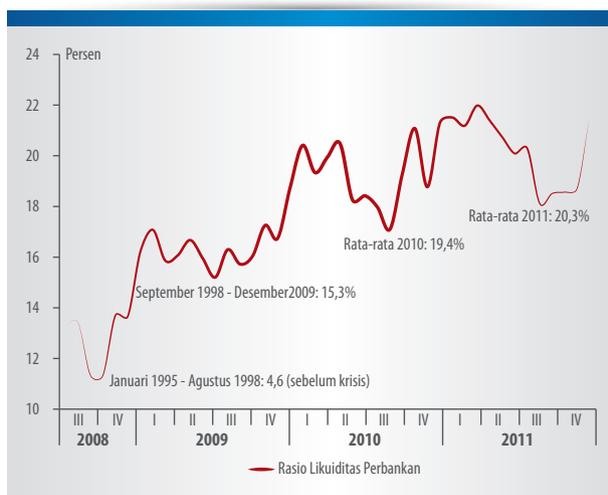
Ekseklikuitas di Indonesia masih relatif tinggi dan cenderung meningkat. Di samping akumulasi ekseklikuitas pada periode sebelumnya, besarnya pasokan likuiditas itu didorong oleh derasnya aliran modal asing masuk di tengah ekspansi keuangan Pemerintah. Sebagai gambaran, rasio likuiditas perbankan Indonesia selama dua tahun sejak terjadinya krisis global (2008-2009) rata-rata sekitar 15% dari DPK, terus meningkat menjadi sekitar 19% pada 2010 dan 20% pada 2011

(Grafik 7.12). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang lebih tinggi masih belum mampu secara optimal menyerap tambahan eksekusi likuiditas tersebut. *Base money*, sebagai proksi dari permintaan likuiditas, selama tahun 2011 meningkat dari Rp518 triliun menjadi Rp613 triliun. Akumulasi pasokan likuiditas yang jauh melebihi permintaan perekonomian tersebut telah menyebabkan semakin besarnya eksekusi likuiditas perbankan Indonesia.

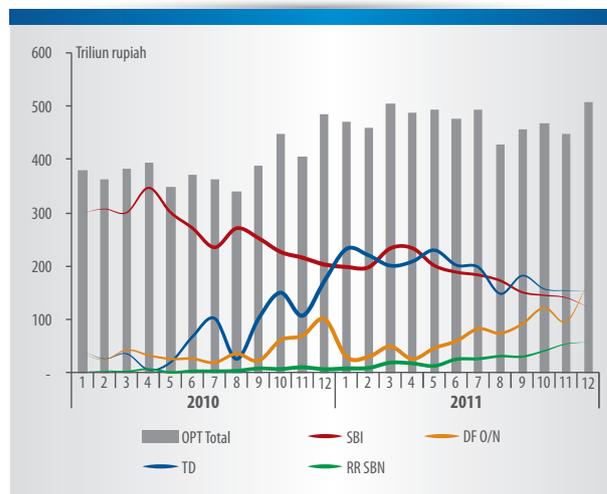
Di tengah kondisi likuiditas perbankan yang masih berlebih, strategi operasi moneter diarahkan pada optimalisasi pengelolaan likuiditas ke arah jangka panjang. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah penyempurnaan untuk lebih memperkuat pelaksanaan operasi moneter. Penerbitan instrumen moneter diarahkan ke tenor yang lebih panjang, sementara instrumen moneter jangka pendek semakin terbatas.

Upaya penyerapan likuiditas melalui operasi moneter berdampak pada posisi OPT yang meningkat. Selama tahun 2011, posisi OPT meningkat sebesar Rp19 triliun menjadi Rp505 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2010. Penyerapan likuiditas tersebut sebagian besar berbentuk *Term Deposit* yang pada akhir tahun 2010 tercatat Rp172,6 triliun meningkat hingga pertengahan tahun dan kemudian turun menjadi Rp154,4 triliun pada akhir tahun 2011. Sementara itu, posisi SBI 9 bulan turun menjadi Rp123,2 triliun dari posisi pada akhir tahun 2010 sebesar Rp203,1 triliun.

Dominasi penggunaan SBI dalam operasi moneter semakin berkurang sejalan dengan upaya untuk mendorong penggunaan instrumen moneter lainnya



Grafik 7.12 Rasio Eksekusi Likuiditas Perbankan



Grafik 7.13 Penggunaan Berbagai Instrumen Moneter

sekaligus pendalaman pasar keuangan. Rata-rata pangsa SBI dalam operasi moneter turun menjadi 38% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2010 sebesar 71%. Kondisi ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk meningkatkan peran *Term Deposit* dan *Reverse Repurchase SBN* (RR-SBN) sebagai instrumen moneter (Grafik 7.13).

Peran instrumen moneter *Term Deposit* (TD) dalam operasi moneter terus meningkat. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, rata-rata pangsa TD dalam operasi moneter meningkat menjadi 40% dari 18%. Adanya penyesuaian terhadap karakteristik TD⁹ menyebabkan minat perbankan untuk menempatkan likuiditasnya di instrumen tersebut meningkat. Sejalan dengan penggunaan TD yang lebih besar dan strategi perpanjangan profil jatuh waktu instrumen moneter, tenor instrumen TD yang digunakan dalam operasi moneter juga semakin panjang. Sepanjang semester I 2011, penggunaan TD masih didominasi oleh TD dengan tenor di bawah 6 bulan (sekitar 93%). Namun, pada akhir tahun 2011, sebagian besar (sekitar 60%) TD yang digunakan dalam operasi moneter memiliki tenor yang lebih panjang, yaitu 6 bulan.

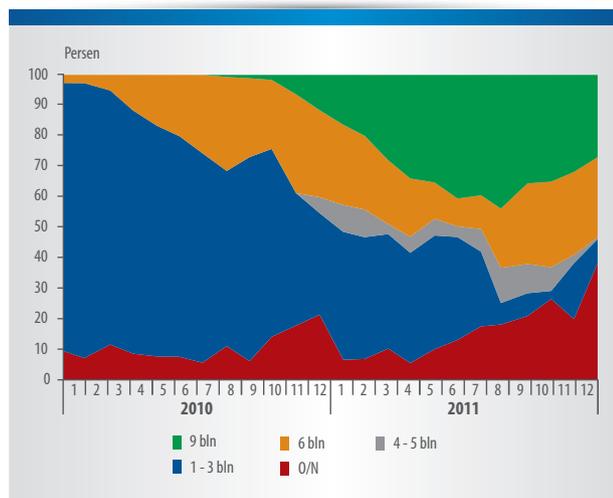
Penggunaan instrumen moneter RR-SBN dalam operasi moneter juga meningkat, meski masih relatif terbatas. Pelaksanaan operasi moneter dengan menggunakan instrumen RR-SBN mulai sering digunakan sejak semester II 2011 seiring dengan peningkatan pembelian SBN di pasar sekunder oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Rata-rata pangsa

9 Salah satu bentuk penyesuaian adalah instrumen TD dapat ditebus kepada Bank Indonesia sebelum jatuh tempo. Penyesuaian tersebut berlaku sejak bulan Mei 2011.

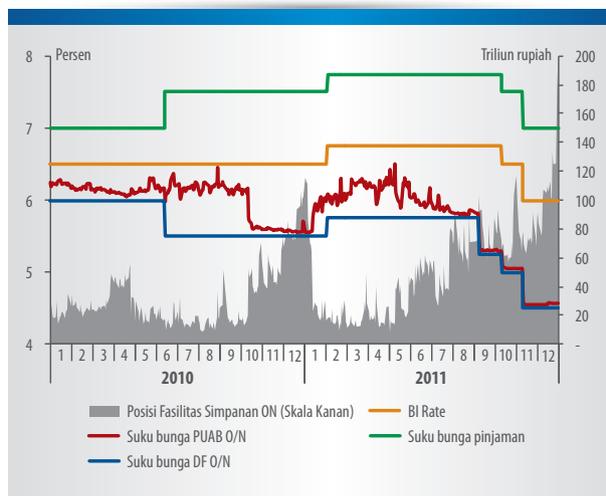
RR-SBN dalam operasi moneter meningkat menjadi 6% dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1%. Penggunaan instrumen moneter RR-SBN yang semakin besar diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan sejalan dengan peran SBN yang semakin bervariasi.

Ditinjau dari jangka waktunya, pangsa instrumen moneter dengan tenor yang lebih panjang meningkat sejalan dengan strategi optimalisasi pengelolaan likuiditas (Grafik 7.14). Rata-rata penempatan likuiditas perbankan pada instrumen moneter untuk tenor yang lebih panjang dari 6 bulan meningkat menjadi 53% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010 yang hanya sekitar 20%. Upaya untuk mendorong lebih lanjut pengelolaan likuiditas melalui instrumen moneter dengan tenor yang lebih panjang menjadi lebih sulit pada semester II 2011. Seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, serta ekspansi kredit yang semakin tinggi, maka meningkatnya kebutuhan berjaga-jaga menyebabkan preferensi perbankan untuk menempatkan likuiditasnya pada instrumen moneter jangka pendek masih tinggi. Fasilitas simpanan ON di Bank Indonesia sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan jangka pendek meningkat menjadi Rp170 triliun dibandingkan dengan akhir tahun 2010 sebesar Rp101,3 triliun.

Besarnya penempatan likuiditas perbankan pada tenor jangka pendek mendorong penurunan suku bunga PUAB ON. Suku bunga PUAB On yang selama semester I 2011 masih bergerak di sekitar BI Rate kemudian turun menjadi lebih rendah dari BI Rate dan cenderung mengarah pada batas bawah koridor suku bunga operasi moneter Bank Indonesia. Secara



Grafik 7.14 Komposisi Instrumen Moneter Berdasarkan Maturitas

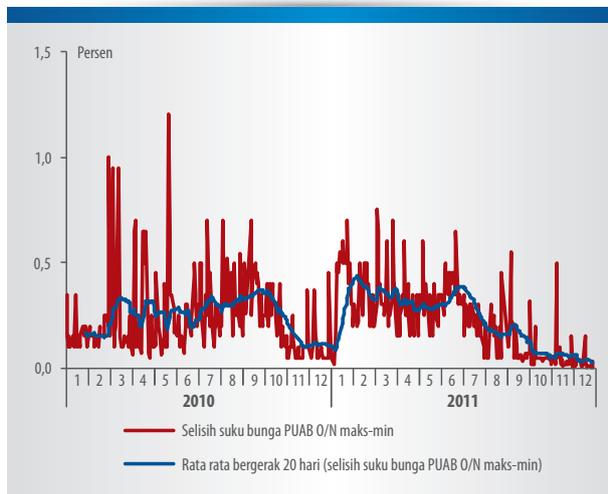


Grafik 7.15 Suku Bunga PUAB ON dan Instrumen Moneter

keseluruhan rata-rata suku bunga PUAB ON pada tahun 2011 turun sekitar 39 bps menjadi 5,65% (Grafik 7.15). Perkembangan suku bunga PUAB ON yang bergerak pada batas bawah koridor suku bunga operasi moneter masih dapat ditolerir seiring dengan besarnya kebutuhan likuiditas untuk berjaga-jaga oleh perbankan. Rendahnya suku bunga PUAB ON tersebut juga sejalan dengan sinyal kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia sejak semester II 2011 sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan meningkatkan kredit perbankan yang diperlukan untuk memberikan stimulus pada perekonomian domestik.

Kondisi pasar uang juga relatif stabil. Penurunan suku bunga PUAB ON diikuti dengan selisih antara suku bunga PUAB ON tertinggi dan terendah yang relatif kecil dan tidak banyak berubah. Rata-rata selisih antara suku bunga PUAB ON tertinggi dan terendah pada tahun 2011 tercatat sebesar 0,22% relatif sama dengan kondisi pada tahun 2010 sebesar 0,24%. Stabilitasnya pasar uang tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekspek likuiditas yang terjadi di perbankan. Ketika terjadi tekanan di pasar keuangan akibat sentimen negatif global pada bulan September 2011, selisih suku bunga PUAB ON sempat meningkat mencapai 0,55%, namun kembali turun. Secara bulanan, rata-rata selisih suku bunga PUAB ON pada bulan September relatif terjaga mencapai 0,12% dibandingkan dengan bulan Agustus 2011 sebesar 0,16% (Grafik 7.16).

Sejalan dengan penurunan suku bunga PUAB ON, suku bunga PUAB untuk tenor yang lebih panjang juga menjadi lebih rendah. Besarnya penurunan suku bunga PUAB untuk tenor lebih panjang cenderung lebih besar

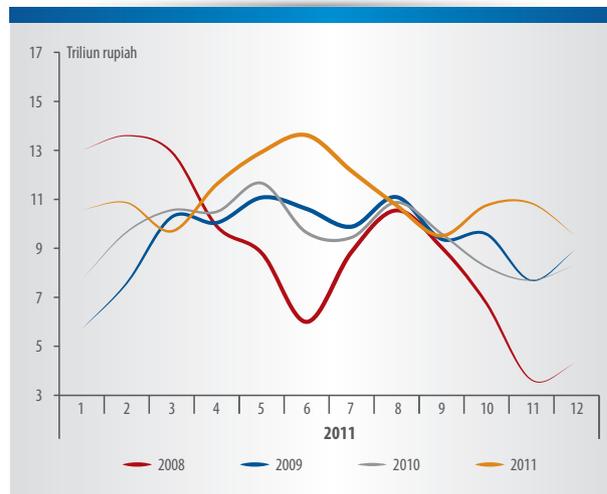


Grafik 7.16 Selisih Suku Bunga PUAB ON Tertinggi Terendah

dibandingkan dengan penurunan suku bunga PUAB ON (Grafik 7.17).

Rata-rata volume transaksi PUAB selama tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 di tengah upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi di pasar uang melalui pelebaran koridor suku bunga. Pada tahun 2011, rata-rata volume transaksi PUAB sebesar Rp11 triliun atau sedikit meningkat dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2010 sebesar Rp9,5 triliun (Grafik 7.18). Besarnya eksekusi kondisi likuiditas perbankan menyebabkan peningkatan volume transaksi di pasar uang antar bank relatif terbatas.

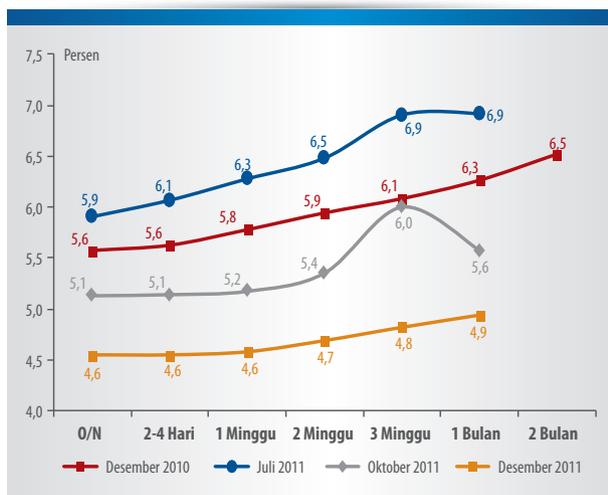
Suku bunga perbankan juga menunjukkan tren yang menurun. Sejalan dengan BI rate yang lebih rendah, suku bunga simpanan dan kredit juga tercatat menurun. Sepanjang tahun 2011, suku bunga deposito turun 48



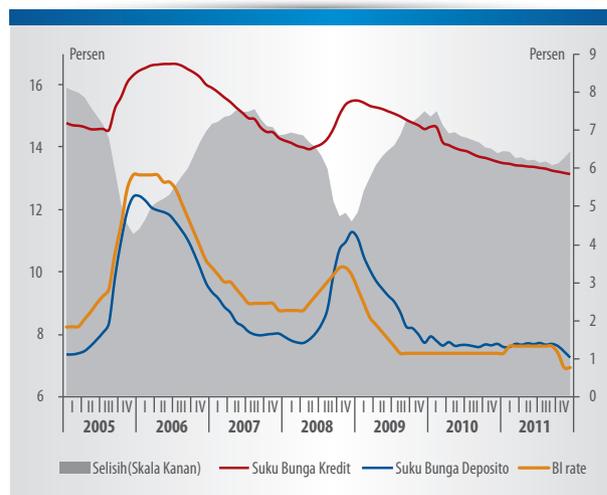
Grafik 7.18 Volume PUAB

bps menjadi 6,35%, sementara suku bunga kredit turun 43 bps menjadi 12,78% (Grafik 7.19).

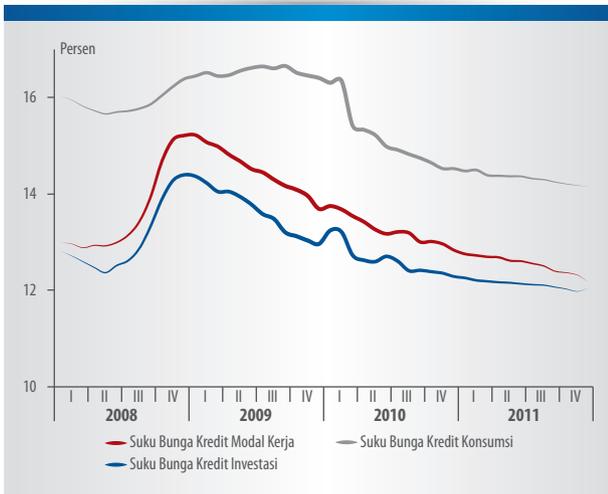
Selain dipengaruhi oleh BI Rate yang lebih rendah, penurunan suku bunga kredit terindikasi juga dipengaruhi oleh kewajiban transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang diterapkan Bank Indonesia sejak awal tahun 2011. Suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing turun 67 bps, 24 bps dan 38 bps menjadi 12,16%, 12,04% dan 14,15% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2010 (Grafik 7.20). Dengan perkembangan tersebut, rata-rata selisih suku bunga kredit terhadap simpanan selama tahun 2011 turun menjadi 6,25% dibandingkan dengan 6,85% pada tahun 2010. Meskipun demikian, *spread* suku bunga tersebut dinilai masih tinggi sehingga mencerminkan kinerja efisiensi perbankan yang belum



Grafik 7.17 Struktur Suku Bunga PUAB O/N



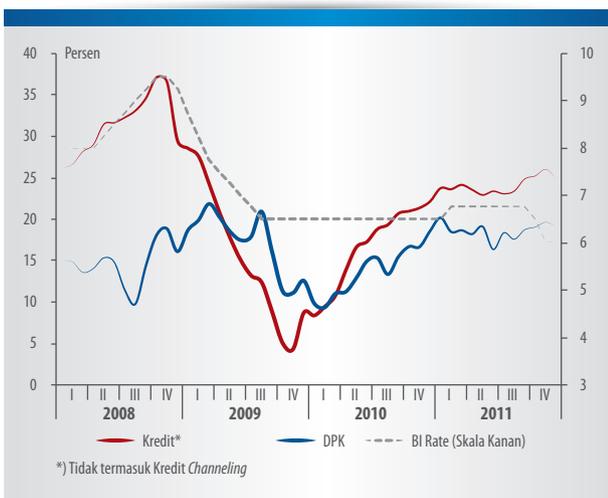
Grafik 7.19 Suku Bunga Perbankan



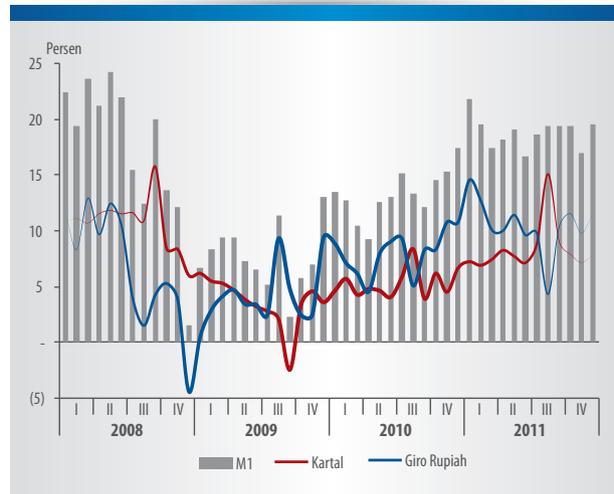
Grafik 7.20 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit per Jenis

membalik dan masih mengganggu efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Pertumbuhan simpanan dan kredit tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010. Dana pihak ketiga (DPK) selama tahun 2011 tumbuh 19,0% relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 18,5%. Pertumbuhan simpanan masyarakat tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan keuangan inklusif yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat ke perbankan di tengah suku bunga simpanan yang menurun. Sementara itu, sejalan dengan suku bunga kredit yang lebih rendah dan aktivitas perekonomian yang meningkat, pertumbuhan kredit (tidak termasuk *channeling*) pada tahun 2011 meningkat menjadi 24,9% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 22,1% (Grafik 7.21). Peningkatan kredit perbankan juga didorong oleh



Grafik 7.21 Perkembangan Suku Bunga DPK, Kredit dan BI Rate

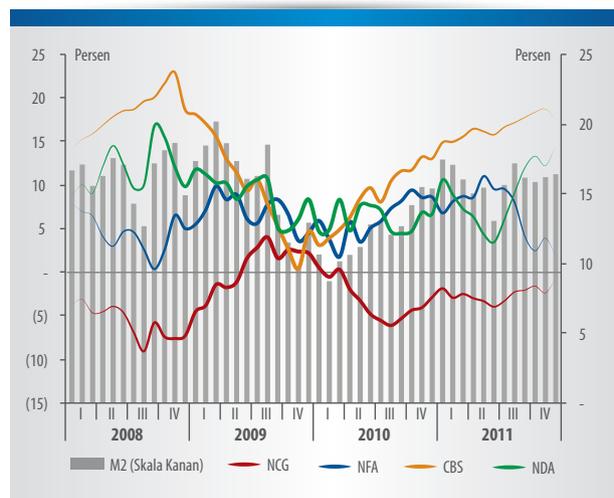


Grafik 7.22 Kontribusi Pertumbuhan M1

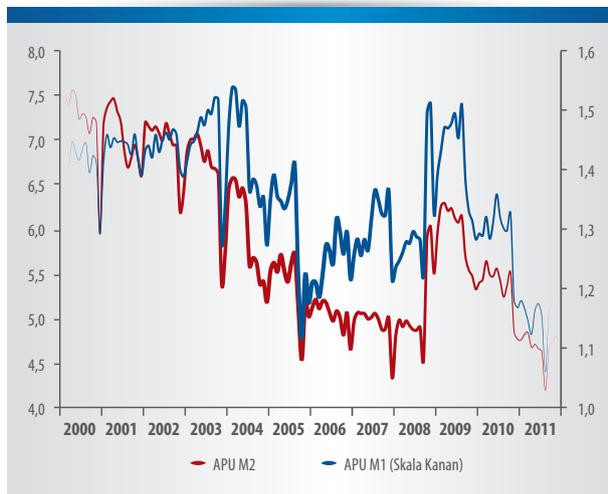
penerapan kebijakan GWM LDR. Dengan demikian, bauran kebijakan penurunan suku bunga dan kebijakan makprudensial mampu memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan.

Perkembangan likuiditas perekonomian menunjukkan peningkatan. M1 tercatat tumbuh 19,4% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 17,4% (Grafik 7.22). Di samping peningkatan permintaan uang beredar dari masyarakat, pertumbuhan M1 juga didorong oleh mobilisasi giro rupiah oleh perbankan terkait dengan kredit yang ekspansif sejalan dengan kegiatan ekonomi yang meningkat.

Sejalan dengan M1, M2 juga tumbuh sedikit meningkat yaitu 16,4% dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir tahun 2010 sebesar 15,4%. Dilihat dari

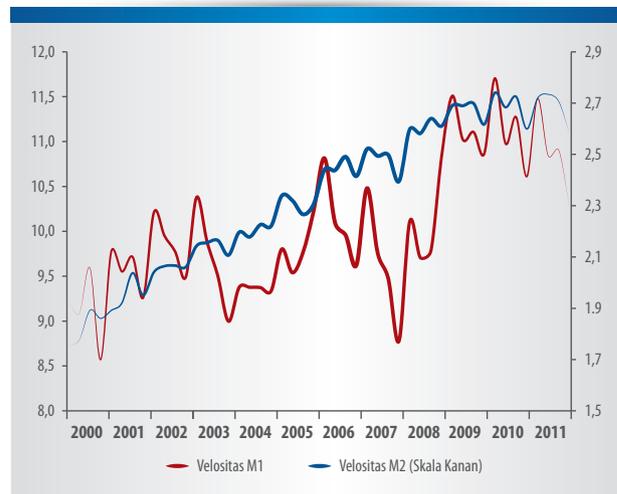


Grafik 7.23 Kontribusi Pertumbuhan M2 atas dasar Faktor-faktor yang Memengaruhi



Grafik 7.24 Angka Penganda Uang M1 dan M2

faktor-faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit (Grafik 7.23). Pada paruh pertama tahun 2011, selain didorong oleh pertumbuhan kredit yang meningkat, pertumbuhan M2 juga didorong oleh aliran masuk modal asing yang masih kuat. Namun, sejalan dengan meningkatnya derajat ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada terjadinya aliran keluar modal asing pada paruh kedua tahun 2011, kontribusi aliran modal asing terhadap pertumbuhan M2 menjadi berkurang. Peningkatan pertumbuhan M1 dan M2 tersebut menunjukkan bekerjanya transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang beredar dalam



Grafik 7.25 Velositas M1 dan M2

mempengaruhi perekonomian. Meskipun demikian, besarnya eksese likuiditas perbankan mendorong lambatnya penciptaan uang M1 dan M2 meskipun penyaluran kredit menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (Grafik 7.24).

Bekerjanya transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang beredar juga didukung oleh kecepatan perputaran uang (velositas) M1 dan M2 menunjukkan tren yang meningkat (Grafik 7.25). Perkembangan ini didukung oleh sistem pembayaran non tunai yang semakin efisien (cepat) serta dipengaruhi oleh pendapatan penduduk kelas menengah yang meningkat.

Pengalaman dari krisis yang terjadi sebelumnya baik di Indonesia maupun di negara lain menunjukkan bahwa penanganan krisis menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lama. Pengalaman juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak bisa sepenuhnya terbebas dari risiko yang dapat mengarah pada terjadinya suatu krisis.

Meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional, semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global sejak terjadinya krisis di Amerika Serikat dan Eropa dapat menimbulkan kerentanan, seperti besarnya pembalikan modal asing yang terjadi pada semester II 2011. Lebih dari itu, risiko-risiko itu sering tidak dapat diduga dan diperkirakan secara tepat sebelumnya. Karena itu, langkah yang tepat adalah senantiasa meningkatkan kewaspadaan dengan mengidentifikasi sumber-sumber kerentanan tersebut serta membangun suatu mekanisme untuk pencegahan dan penanganan krisis.

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia telah menyusun Protokol Manajemen Krisis (PMK) sebagai suatu kerangka dan mekanisme yang baku dan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis nilai tukar dan krisis perbankan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Secara garis besar, PMK Bank Indonesia tersebut bertujuan untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan guna mendukung stabilitas makroekonomi. Selain itu, PMK tersebut juga ingin memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan tepat waktu dan efektif, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

PMK Bank Indonesia merupakan bagian dari PMK Nasional yang sedang dibangun. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia lebih fokus pada PMK yang terkait dengan krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Sementara itu, Pemerintah membangun PMK yang

terkait dengan krisis pasar keuangan, krisis fiskal, dan krisis lembaga keuangan bukan bank. Pada waktunya berbagai bagian PMK tersebut perlu diintegrasikan dan dikoordinasikan secara erat ke dalam PMK Nasional dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemerintah adalah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) sebagai landasan hukum untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis secara nasional. Mengingat sampai saat ini RUU JPSK tersebut masih dalam proses, untuk koordinasi dalam rangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, pada Juli 2010 otoritas/lembaga yang berwenang di sektor keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyepakati nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut antara lain mengamanatkan agar masing-masing institusi terkait menyusun PMK yang saling menunjang dalam upaya pencegahan potensi dan penanganan terjadinya krisis sektor keuangan.

PMK Bank Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip yaitu tata kelola yang baik, pengutamakan pencegahan dan percepatan penanganan krisis, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif. Prinsip tata kelola yang baik mencakup aspek: (i) pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu bahwa kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia serta implementasinya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing satuan kerja; (ii) akuntabilitas (*accountability*) yaitu bahwa respons kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pengutamakan pencegahan dan penanganan krisis dimaksudkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam kondisi krisis dapat dipercepat namun dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik. Sementara itu, prinsip koordinasi didasari pemikiran bahwa

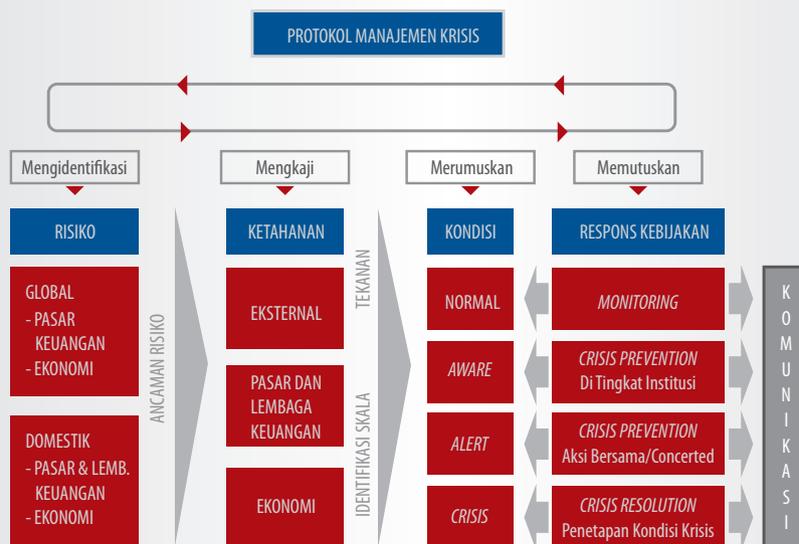
PMK Bank Indonesia merupakan bagian dari PMK Nasional. Adapun prinsip komunikasi yang efektif ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dalam upaya mendukung pemulihan perekonomian dari kondisi krisis.

Dalam konteks harmonisasi dengan PMK Nasional, PMK Bank Indonesia secara umum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu mekanisme kerja internal, *office* dan indikator *surveillance*. Mekanisme kerja internal mengatur tanggung jawab dari masing-masing satuan kerja dalam kerangka pencegahan dan penanganan krisis. *Office* berfungsi sebagai sekretariat penghubung antar protokol di tingkat nasional. Adapun indikator *surveillance* merupakan *trigger mechanism* dari proses pengambilan keputusan di internal Bank Indonesia, kebijakan yang ditempuh dan koordinasi dengan Pemerintah.

Dalam kegiatan *surveillance*, dilakukan identifikasi risiko serta asesmen dan perumusan tingkat tekanan. Identifikasi risiko dilakukan terhadap berbagai indikator kuantitatif makroekonomi, moneter dan keuangan-perbankan di lingkungan ekonomi global maupun domestik yang dapat memicu tekanan pada nilai tukar Rupiah dan sistem perbankan. Indikator *surveillance* tersebut ditujukan

untuk memotret kerentanan (*vulnerabilities*) dan faktor pemicu krisis, namun bukanlah alat untuk memprediksi waktu (*timing*) dan jenis krisis. Indikator kuantitatif tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif sehingga proses asesmen menjadi lebih komprehensif. Berdasarkan indikator *surveillance* tersebut, dilakukan asesmen terhadap tingkat kerentanan yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar Rupiah dan sistem perbankan. Selanjutnya, dilakukan perumusan tingkat tekanan yang dibedakan menjadi kondisi normal dan tidak normal (Waspada, Siaga, dan Ditengarai Krisis). Berdasarkan hasil dari tahapan *surveillance* tersebut diputuskan respons kebijakan yang sesuai.

Dalam hal indikator *surveillance* mengindikasikan kondisi tidak normal yaitu Waspada, Siaga dan Ditengarai Krisis, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan respons kebijakan pencegahan krisis secara internal. Selain itu, Bank Indonesia akan menginformasikan kondisi tidak normal tersebut kepada Pemerintah, institusi terkait dan/atau Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan menyusun rekomendasi kebijakan yang memerlukan koordinasi antar institusi ataupun secara nasional.



Gambar 1. Protokol Manajemen Krisis

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan PMK sangat ditentukan oleh pelaksanaan koordinasi yang efektif antar otoritas. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta tindakan bersama yang efektif, transparan dan akuntabel dengan didukung oleh data dan

informasi yang memadai dan akurat. Dukungan data dan informasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran data dan informasi mengenai indikator-indikator makro dan mikro ekonomi serta data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing otoritas.





Bab VIII

KEBIJAKAN DAN KINERJA SISTEM KEUANGAN

05
02.05



KEBIJAKAN DAN KINERJA SISTEM KEUANGAN



Selain kebijakan moneter dan makroprudensial, Bank Indonesia juga menempuh sejumlah kebijakan untuk mengoptimalkan kontribusi perbankan terhadap perekonomian, terutama melalui peningkatan fungsi intermediasi, penguatan ketahanan dan fungsi pengawasan perbankan. Di samping itu, untuk meningkatkan akses masyarakat secara lebih luas terhadap sistem keuangan, Bank Indonesia mendorong keuangan inklusif melalui beberapa kebijakan, termasuk didalamnya kebijakan terkait UMKM. Sementara kebijakan pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank tetap ditekankan untuk mencapai industri keuangan yang kompetitif, transparan, stabil, kredibel serta berstandar internasional. Serangkaian kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan otoritas keuangan lainnya tersebut mampu menjaga kestabilan sistem keuangan selama tahun laporan.

Stabilitas sistem keuangan yang terjaga serta kondisi fundamental makro dan emiten yang kokoh telah menopang kinerja positif pasar keuangan dan pada gilirannya menjaga peran optimal sistem keuangan bagi perekonomian. Dari sisi institusi keuangan, terjaganya kinerja sistem keuangan tercermin dari indikator perbankan, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang membaik. Membaiknya kinerja perbankan yang masih mendominasi sistem keuangan diiringi oleh risiko kredit yang relatif rendah, permodalan yang kuat dan profitabilitas yang tinggi. Sementara dari sisi pasar keuangan, meski sempat terjadi koreksi harga dan peningkatan volatilitas baik di pasar saham maupun obligasi pada pertengahan semester II 2011, daya tahannya dalam menghadapi risiko ketidakpastian global antara lain ditunjukkan oleh kecepatan pemulihan kinerjanya yang lebih baik dibandingkan dengan negara kawasan. Dengan perkembangan tersebut, bursa saham domestik kembali tercatat sebagai salah satu bursa dengan kinerja terbaik di kawasan. Pada akhirnya, ketangguhan sistem keuangan dalam meredam gejala eksternal berbuah pada makin terjaganya peran sektor keuangan untuk mendukung kegiatan sektor riil melalui intermediasi perbankan yang berjalan baik, aktivitas pembiayaan perusahaan di pasar modal yang tetap terjaga, serta turut menopang pembiayaan fiskal melalui penerbitan SBN.



8.1 KEBIJAKAN DAN KINERJA PERBANKAN

KEBIJAKAN PENGUATAN KETAHANAN PERBANKAN

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, selama tahun 2011 turut didukung oleh penerapan berbagai kebijakan dan penyempurnaan regulasi perbankan oleh Bank Indonesia.¹ Salah satu fokus kebijakan perbankan dalam rangka mendukung tercapainya stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan adalah peningkatan ketahanan perbankan agar bank tetap kuat dan sehat menghadapi persaingan melalui pengelolaan yang transparan dan mengacu pada *good governance*. Untuk itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).² Pokok-pokok dalam kebijakan tersebut antara lain memuat rincian mengenai pihak-pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan, persyaratan dan dokumen administratif, penyederhanaan tatacara pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dari 10 tahap menjadi 4 tahap serta pengenaan jangka waktu sanksi.

Sebagai bagian dalam upaya peningkatan daya tahan perbankan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

1 Lihat Kajian Stabilitas Keuangan No. 16 – Maret 2011 dan No. 17 – September 2011.

2 PBI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2010 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP pada tanggal 28 Maret 2011.

Kebijakan itu terkait dengan pedoman perhitungan ATMR menggunakan pendekatan standar.³ Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya tahan (*resilience*) perbankan nasional dalam menghadapi kondisi krisis dan persaingan global. Dengan penyempurnaan perhitungan tersebut, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) semakin mencerminkan risiko yang dihadapi bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Selain kebijakan dalam rangka penguatan perbankan, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan bank melalui peningkatan fungsi deteksi sistem peringatan dini (*early warning system*).⁴ Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank melalui penerapan pengawasan secara konsolidasi dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko seiring dengan terjadinya perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung identifikasi permasalahan bank secara lebih dini dan penetapan tindak lanjut pengawasan yang lebih efektif. Melalui peraturan ini, bank (termasuk kantor cabang bank asing) wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap tingkat kesehatannya dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang baru terdiri dari profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance*, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*).

Peningkatan efektivitas bank juga ditempuh melalui penyempurnaan pengaturan terkait penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank.⁵ Peraturan ini ditujukan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan bank, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan batasan waktu untuk setiap status pengawasan bank dan menuntut upaya yang sungguh-sungguh dari Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menyelesaikan permasalahan

3 Hal ini tertuang dalam SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011

4 Pengaturan tersebut tertuang dalam PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012.

5 Hal ini terdapat dalam PBI No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank yang mulai berlaku pada tanggal 17 April 2011.

bank karena terdapat konsekuensi berupa peningkatan Status Pengawasan Bank apabila batas waktu tidak dipenuhi atau kondisi bank semakin memburuk.

Sementara itu, untuk meningkatkan fungsi pengawasan melalui perolehan informasi dan data perbankan yang lebih memadai, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).⁶ Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah dalam rangka: (i) percepatan waktu penyampaian beberapa laporan di LBBU dalam rangka optimalisasi pemanfaatan laporan lain yang telah dipercepat penyampaiannya; (ii) penambahan laporan baru yaitu laporan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar dan laporan perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); serta (iii) penyempurnaan beberapa pengaturan di ketentuan LBBU dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan lain mengenai pelaporan.

Dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada industri perbankan nasional, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.⁷ Penyempurnaan ketentuan terkait meliputi fungsi kepatuhan bank umum yang mencakup pengaturan organisasi, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak pelaksana fungsi kepatuhan pada bank umum yang merupakan bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen risiko. Penyempurnaan ketentuan ini juga dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada industri perbankan nasional. Peraturan Bank Indonesia tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011.

KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM KEUANGAN

Kebijakan perluasan akses masyarakat terhadap sistem keuangan (*Financial Inclusion*) ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang paling mendasar. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendukung stabilitas keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi ekonomi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin berdampak luas dan berkelanjutan,

6 Hal dimaksud terdapat dalam PBI No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum

7 Pengaturan tersebut tertuang dalam PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat. Sasaran strategis program tersebut antara lain adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan perbankan, penyediaan infrastruktur dan jaringan untuk memudahkan akses masyarakat kepada layanan perbankan serta ketersediaan landasan hukum yang menjamin terlaksananya program keuangan inklusif.

Kesulitan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan bersumber baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran, permasalahannya adalah daya jangkauan perbankan yang terbatas, baik dari sisi keberadaan kantor cabang maupun ketersediaan pegawai bank, ketersediaan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kesenjangan informasi. Dalam hal ini, daya jangkauan perbankan sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan potensi bisnis dari daerah terkait. Kesenjangan informasi perbankan dan UMKM juga merupakan permasalahan dari sisi penawaran. Perbankan membutuhkan informasi mengenai masyarakat dan potensinya sebagai nasabah bank. Sementara dari sisi permintaan lebih terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat dan kebutuhan informasi mengenai produk dan jasa keuangan. Selain itu, perikatan bank dengan nasabah umumnya diatur secara formal dengan persyaratan legal yang ketat. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat memenuhi persyaratan legal formal sehingga akhirnya masyarakat miskin tidak mampu memperoleh akses kredit yang memadai.

Kebijakan Keuangan Inklusif Secara Umum

Terdapat 5 strategi Bank Indonesia dalam upaya kebijakan keuangan inklusif. Strategi pertama adalah melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan inklusif. Hal ini ditempuh melalui program edukasi, yang meliputi beberapa aspek, antara lain: i) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan penggunaan produk keuangan; ii) aspek perlindungan nasabah mengenai hak dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan; dan iii) aspek pengelolaan keuangan. Strategi kedua adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan. Kebijakan tersebut meliputi: i) pemberian pelatihan dan bantuan teknis; ii) penerapan sistem penjaminan yang inovatif; iii) upaya untuk mendorong tersedianya kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil; dan iv) identifikasi nasabah potensial.

Strategi ketiga adalah melalui penerbitan kebijakan dan ketentuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan maupun untuk memberi insentif bagi perbankan dalam membuka akses ke masyarakat. Dalam hal ini, program yang ditempuh meliputi: i) pemberian lisensi untuk lembaga keuangan nonformal atau mikro serta *banking agent*; ii) penetapan peraturan pembukaan cabang baru bagi lembaga keuangan; iii) penetapan peraturan mengenai *linkage program*; iv) pengkajian peraturan mengenai ketentuan modal, manajemen risiko serta perlindungan nasabah lembaga keuangan; v) pengkajian peraturan mengenai mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan; dan vi) pembuatan ketentuan guna meningkatkan *governance* dan kualitas manajemen dari lembaga keuangan.

Strategi keempat adalah dengan peningkatan *awareness* atau pemahaman lembaga keuangan terhadap adanya masyarakat yang potensial melalui fasilitasi kegiatan intermediasi. Hal itu dilakukan dengan: i) memfasilitasi forum intermediasi antara lembaga keuangan dengan masyarakat miskin produktif dan ii) memberdayakan lembaga keuangan mikro dengan meningkatkan kerjasama antara perbankan dan lembaga keuangan mikro. Hal ini turut diperkuat dengan strategi kelima melalui peningkatan jangkauan lembaga keuangan terhadap masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain: i) *banking agent*, yakni pola kemitraan antara lembaga keuangan dengan lembaga nonkeuangan; ii) *phone banking*, yakni memanfaatkan sarana teknologi komunikasi dalam menggunakan jasa keuangan; dan iii) *mobile banking*, yakni menjangkau masyarakat di daerah pelosok dengan memanfaatkan bank keliling.

Upaya lain untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan jasa lembaga keuangan. Bank Indonesia menempuh program Gerakan Indonesia Menabung untuk menumbuhkembangkan budaya menabung sejak dini, menyediakan produk tabungan yang berbiaya administrasi rendah dan memberdayakan masyarakat untuk merencanakan keuangan. Selain itu, Bank Indonesia dan Pemerintah telah menyusun cetak biru Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai upaya bersama untuk menjalankan kebijakan keuangan inklusif. Cetak biru tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat.

Kebijakan Keuangan Inklusif di UMKM

Bank Indonesia menempuh berbagai upaya yang diharapkan dapat semakin mendorong peran UMKM dalam perekonomian nasional dan meningkatkan peran masyarakat secara lebih luas. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan rangkaian kebijakan yang antara lain dilakukan untuk peningkatan akses UMKM kepada perbankan. Beberapa kebijakan Bank Indonesia tersebut antara lain pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) dan pembentukan Apex Bank.

Untuk menghadapi permasalahan terkait agunan, Bank Indonesia mendorong pembentukan PPKD. Pembentukan PPKD merupakan peran aktif antara Pemerintah sebagai regulator dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pemerintah berperan sebagai regulator dalam pendirian dan pengawasan PPKD, selain memfasilitasi percepatan pendirian PPKD dan mempersiapkan UMKM agar lebih mudah berhubungan dengan PPKD. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berupaya mendorong perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasi berupa penyaluran kredit dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan.

PPKD tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan seputar agunan dalam perolehan akses perbankan oleh UMKM. Dari sisi UMKM, permasalahan yang timbul antara lain terkait dengan kepemilikan agunan yang terbatas, nilai agunan yang tidak mencukupi atau aspek legalitas agunan yang tidak memenuhi persyaratan. Dari sisi perbankan, agunan diperlukan dalam rangka memitigasi risiko penyaluran kredit. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut dibentuk PPKD di setiap propinsi. Dengan keberadaan PPKD, diharapkan penyaluran kredit produktif oleh perbankan dapat meningkat dan hambatan aksesibilitas UMKM kepada perbankan dapat diminimalisir.

Sementara itu, untuk memperluas jangkauan Bank Umum untuk memberikan kredit UMKM, Bank Indonesia mendorong pembentukan Apex Bank sebagai lembaga pengayom BPR. Di satu sisi, beberapa keunggulan BPR adalah lokasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara lebih luas, pemahaman budaya masyarakat setempat dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi dengan masyarakat yang *nonbankable*. Di sisi lain permodalan dan SDM BPR masih lemah. Untuk itu

keberadaan Apex-BPR diharapkan dapat memperkuat permodalan BPR serta turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apex BPR diharapkan mampu menjembatani keterbatasan BPR dalam mengoptimalkan peran dan kontribusinya melalui sinergi pemberian bantuan teknis dan finansial kepada BPR anggotanya. Terbentuknya mekanisme hubungan bisnis antar lembaga ini merupakan upaya peningkatan aksesibilitas UMKM kepada perbankan dalam rangka menjembatani kesenjangan antara aspek kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan dengan UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*.

KINERJA PERBANKAN

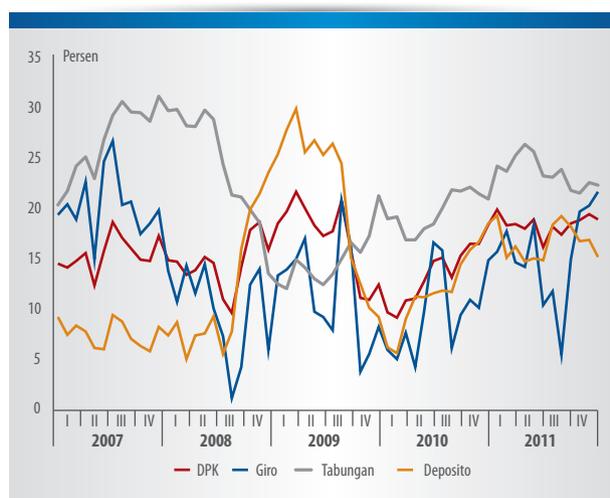
Kinerja Bank Umum

Di tengah meningkatnya gejala perekonomian dunia terutama sebagai dampak krisis utang pemerintah Eropa dan terhambatnya pemulihan ekonomi AS, perbankan masih mampu mempertahankan kinerja positif yang disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan serta semakin meningkatnya *good governance* di perbankan dengan dukungan perekonomian Indonesia yang kondusif. Meskipun jumlah bank umum mengalami penurunan dari 122 bank pada akhir tahun 2010 menjadi 120 bank pada akhir tahun 2011 karena adanya *merger* dan *self-liquidation*, total aset bank umum tumbuh 21,4% menjadi Rp3.652,0 triliun yang berarti melampaui pertumbuhan aset selama tahun 2010. Peningkatan aset perbankan tersebut didukung oleh semakin meningkatnya jumlah kantor yang melayani masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dari

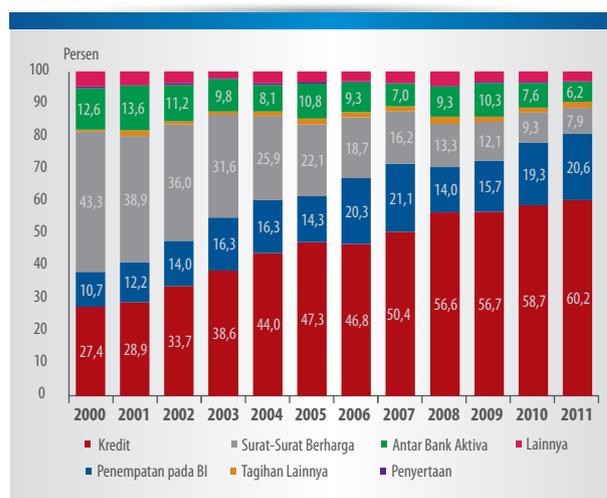
13.837 kantor pada akhir tahun 2010 menjadi 14.797 kantor pada akhir tahun laporan.

Secara umum, aset bank umum masih dibiayai oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam hal ini terdapat sekitar 76% dari aset bank umum yang dibiayai oleh DPK perbankan yang tumbuh 19,0% selama tahun 2011. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010. Peningkatan DPK terjadi pada semua komponennya, terbesar pada tabungan diikuti giro dan deposito dengan tingkat pertumbuhan berada pada kisaran 15% sampai dengan 22.5% (Grafik 8.1). Dengan perkembangan tersebut, deposito yang merupakan sumber dana paling mahal dibandingkan kedua komponen DPK lainnya, masih mendominasi dana masyarakat di perbankan dengan pangsa sekitar 45,4% dari total DPK. Penghimpunan DPK merupakan sumber pembiayaan utama perbankan dalam menyalurkan kredit.

Penyaluran kredit masih menjadi penempatan utama atas dana perbankan dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada surat-surat berharga maupun penempatan antar bank. Hal itu terlihat dari pangsa kredit yang mencapai 60,2% dari total aset bank umum, meningkat dibandingkan posisi akhir tahun 2010 dengan pangsa 58,7% (Grafik 8.2). Selama tahun 2011, kredit bank umum tumbuh 24,5%, melampaui pertumbuhan tahun 2010 yang sebesar 22,8%. Sementara itu, penempatan dana perbankan pada surat-surat berharga pangsa mengalami penurunan. Dengan perkembangan tersebut, sumbangan kredit terhadap pembiayaan perekonomian juga terus meningkat. Pada akhir tahun 2011, pangsa kredit terhadap PDB mencapai sekitar 30% atau meningkat



Grafik 8.1 Pertumbuhan DPK



Grafik 8.2 Komposisi Aset

cukup signifikan dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2010 sebesar 27%.

Selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif, pesatnya pertumbuhan kredit bank umum selama tahun 2011 juga tidak terlepas dari peranan kebijakan GWM LDR yang dikeluarkan oleh BI pada September 2010 dan mulai efektif berlaku sejak Maret 2011. Dengan kebijakan GWM LDR tersebut, LDR perbankan ditetapkan dalam suatu kisaran yang dipandang mampu mendorong fungsi intermediasi perbankan namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kisaran target LDR ditetapkan dengan batas bawah 78% dan batas atas 100%. Pada akhir tahun 2010, LDR bank umum hanya sebesar 75,5% yang kemudian mulai bergerak ke kisaran yang telah ditetapkan dalam ketentuan GWM LDR sehingga menjadi 79% pada akhir tahun 2011.

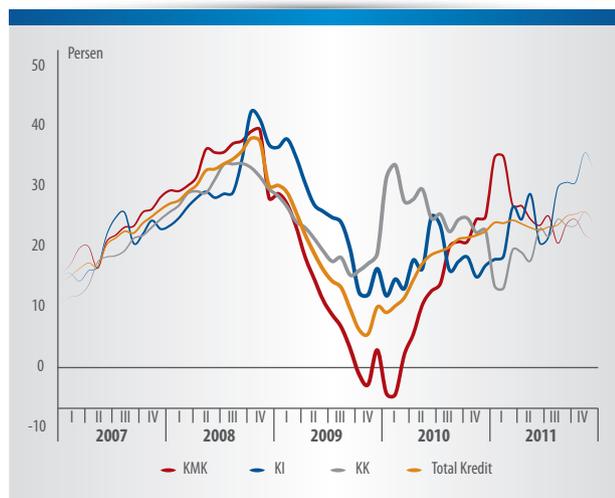
Peningkatan kredit tidak hanya terjadi dari sisi kuantitas, namun juga kualitasnya. Selama tahun 2011, pertumbuhan kredit perbankan didominasi oleh kredit produktif, khususnya kredit investasi yang tumbuh 33.2%. Sementara kredit konsumsi tumbuh sebesar 24.1% (Grafik 8.3). Dengan perkembangan tersebut, kredit investasi bersama-sama dengan kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 21.4%, mendominasi kredit bank umum dengan pangsa 70%. Pertumbuhan kredit ke sektor produktif tersebut tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang berdampak pada membaiknya kinerja dunia usaha. Jika dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit terbesar pada tahun 2011 berasal dari pertambangan sebesar 43% yang diikuti oleh sektor produktif lain seperti sektor listrik, air & gas, sektor transportasi &

komunikasi dan sektor pertanian yang masing-masing tumbuh 34,4%, 26,7% dan 26,0%.

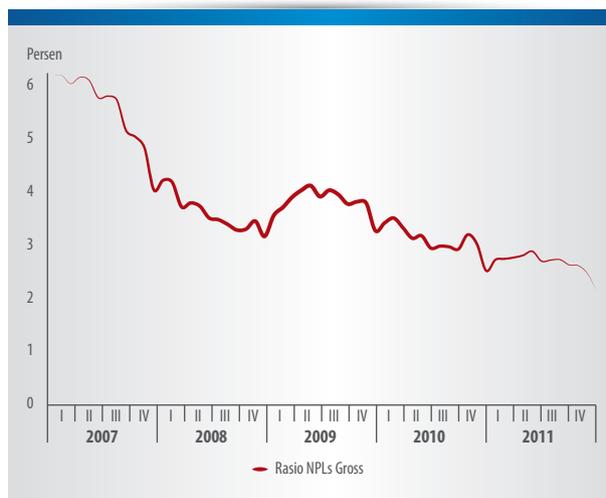
Di tengah pesatnya pertumbuhan kredit, sektor perbankan masih mampu mengelola kualitas kreditnya dengan cukup baik, tercermin dari rasio NPL (*gross*) yang masih di bawah 3% yaitu sebesar 2,2%, rasio NPL *gross* terendah sejak tahun 2000 (Grafik 8.4). Meskipun terdapat peningkatan jumlah nominal kredit bermasalah selama tahun 2011, perbankan telah membentuk cadangan yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian. Namun, langkah-langkah antisipatif melalui kegiatan pemantauan tetap perlu dilakukan sedini mungkin untuk mencegah meluasnya permasalahan yang dapat mengganggu kinerja perbankan ke depan.

Dengan dukungan akselerasi pertumbuhan kredit yang merupakan sumber utama pendapatan, perbankan berhasil mempertahankan profitabilitasnya pada level yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, perbankan berhasil memperoleh laba sebesar Rp75,0 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, dengan *Return on Asset* (ROA) sebesar 3,0%. Sumber utama profitabilitas perbankan berasal dari pendapatan bunga, seperti tercermin dari *Net Interest Margin* (NIM) perbankan yang mencapai 5,9%, lebih tinggi dibandingkan NIM pada akhir tahun tahun 2010 sebesar 5,7% (Grafik 8.5). Sekitar 82,4% dari pendapatan bunga perbankan berasal dari pendapatan bunga kredit.

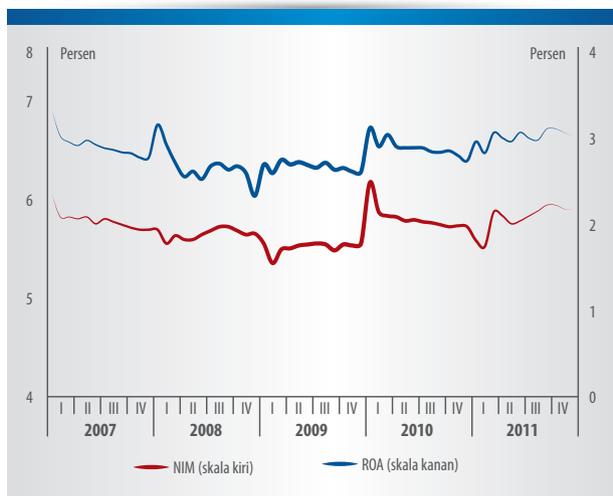
Dengan perkembangan tersebut, perbankan masih dapat mempertahankan permodalan pada level yang memadai. Besarnya profitabilitas bank mampu



Grafik 8.3 Pertumbuhan Kredit



Grafik 8.4 Perkembangan Rasio NPL (Gross)



Grafik 8.5 ROA dan NIM

menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan pada level yang cukup tinggi yaitu 16,1%, meskipun lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2010 sebesar 17,2% sejalan dengan gencarnya pemberian kredit. Walaupun sedikit menurun, level CAR tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan minimum CAR sebesar 8%. Di sisi lain, efisiensi masih menjadi salah satu permasalahan perbankan yang antara lain tercermin dari rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang masih berada pada level 85,4%, masih relatif tinggi dibandingkan dengan rasio BOPO di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang berada dibawah 70%. Meskipun demikian, rasio BOPO tersebut sudah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2010 sebesar 86,1% (Tabel 8.1).

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Meski masih dalam jumlah yang terbatas, peran BPR dalam mendukung perekonomian semakin meningkat dengan disertai oleh kinerja yang semakin membaik selama tahun laporan. Peningkatan peran BPR dalam perekonomian ditunjukkan oleh perluasan jangkauan pelayanan BPR, peningkatan skala usaha serta berjalannya fungsi intermediasi. Sementara itu, kinerja BPR juga meningkat sejalan dengan aspek rentabilitas industri BPR yang masih cukup menjanjikan serta efisiensi yang terus meningkat. Hal ini tampak dalam beberapa indikator perbankan seperti ROA, *Return On Equity* (ROE) dan BOPO. Berbagai perkembangan tersebut tidak terlepas dari rangkaian kebijakan Bank Indonesia pada BPR.

Dari sisi kelembagaan, kinerja BPR yang semakin baik ditopang oleh jangkauan pelayanan BPR yang semakin luas. Dari sisi kelembagaan, jumlah BPR saat ini mencapai 1.669 BPR terdiri dari 1.388 BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas, 247 BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah dan 34 BPR berbadan hukum koperasi. Hal ini didukung oleh jangkauan pelayanan BPR semakin luas dengan bertambah jaringan kantor cabang BPR dari 1.088 kantor pada Desember 2010 menjadi 1.223 pada Desember 2011 atau tumbuh sebesar 12,41%. Meskipun mengalami peningkatan jangkauan pelayanan, jumlah BPR mengalami penurunan sebesar 37 BPR dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pencabutan izin usaha dan merger atau konsolidasi.

Perluasan jaringan BPR turut mengakselerasi pertumbuhan skala usaha BPR. Dalam hal ini

Tabel 8.1 Indikator Utama Bank Umum

Indikator Utama (Posisi Desember)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Aset (Triliun rupiah)	1.099,7	1.112,2	1.213,5	1.272,1	1.469,8	1.693,9	1.986,5	2.310,6	2.534,1	3.008,9	3.652,0
DPK (Triliun rupiah)	797,4	835,8	888,6	963,1	1.127,9	1.287,1	1.510,8	1.753,3	1.973,0	2.338,8	2.784,1
Kredit (Triliun rupiah)	316,1	371,1	440,5	559,5	695,6	792,3	1.002,0	1.307,7	1.437,9	1.765,8	2.199,1
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (%) ¹	19,9	22,4	19,4	19,4	19,3	21,3	19,3	16,8	17,4	17,2	16,1
<i>Gross Non Performing Loans</i> (%) ²	12,2	7,5	6,8	4,5	7,6	6,1	4,1	3,2	3,3	2,6	2,2
<i>Return on Assets</i> (%) ¹	1,5	2,0	2,6	3,5	2,6	2,6	2,8	2,3	2,6	2,9	3,0
<i>Net Interest Margin</i> (%)	3,6	4,1	4,6	6,4	5,6	5,8	5,7	5,7	5,6	5,7	5,9
BOPO (%) ¹	98,4	94,8	88,1	76,6	89,5	87,0	84,1	88,6	86,6	86,1	85,4
LDR (%)	39,6	44,4	49,6	58,1	61,7	61,6	66,3	74,6	72,9	75,5	79,0
Jumlah Bank	145	141	138	134	131	130	130	124	121	122	120

1) Tidak termasuk bank syariah (mulai April 2010)

2) Tidak termasuk kredit penerusan

pertumbuhan aset mencapai 21,99% dari Rp45,7 triliun meningkat menjadi Rp55,8 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diikuti dengan peningkatan kinerja BPR dari sisi pendanaan dan pembiayaan. Dari segi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BPR tumbuh sebesar 22% dengan nominal saat ini mencapai Rp38,2 triliun. Sementara dari sisi pembiayaan, BPR mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 21,44% dengan nominal saat ini mencapai Rp41 triliun.

Peningkatan kinerja BPR diiringi oleh fungsi intermediasi BPR yang berjalan cukup baik. Tingkat pertumbuhan kredit dan DPK yang cukup baik, mampu mempertahankan LDR BPR pada level 78,54%,

meskipun sedikit menurun di bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 79,02%. Indikator prestasi kinerja BPR juga menunjukkan terjadinya perbaikan pada kualitas kredit yang diindikasikan oleh penurunan NPL menjadi 3,67% (neto), membaik dibandingkan NPL tahun sebelumnya yang mencapai 4,25%. (Tabel 8.2)

Aspek rentabilitas industri BPR masih cukup menjanjikan dan efisiensi yang terus meningkat. ROA BPR berada pada level 3,32%. Sementara dari sisi nilai investasi, ROE berada pada level 29,46%. Pada aspek yang lain, yaitu aspek efisiensi, selama tahun 2011 industri BPR mampu meningkatkan tingkat efisiensi cukup signifikan. Indikator efisiensi yang ditunjukkan

Tabel 8.2 Indikator Utama BPR

Indikator (Posisi Desember)	2010	2011	Pertumbuhan	
			Selisih	%
Jumlah BPR	1.706	1.669	-37	-2,17
- PT	1.384	1.388	4	0,29
- PD	288	247	-41	-14,24
- Koperasi	34	34	0	0,00
Jumlah Kantor	3.910	4.172	262	6,70
- Kantor Pusat	1.706	1.669	-37	2,17
- Kantor Cabang	1.088	1.223	135	12,41
- Kantor Kas	1.116	128	164	14,70
Aset (miliar Rp)	45.742	55.799	10.056	21,99
Dana Pihak Ketiga (miliar Rp)	31.311	38.209	6.897	22,03
- Tabungan (miliar Rp)	9.856	12.035	2.178	22,10
- Deposito (miliar Rp)	21.455	26.174	4.719	22,00
Antarbank Pasiva (miliar Rp)	4.738	642	1.681	35,49
Antarbank Aktiva (miliar Rp)	10.032	12.434	2.401	23,94
Kredit (miliar Rp)	33.844	41.099	7.255	21,44
L/R Th Berjalan (miliar Rp)	1.446	1.852	405	28,04
Rek Dana Pihak Ketiga	8.217.082	8.976.558	759.476	9,24
Rek Tabungan	7.804.000	8.551.718	747.718	9,58
Rek Deposito	413.802	42.484	11.758	2,85
Rek Kredit	3.242.360	3.361.507	119.147	3,67
CAR (%)	30,01	28,68	-1,33	-4,43
LDR (%)	79,02	78,54	-0,48	-0,61
KAP (%)	4,13	3,58	-0,55	-13,32
ROA (%)	3,16	3,32	0,16	5,06
ROE (%)	26,71	29,46	2,75	10,30
BOPO (%)	80,97	79,47	-1,5	-1,85
NPL Gross (%)	6,12	5,22	-0,9	-14,71
NPL Net (%)	4,25	3,67	-0,58	-13,65

Tabel 8.3 Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2009	2010	2011	Pertumbuhan
BUS	6	11	11	0
UUS	25	23	24	1
Jumlah Kantor BUS & UUS	1.001	1.477	1.737	260
Jumlah Layanan Syariah	1.929	1.277	1.277	0

oleh rasio BOPO semakin membaik pada level 79,47%, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,97%.

Kinerja Bank Syariah

Meski terbatas, peran bank syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat dan disertai oleh kinerjanya yang juga semakin membaik. Peningkatan peran bank syariah dalam perekonomian ditunjukkan oleh perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan skala usaha dan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi serta berjalannya fungsi intermediasi. Sementara itu, kinerja bank syariah juga meningkat sejalan dengan aspek rentabilitas yang masih cukup menjanjikan serta risiko kredit yang mengalami penurunan. Berbagai perkembangan tersebut tidak terlepas dari rangkaian kebijakan Bank Indonesia pada perbankan syariah, termasuk di dalamnya *iB campaign*.

Bank syariah mencatat pertumbuhan aset yang signifikan, antara lain ditopang oleh pertumbuhan jaringan kantor. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.477 kantor menjadi 1.737 kantor dan layanan *office channeling* tetap sebesar 1.277 kantor (Tabel 8.3). Perluasan jaringan kantor tersebut telah mampu meningkatkan pengguna bank syariah yang tercermin pada peningkatan jumlah rekening dari 6,92 juta rekening menjadi 9,58 juta rekening. Pertumbuhan jaringan kantor tersebut telah meningkatkan volume usaha perbankan syariah, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Total aset per Desember 2011 telah mencapai Rp145,47 triliun atau meningkat tajam sebesar 49,17% yang merupakan pertumbuhan

tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 4,19%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 51,79% dan penyaluran dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan meningkat sebesar 50,56% (Tabel 8.4).

Kinerja Dana Pihak Ketiga meningkat tinggi dari Rp 76,04 triliun pada 2010 menjadi Rp115,41 triliun pada 2011. Meskipun mengalami sedikit penurunan di awal tahun sebagai akibat dari *January effect*, namun penghimpunan dana dapat dipertahankan terus meningkat hingga akhir tahun 2011. Struktur penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp 70,81 triliun (61,4%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp32,60 triliun (28,3%) dan Giro sebesar Rp12,0 triliun (10,4%) (Tabel 8.5).

Deposito tercatat sebagai produk syariah yang paling diminati masyarakat, antara lain disebabkan oleh imbal hasil yang tinggi. Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, deposito dan tabungan merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi yaitu sekitar 61,66% dari posisi tahun lalu Rp44,07 triliun menjadi Rp70,81 triliun. Selain itu, produk tabungan juga meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 42,32% sehingga tabungan iB perbankan syariah menjadi Rp32,60 triliun dari posisi tahun sebelumnya yang tercatat Rp22,91 triliun. Di sisi lain, posisi giro relatif berfluktuasi. Meski sempat mengalami penurunan, namun dalam setahun

Tabel 8.4 Perkembangan Aset, DPK dan Pembiayaan BUS dan UUS

	2010	2011	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Aset	97,52	145,47	47,95	49,17
DPK	76,04	115,41	39,38	51,79
Pembiayaan	66,18	102,66	34,47	50,56

Triliun rupiah

Tabel 8.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS

Triliun rupiah

Dana Pihak Ketiga	2010		2011		Pertumbuhan	
	Nominal	Pangsa (%)	Nominal	Pangsa (%)	Nominal	(%)
Total Dana Pihak Ketiga	76,0	100	115,4	100	39,4	51,8
Tabungan	22,9	30,1	32,6	28,2	9,7	42,3
- Wadiah	3,3		5,4		2,1	61,6
- Mudharabah	19,6		27,2		7,6	39,0
Deposito	44,1	58,0	70,8	61,4	22,8	60,7
Giro (wadiah)	9,1	11,9	12,0	10,4	2,9	32,6

giro meningkat sebesar 32,59% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,91% dan giro sekitar 1,47% (*equivalent rate*). Produk deposito yang paling diminati masyarakat adalah deposito satu bulan.

Perbankan syariah menunjukkan komitmen dalam menggerakkan sektor riil melalui berbagai bentuk pembiayaan. Dalam hal ini fungsi intermediasi perbankan syariah yang tercermin dalam *Finance to Deposit Ratio* (FDR) tetap relatif tinggi yaitu sebesar 88,94%. Dengan demikian pertumbuhan penghimpunan dana telah dapat diimbangi oleh pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), piutang (*Murabahah*, *Istisna*, dan *Qardh*), dan bentuk pembiayaan lainnya (*ijarah*). Pertumbuhan pembiayaan tersebut merupakan alokasi sekitar 72,81% (Rp102,65 triliun) dari keseluruhan penyaluran dana perbankan syariah. Sedangkan aktiva berupa penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang dimiliki, masing-masing mempunyai pangsa sebesar 10,74% (Rp19,24 triliun) dan 4,18% (Rp 5,90 triliun) (Tabel 8.6). Dari sisi perkembangannya, portofolio perbankan syariah pada Bank Indonesia meningkat paling signifikan yaitu sebesar 65,53%. Sementara penyaluran dana masyarakat masih didominasi oleh piutang *murabahah* yang tercatat sebesar Rp56,36 triliun atau 54,91% diikuti oleh pembiayaan *Musyarakah* yang sebesar Rp18,96 triliun (18,47%) dan piutang *Qardh* sebesar Rp12,94 triliun (12,60%). Penyaluran dana berupa piutang *Qardh* mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 173,57% yang didominasi oleh peningkatan *Qardh* (gadai) emas.

Kinerja bank syariah semakin baik, antara lain ditunjukkan oleh tingkat rentabilitas yang cukup baik

dan ditopang oleh peningkatan kualitas penyaluran. Tingkat rentabilitas yang baik tercermin dalam rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 1,79% dan 15,73%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 78,41% yang pada tahun sebelumnya masih sebesar 80,54%. Penyaluran dana bank syariah diikuti dengan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin baik, *nonperforming finance* (NPF) *gross* menurun dari 3,02% menjadi 2,52%. Hal tersebut telah mendorong perolehan laba yang cukup baik dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan. Permodalan perbankan syariah dapat dijaga dalam kisaran yang memadai untuk dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal BUS pada posisi Desember 2011 tercatat sebesar 16,63%.

Pencapaian bank syariah tersebut tidak terlepas dari upaya sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri. Hal ini terkait dukungan Bank Indonesia, yang antara lain dalam bentuk pemberian dan percepatan proses penyelesaian perijinan namun tetap menjaga kualitas analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia dalam mempercepat proses perijinan pendirian bank, uji kemampuan dan kepatutan, merger atau akuisisi, pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk perbankan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh industri perbankan syariah. Hal ini juga ditopang oleh berbagai upaya bersama antara regulator dengan industri perbankan syariah melalui berbagai kegiatan ekspor, penayangan iklan dan liputan kegiatan oleh media masa termasuk di dalamnya kampanye iB baik untuk pendanaan maupun pinjaman.

Tabel 8.6 Penyaluran Dana BUS dan UUS

Triliun rupiah

Penyaluran Dana	2010		2011		Pertumbuhan	
	Nominal	Pangsa (%)	Nominal	Pangsa (%)	Nominal	(%)
Total Penyaluran dana	94,88	100	140,98	100	46,1	48,59
Pembiayaan	68,18	71,86	102,65	72,81	34,47	50,56
Piutang <i>Murabahah</i>	37,51	39,53	56,36	39,98	18,85	50,25
Piutang <i>Qardh</i>	4,73	4,99	12,94	9,18	8,21	173,57
<i>Mudharabah</i>	8,63	9,1	10,23	7,26	1,6	18,54
<i>Musarakah</i>	14,62	15,41	18,96	18,96	4,34	29,69
Lainnya	2,69	2,84	4,16	2,95	1,47	54,65
Antar Bank	4,14	4,36	4,85	3,44	0,71	17,15
Penempatan di BI	16,39	17,27	27,13	19,24	10,74	65,53
Surat Berharga	5,73	6,04	5,9	4,18	0,17	2,97
Penyertaan	0,09	0,09	0,05	0,04	-0,04	-44,44
Tagihan lainnya	0,35	0,37	0,4	0,28	0,05	14,29

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS terus membaik dan turut berperan meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian meski masih dalam jumlah yang relatif minimal. Pada tahun laporan jumlah BPRS bertambah sebanyak 5 BPRS, sehingga per Desember 2011 terdapat 155 BPRS yang beroperasi. Aset BPRS selama kurun waktu yang sama juga meningkat sebesar Rp782 miliar atau 28,54% dari sebelumnya Rp2,74 triliun menjadi Rp3,52 triliun per Desember 2011, dengan pembiayaan sebesar 76,01% dari total aktiva. Sementara dari sisi pendanaan, produk tabungan meningkat 30,52%, sementara deposito meningkat 30,74% sehingga secara keseluruhan perolehan dana masyarakat meningkat cukup tinggi sebesar 30,65% menjadi sebesar Rp2,09 triliun. Dengan perkembangan tersebut, struktur pendanaan BPRS masih didominasi oleh deposito yang mempunyai pangsa sebesar 58,96%. Perkembangan tersebut turut ditopang oleh kegiatan kampanye iB yang juga diikuti oleh BPRS turut berkontribusi dalam peningkatan penghimpunan dana ini.

Dari sisi pembiayaan, akad *Murabahah* masih mendominasi seperti halnya yang terjadi pada BUS dan UUS. Pembiayaan BPRS selama satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang tinggi dari Rp 2,0 triliun menjadi Rp2,68 triliun atau meningkat 33,19%. Akad pembiayaan *Murabahah* yang tercatat sebesar Rp2,15 triliun, masih menjadi kontributor utama yaitu sebesar 80,51%. Capaian tersebut turut ditopang

oleh perluasan jangkauan layanan BPRS dan kebijakan terkait.

Peningkatan aset BPRS disertai oleh kinerja yang semakin baik dan fungsi intermediasi yang tetap terjaga. Kinerja indikator yang semakin membaik tersebut tercermin dalam berbagai indikator perbankan, yang antara lain rasio permodalan yang tercermin dari CAR BPRS yang mencapai 23,49%. Tingkat efektifitas penggunaan modal BPRS juga relatif memadai tercermin dari rasio ROE sebesar 18,95%. Meskipun tingkat efektifitas penggunaan asetnya (ROA) sedikit menurun dari 3,49% menjadi 2,67%. Sedangkan efisiensi biaya meningkat sehingga mampu menurunkan rasio BOPO dari 78,08% menjadi 76,31%. Sementara peran BPRS dalam perekonomian tampak dalam indikator FDR yang pada tahun 2011 telah mencapai 127,71%. Tingginya pembiayaan tersebut diikuti oleh rasio NPF *gross* yang mengalami penurunan dari 6,50% menjadi 6,11%.

Kinerja Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Perbankan (MKM)

Kinerja kredit MKM terus meningkat, yang antara lain ditandai oleh pencapaian target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan kredit pada tahun 2011 berdasarkan data MKM adalah sebesar 23,9% sedangkan pertumbuhan kredit berdasarkan definisi baru (UMKM) adalah sebesar 21,7%. Dengan demikian, pertumbuhan kredit UMKM sudah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20%. Komposisi kredit UMKM didominasi

oleh kredit modal kerja yaitu sebesar 78,2% sedangkan sisanya sebesar 21,8% adalah kredit investasi (Tabel 8.7). Apabila dilihat dari wilayah penyaluran kredit, sebagian besar kredit kepada UMKM atau sebesar 62,0% masih berpusat di pulau Jawa dan Bali. Secara sektoral, porsi kredit UMKM yang terbesar adalah pada sektor perdagangan sebesar 44,7% yang diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 11,0%. Dilihat dari bank penyalurnya, kelompok Bank Persero menjadi penyalur terbesar kredit UMKM yang mencapai Rp222,6 triliun (46,4%) yang diikuti oleh kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar Rp176,9 triliun (36,9%) dan kelompok BPD sebesar Rp31,3 triliun (6,5%).

Redefinisi penyajian data kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) oleh Bank Indonesia sejalan dengan telah diterbitkannya UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memuat definisi UMKM berdasarkan kriteria usaha (aset dan omset). Redefinisi tersebut mengubah data kredit MKM yang saat ini dipakai berdasarkan kriteria plafon kredit menjadi data kredit UMKM berdasarkan kriteria usaha penerima kredit yang mengacu kepada UU No. 20 tahun 2008 tersebut. Mulai Januari 2011, Bank Indonesia telah menyediakan data kredit UMKM yang masih disajikan secara paralel dengan data MKM. Dengan berlakunya definisi kredit yang baru, porsi kredit UMKM sebesar 21,2% dari total kredit perbankan, porsi kredit tersebut menurun apabila dibandingkan dengan porsi kredit MKM yang mencapai 51,9%. Penurunan porsi kredit tersebut disebabkan

8 Data kredit UMKM belum termasuk Bank Umum Syariah (BUS), tetapi sudah termasuk data BPR dan BPRS menggunakan data September 2011

Tabel 8.7 Perkembangan Kredit UMKM⁸

Keterangan	Posisi (Triliun rupiah)		Pertumbuhan (%)	Pangsa (%)	
	2010	2011		2010	2011
Jenis Penggunaan					
Kredit Modal Kerja	314,7	375,3	19,3	79,8	78,2
Kredit Investasi	79,6	104,6	31,4	20,2	21,8
Total	394,3	479,9	21,7	100	100
Sektor Ekonomi					
Pertanian	19,5	30,3	55,6	4,9	6,3
Perikanan	2,2	2,7	23,4	0,5	0,6
Pertambangan	3,2	4	25	0,8	0,8
Industri Pengolahan	43,4	52,8	21,6	11	11
Listrik, Air dan Gas	1,4	1,2	-8,5	0,3	0,3
Konstruksi	20,7	25	20,7	5,2	5,2
Perdagangan	177,5	214,6	20,9	45	44,7
Akomodasi	7,3	10,3	40,4	1,9	2,1
Transportasi	13,9	19,3	38,8	3,5	4
Keuangan	6,8	10,4	52	1,7	2,2
Real Estate	13	20,3	56,9	3,3	4,2
Administrasi	0,3	0,4	48,7	0,1	0,1
Jasa Pendidikan	1,3	1,6	25,1	0,3	0,3
Jasa Kesehatan	2,8	3	8,9	0,7	0,6
Jasa Kemasyarakatan	21,7	27	24,6	5,5	5,6
Jasa Perorangan	1,6	1	-33,9	0,4	0,2
Badan Internasional	0,08	2,4	2698,4	0	0,5
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	49,8	53,7	7,8	12,6	11,2
Tidak Teridentifikasi					
Total	8,1	0	-100	2	0
	394,3	479,9	21,7	100	100
Rasio Kredit UMKM/Total kredit Perbankan	21,8	21,2	-	-	-

karena kredit konsumsi bukan lagi merupakan bagian dari kredit UMKM.

8.2 KEBIJAKAN DAN KINERJA PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Kebijakan pasar modal dan industri keuangan tetap diarahkan untuk membangun industri keuangan yang kompetitif, transparan, stabil, kredibel serta berstandar internasional. Hal tersebut sejalan dengan *Master Plan Pasar Modal Indonesia 2010-2014*. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bapepam-LK menempuh beberapa kebijakan, antara lain: (i) menjadikan pasar modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses; efisien dan kompetitif; (ii) menjadikan instrumen saham dan obligasi sebagai sarana investasi yang atraktif dan ditunjang pengelolaan risiko yang handal; (iii) pengembangan industri yang berbasis stabilitas dan likuid; (iv) pengembangan kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum; dan (v) pembangunan infrastruktur berstandar internasional. Selain hal tersebut, pada tahun 2011 Bapepam-LK mengeluarkan serangkaian aturan baik melalui penerbitan maupun penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), peraturan pasar modal dan peraturan lembaga keuangan.

Industri pasar keuangan yang stabil merupakan salah satu prioritas pencapaian Bapepam-LK. Upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain dengan meningkatkan kualitas pelaku industri dan kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Peningkatan kualitas pelaku industri tersebut termasuk memperluas basis investor domestik dan dana jangka panjang. Di samping itu, Bapepam-LK terus mendorong kemampuan industri dalam pengelolaan risiko serta kapasitas pengawasan terhadap pelaku industri. Terkait hal tersebut, pemerintah terus memantapkan *bond stabilization framework* untuk menjaga kestabilan harga di pasar SBN. Kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan pengaturan efek perdagangan, marjin, dan *short selling* pada tahun 2009 juga menjadi fondasi dalam penguatan stabilitas di pasar saham, khususnya dalam mengurangi aksi spekulasi yang berlebih, di samping beberapa pengaturan terkait

dengan mekanisme transaksi dan keanggotaan pada tahun 2011⁹.

Peningkatan kualitas pelaku industri institusional menjadi faktor penting dalam pengembangan industri keuangan yang stabil. Penguatan kualitas institusional meliputi pembenahan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengembangan pedoman tata kelola perusahaan yang baik, penyempurnaan regulasi agar berstandar internasional, serta peningkatan kualitas implementasi. Pada perusahaan asuransi, hal tersebut diwujudkan dalam pemenuhan minimum modal sendiri dari Rp40 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp100 miliar pada tahun 2014. Di samping itu terdapat penyesuaian modal kerja yang disesuaikan, khususnya bagi perusahaan sekuritas. Pada perusahaan efek, fokus pembenahannya adalah melalui penyempurnaan ketentuan permodalan, standarisasi teknologi informasi, penyempurnaan persyaratan perizinan dan pengaturan *outsourcing*.

Peningkatan kualitas pelaku industri individual juga merupakan faktor yang tidak terpisahkan dalam pengembangan industri keuangan yang stabil. Kualitas pelaku individual ditingkatkan melalui peningkatan standar kualifikasi sebelum mendapatkan ijin serta peningkatan profesionalisme setelah mendapatkan ijin. Di pasar modal, upaya peningkatan standar kualifikasi pelaku efek akan dilakukan melalui restrukturisasi perizinan wakil perusahaan efek. Pada industri dana pensiun, Bapepam-LK akan melengkapi kualifikasi perorangan dengan memasukkan faktor integritas sebagai bagian strategi peningkatan kualitas pelaku individual. Pada industri asuransi, strateginya adalah melalui pengembangan jalur-jalur sertifikasi sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Kebijakan peningkatan kualitas pelaku pasar perlu dibarengi oleh kelengkapan perangkat dalam penciptaan industri yang stabil seperti kemampuan dalam pengelolaan risiko dan peran pengawasan sistem keuangan. Dalam hal pengelolaan risiko dimaksud, turut meliputi pengendalian risiko dalam fungsi kliring dan penjaminan transaksi bursa, penyusunan *Business*

⁹ 1. II-A Kep-00005/BEI/01-2011 Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek, 2. III-C Kep-00082/BEI/10-2011 Keanggotaan Bursa Efek untuk Memperdagangkan EBU, Sukuk dan EBA Aliran Kas Tetap, 3. III-D Kep-00083/BEI/10-2011 Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan 72, 4. III-E Kep-00084/BEI/10-2011 Pemeriksaan Anggota Bursa Efek 21, 5. III-F Kep-00085/BEI/10-2011 Sanksi, 6. III-G Kep-00086/BEI/10-2011 Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa

Continuity Plan. Sementara pengembangan sistem pengawasan pasar modal diarahkan agar tetap berbasis risiko. Di samping itu, dilakukan pengembangan identitas tunggal bagi investor dan indikator peringatan dini pengawasan, khususnya terkait dengan perilaku *insider trading*. Pengawasan juga dilakukan terhadap profesi penunjang pasar modal dan lembaga pemeringkat efek.

Industri keuangan yang stabil turut didukung oleh penguatan basis investor jangka panjang. Kebijakan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pemodal domestik melalui pengaturan yang mewajibkan perusahaan efek anggota bursa memiliki pemodal domestik dalam jumlah tertentu. Hal itu dibarengi dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang terarah dan terpadu. Terkait hal tersebut, terdapat tiga sasaran yang hendak dicapai, yaitu untuk peningkatan IPO dan jumlah investor ritel dan institusional jangka pendek dan menengah, sementara dalam jangka panjang mengarahkan pada pembentukan budaya investasi. Bapepam-LK juga tengah mengkaji aturan yang terkait dengan penyelenggaraan program pensiun dan asuransi yang bersifat wajib.

KINERJA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Kinerja Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan tumbuh positif pada tahun 2011, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga. Total aset perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan menjadi Rp286,2 triliun atau tumbuh sebesar 24%.¹⁰ Pembiayaan tersebut lebih banyak disalurkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, yaitu sekitar 67,4% dari total pembiayaan atau Rp163,1 triliun. Pertumbuhan kegiatan pembiayaan konsumen ini terutama didorong oleh tingginya permintaan kendaraan bermotor. Sementara itu, penyaluran pembiayaan untuk kegiatan sewa guna usaha, yang merupakan pembiayaan produktif, hanya mengambil porsi sekitar 17% dari total pembiayaan.

Peningkatan penyaluran pembiayaan diikuti oleh profil risiko yang semakin membaik. Selama tahun 2011, kondisi makroekonomi yang relatif stabil ikut mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh industri perusahaan pembiayaan.

¹⁰ Data perusahaan menggunakan data per November 2011. Pertumbuhan diukur dengan membandingkan posisi per Desember 2010 dibandingkan dengan posisi November 2011

Kondisi tersebut diikuti dengan penerapan kebijakan yang selektif dan berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya. Dengan perkembangan tersebut, risiko pembiayaan industri sejak tahun 2008 cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh penurunan rasio NPF dari 2,7% pada tahun 2008 menjadi 1,4% dan menunjukkan tren yang terus menurun.¹¹

Ditinjau dari struktur sumber pendanaannya, sumber dana utama perusahaan pembiayaan berasal dari pinjaman bank. Pinjaman tersebut terbagi menjadi pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Sebagian besar pinjaman berasal dari perbankan dalam negeri. Sementara sisanya berasal dari bank luar negeri dan bukan bank serta penerbitan surat berharga, pinjaman lainnya dan penambahan modal. Kondisi suku bunga yang rendah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mendorong peningkatan pinjaman bank oleh perusahaan pembiayaan.

Kinerja Perusahaan Asuransi

Sebagaimana perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi mencatat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2011, sehingga perannya dalam pengelolaan risiko pada pasar keuangan tetap terjaga. Peningkatan kinerja perusahaan asuransi antara lain ditandai oleh peningkatan total kekayaan dan investasi. Total kekayaan industri asuransi meningkat signifikan dari Rp236,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp258,9 triliun pada triwulan III 2011. Sementara itu, total investasi meningkat dari Rp202,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp219,8 triliun pada triwulan III 2011. Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi asuransi juga mengalami kenaikan. Kenaikan premi tersebut diimbangi oleh kenaikan klaim meski dengan pertumbuhan yang lebih rendah. Kenaikan premi dan klaim asuransi pada tahun 2011 mencapai masing-masing sebesar 17% dan 5%.¹²

Peningkatan kinerja pada tahun 2011 diikuti oleh makin beragamnya produk asuransi yang ditawarkan. Keberagaman produk asuransi meningkatkan daya saing industri asuransi di tengah semakin kompetitifnya industri pasar keuangan. Secara umum, produk asuransi yang disambut positif oleh masyarakat adalah yang memiliki fitur investasi. Asuransi dengan karakteristik

¹¹ Data tahun 2010

¹² Data sebagaimana tercantum dalam siaran pers Bapepam-LK tahun 2011. Dalam perkembangannya, Aset perusahaan asuransi mencapai Rp399,7 triliun pada akhir Desember 2011 atau meningkat sebesar 11% dibandingkan tahun 2010

tersebut muncul sebagai alternatif investasi selain deposito, reksadana, ORI dan saham. Produk asuransi lain yang berpotensi tumbuh pesat adalah produk yang menawarkan keuntungan tambahan seperti pengembalian premi jika tidak terdapat klaim. Namun demikian, peningkatan kinerja pada tahun 2011 belum diikuti oleh pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi. Sejak tahun 2003 telah terjadi tren penurunan jumlah perusahaan asuransi meski pada dua tahun terakhir jumlah industri asuransi cenderung stabil, yaitu sebanyak 139 perusahaan asuransi dan 240 perusahaan penunjang pengasuransian.

Peningkatan kinerja asuransi turut memperkuat basis investor jangka panjang pada instrumen keuangan. Porsi penempatan reksadana dan saham tercatat yang terbesar, yaitu masing-masing sebesar 19,7% dan 19,1% pada Desember 2011.¹³ Dalam hal ini terjadi pergeseran pola penempatan investasi perusahaan asuransi, yaitu dari penempatan pada SBN ke saham maupun reksadana meski dalam jumlah yang relatif terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan makin beragamnya produk asuransi, khususnya yang menawarkan fitur investasi. Fenomena tersebut berdampak positif terhadap perkembangan pasar SBN dan saham ke depan karena dana pensiun yang mengelola dana jangka panjang masyarakat merupakan investor strategis bagi pasar keuangan. Meski demikian, porsi penempatan pada deposito dan SBN juga masih tinggi, yaitu mencapai 22,2% dan 21,4%.¹⁴ Masih tingginya porsi tersebut merupakan bagian dari motif berhati-hati industri asuransi.

Kinerja Dana Pensiun

Kinerja dana pensiun juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga perannya dalam pengelolaan risiko pada pasar keuangan tetap terjaga. Total aktiva bersih industri dana pensiun secara konsisten mempunyai tren yang meningkat walaupun jumlah perusahaan penyelenggara dana pensiun mengalami penurunan sejak tahun 2002. Sampai dengan tahun 2011, jumlah perusahaan penyelenggara dana pensiun sebanyak 270 perusahaan atau turun dari tahun 2009 sebanyak 276 perusahaan. Sementara itu, total aktiva bersih dana pensiun pada tahun 2011

13 Porsi penempatan pada saham dan reksadana per 30 September 2011 sebagaimana tercantum dalam Siaran Pers Bapepam-LK 2011 masing-masing adalah sebesar 21,8% dan 28,9%

14 Porsi penempatan pada deposito dan SUN per 30 September 2011 sebagaimana tercantum dalam Siaran Pers Bapepam-LK 2011 masing-masing adalah sebesar 20,1% dan 16,1%.

mencapai sekitar Rp136,2 triliun. Nilai aktiva bersih tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp112,5 triliun. Capaian tersebut menunjukkan daya tahan industri dana pensiun dalam menghadapi gejolak pasar keuangan global.¹⁵

Peningkatan kinerja dana pensiun turut memperkuat basis investor jangka panjang pada instrumen keuangan. Penempatan di instrumen keuangan SBN, deposito dan obligasi korporasi tercatat masih yang terbesar selama beberapa tahun terakhir, yaitu masing-masing sebesar Rp29,2 triliun, Rp29,1 triliun dan Rp28,4 triliun sampai dengan Oktober 2011.¹⁶ Perilaku tersebut menunjukkan motif prudensial dalam pengelolaan dana pensiun. Namun dalam perkembangannya, terjadi pergeseran pola penempatan investasi perusahaan dana pensiun. Dalam hal ini terjadi lonjakan penempatan pada instrumen saham. Kondisi tersebut sejalan dengan makin beragamnya produk dana pensiun, khususnya pada akhir tahun yang menawarkan fitur investasi. Penempatan pada saham mencapai Rp22,0 triliun. Fenomena tersebut berdampak positif terhadap perkembangan SBN dan saham ke depan karena dana pensiun yang mengelola dana jangka panjang masyarakat merupakan investor strategis bagi pasar obligasi dan saham.

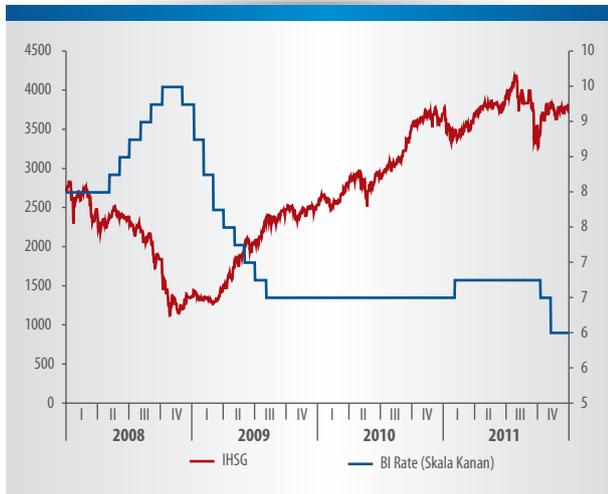
KINERJA PASAR KEUANGAN

Kinerja Pasar Saham

Di tengah risiko ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi, pasar saham domestik mampu mempertahankan pertumbuhan positif. Kondisi makroekonomi yang cukup kondusif, dukungan kinerja emiten yang stabil, serta kebijakan perekonomian yang akomodatif menjadi penopang kinerja positif pasar saham yang tercermin dari meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah bursa Indonesia sebesar 4.193 pada Agustus 2011, dan pada akhir tahun berada pada level 3.821,9 atau naik 3,2% dibanding tahun 2010 (Grafik 8.6). Kinerja pasar saham domestik tersebut sempat diwarnai oleh beberapa gejolak peningkatan risiko eksternal, khususnya pada

15 Data dana pensiun sebagaimana tercantum dalam laporan "Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank" Bapepam-LK per 25 November 2011

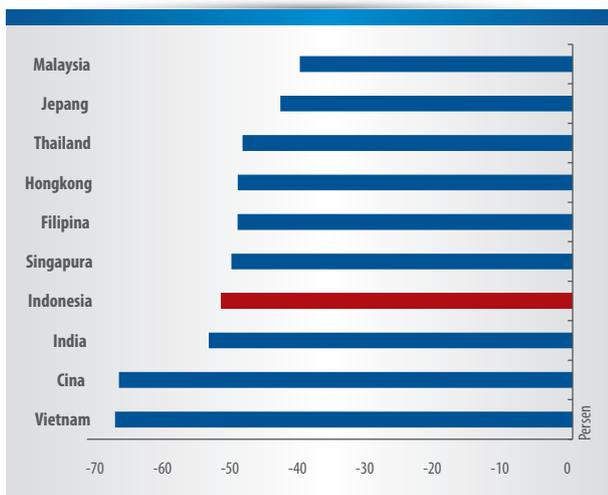
16 Data sebagaimana tercantum dalam siaran pers Bapepam-LK tahun 2011



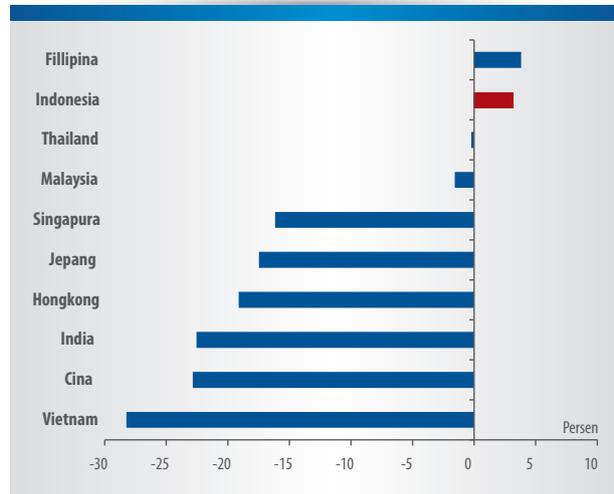
Grafik 8.6 IHSI dan BI Rate

awal tahun 2011 dan Agustus - September 2011. Meskipun demikian, pencapaian tersebut masih mampu menempatkan pasar saham Indonesia sebagai bursa dengan kinerja terbaik di negara kawasan setelah Filipina. Secara keseluruhan IHSI juga lebih baik karena mampu mempertahankan volatilitas yang rendah jika dibandingkan dengan periode saat krisis Lehman Brothers maupun dibandingkan dengan kinerja bursa di negara-negara kawasan (Grafik 8.7 dan Grafik 8.8).

Pasar saham domestik selama tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi risiko ketidakpastian global. Beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan antara lain adalah kecepatan dalam pemulihan dibandingkan dengan negara kawasan. Dampak gejala pasar keuangan global pada tahun 2011 adalah penurunan kinerja pasar saham domestik yang mencapai 22%. Penurunan



Grafik 8.7 IHSI dan Indeks Negara - Negara Kawasan 2007-2008



Grafik 8.8 IHSI dan Indeks Negara Kawasan 2010-2011

kinerja tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Namun, pasar saham domestik menunjukkan kemampuannya untuk lebih cepat pulih. Dalam hal ini, IHSI memerlukan waktu sekitar 3 pekan untuk kembali membukukan kinerja positif atau lebih cepat jika dibandingkan dengan kinerja bursa di negara - negara kawasan (Tabel 8.8).

Pertumbuhan IHSI ditopang oleh pertumbuhan sektoral meski tidak secara merata. Selama tahun 2011, sektor yang mengalami pertumbuhan antara lain sektor aneka industri, barang konsumsi, perdagangan dan sektor keuangan. Selain faktor fundamental emiten yang cukup kokoh dalam menyokong pertumbuhan sektor-sektor tersebut, terjaganya berbagai indikator makro serta tingginya porsi konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penjelas dibalik penguatan tersebut. Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tahun 2008. Perlambatan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan harga komoditas jatuh sehingga berdampak pada koreksi sektor pertambangan yang kemudian diikuti oleh sektor lainnya. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di tahun 2011 dimana koreksi sektor pertambangan yang cukup tinggi tidak diikuti oleh sektor lainnya (Grafik 8.9 dan Grafik 8.10).

Struktur sektoral penyumbang pertumbuhan bursa saham yang makin berimbang dan berkualitas turut menopang penguatan daya tahan pasar saham domestik. Berbeda dengan tahun 2008 yang didominasi oleh sektor pertambangan, kontribusi sektor aneka industri cenderung lebih menonjol pada tahun 2011. Sektor aneka industri tidak hanya mengalami peningkatan kapitalisasi, namun juga akselerasi

Tabel 8.8 Kecepatan Penyesuaian Bursa di Negara - Negara kawasan

Negara	Titik Puncak	Titik Terendah	Rata-Rata 2011	Dampak Gejolak 2011	Kecepatan Penyesuaian*
Filipina	4.507,04	3.721,22	4.263,00	-17,44%	± 3,5 Bulan
Indonesia	4.174,11	3.269,45	3.799,30	-21,67%	± 3 Bulan
Malaysia	1.594,74	1.331,80	1.486,45	-16,49%	± 4 Bulan
Singapura	3.193,54	2.528,71	3.119,65	-21,35%	± 3 Bulan
Thailand	1.134,38	855,45	1.035,78	-24,59%	± 4,5 Bulan
Vietnam	486,58	347,80	446,24	-28,52%	Belum
Negara	Titik Puncak	Titik Terendah	Indeks Rata-Rata 2007-2008	Dampak Gejolak 2008	Kecepatan Penyesuaian*
Filipina	3.873,50	1.704,41	3.022,46	-56,00%	± 25 bulan
Indonesia	2.830,26	1.111,39	2.068,30	-60,73%	± 17 bulan
Malaysia	1.516,22	829,41	1.229,93	-45,30%	± 21 bulan
Singapura	3.831,19	1.600,28	3.020,13	-58,23%	± 35 bulan**
Thailand	915,03	384,15	727,93	-58,02%	± 23 bulan
Vietnam	1.170,67	286,85	755,38	-75,50%	Belum

*) Dihitung berdasarkan periode saat indeks mulai mengalami tekanan sampai dengan pulih.

Rentang waktu observasi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

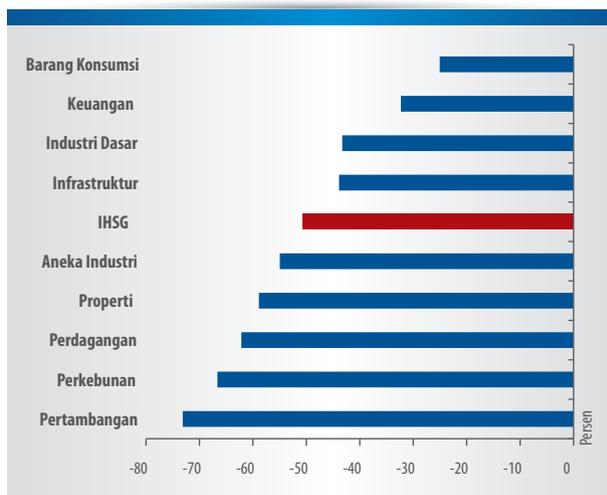
**) Pemulihan indeks masih berlanjut. Indeks masih dibawah level sebelum tekanan.

pertumbuhan nilai transaksi perdagangan. Dengan kondisi tersebut, kerentanan bursa saham domestik terhadap spekulasi harga komoditas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2008. Struktur kapitalisasi *tradable* yang bersumber dari sektor industri meningkat dari 28% pada tahun 2010 menjadi sebesar 30% pada akhir tahun 2011. Sementara itu, sektor *tradable* yang bersumber dari sektor komoditas, baik tambang maupun perkebunan,

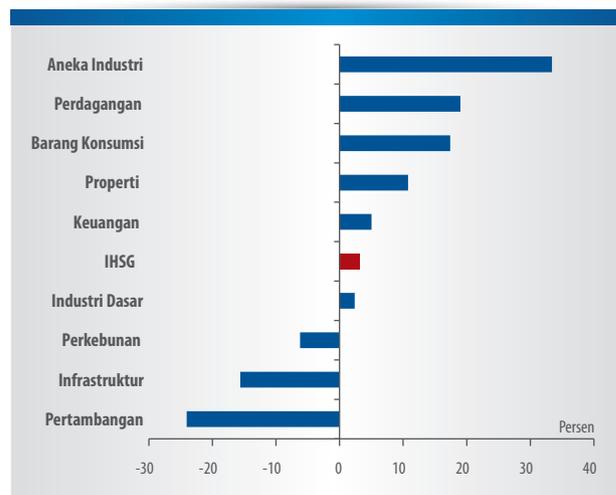
mengalami penurunan dari 19% pada tahun 2010 menjadi 18% pada tahun 2011 (Grafik 8.11).¹⁷

Faktor fundamental makroekonomi serta mikro emiten turut menopang pertumbuhan positif pasar saham domestik. Beberapa faktor positif dari domestik antara lain fundamental ekonomi yang kondusif sebagaimana tercermin dalam inflasi yang terkendali,

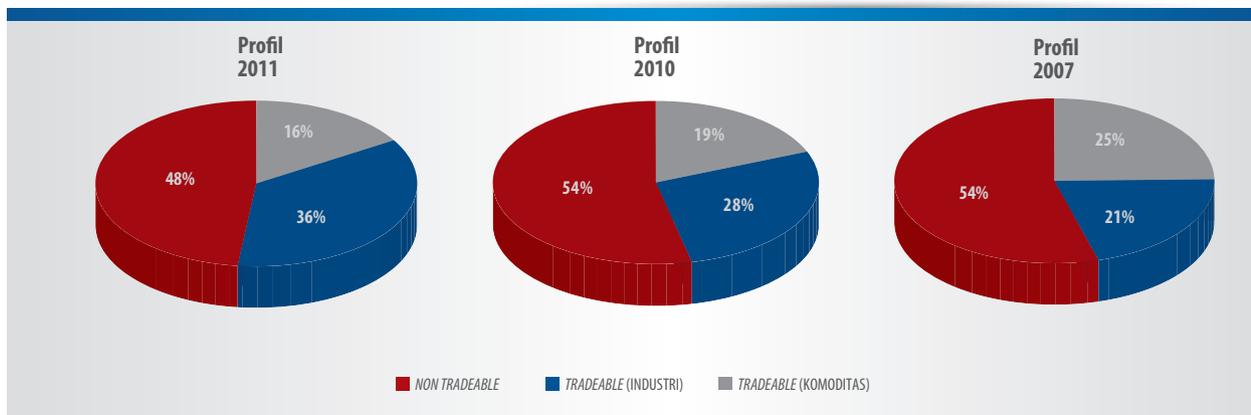
17 Definisi sektor tradable sendiri adalah sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun barang) dan dapat meningkatkan standar hidup (*living standard*) masyarakat.



Grafik 8.9 Perkembangan Sektoral Bursa 2007-2008



Grafik 8.10 Perkembangan Sektoral Bursa 2010-2011



Grafik 8.11 Kapitalisasi Sektor *Tradable* dan *Nontradable*

prospek pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara dari sisi mikro emiten, kinerja keuangan emiten domestik cukup kokoh. Sampai dengan kuartal III 2011, laba bersih emiten kelompok LQ 45 secara rata-rata tumbuh sebesar 26,3% dibandingkan dengan kuartal III 2010. Dalam hal ini, sektor aneka industri termasuk yang memiliki fundamental paling solid dan turut memperkuat komposisi sektor *tradable* dalam menyokong pertumbuhan IHSG. Di samping itu, berdasarkan analisis teknikal, pasar saham domestik telah berada dalam zona *undervalued* setelah mengalami koreksi yang signifikan pada Agustus – September 2011. Dengan demikian faktor risiko *bubble* cenderung mereda.

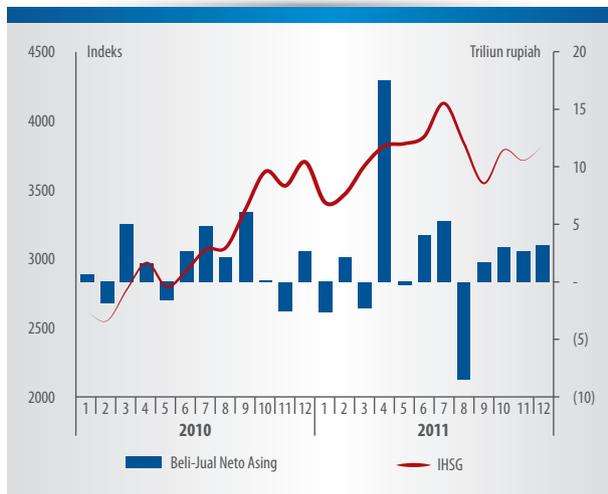
Fundamental emiten yang cukup kokoh pada akhirnya mendorong bekerjanya *self market stabilization* pada saat kondisi pasar mengalami tekanan. Pada saat kondisi pasar mengalami tekanan, khususnya pada periode Januari 2011 dan Agustus-September 2011, pelaku nonresiden cenderung mengurangi eksposur mereka di pasar saham domestik. Akibat penjualan asing tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan harga saham hingga melampaui kondisi fundamentalnya dan menyebabkan harga saham cenderung *undervalued*. Namun, pelaku nonresiden kembali merespons kondisi tersebut dengan melakukan pembelian kembali (*natural self market stabilization*). Perilaku tersebut tidak terlepas dari ekspektasi positif pelaku pasar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan serta stabilitas makro. Pada periode pasar mengalami tekanan, investor nonresiden membukukan jual netto sebesar Rp2,6 triliun dan Rp14,5 triliun. Setelah membukukan jual netto tersebut, investor asing kembali masuk sehingga secara keseluruhan selama

tahun 2011 beli netto asing mencapai sebesar Rp23,6 triliun. Selama Oktober-Desember 2011, investor asing mencatatkan beli netto sebesar Rp8,7 triliun (Grafik 8.12).

Kinerja Pasar Surat Berharga Negara

Kinerja pasar SBN masih positif meski pemulihan perekonomian global masih diliputi oleh ketidakpastian. Kinerja pasar SBN tersebut tercermin dari pergerakan imbal hasil yang cenderung turun untuk keseluruhan tenor dari 7,34% menjadi 5,88% (Grafik 8.13). Selama tahun laporan 2011, pasar SBN juga mengalami gejolak yang dipicu oleh beberapa sentimen pasar yang menyulut kenaikan imbal hasil SBN yang dipengaruhi antara lain oleh sentimen mulai mudarnya prospek perekonomian global pada awal tahun 2011 dan meningkatnya permasalahan di AS dan Eropa (Agustus – September 2011). Pada dua periode tersebut, imbal hasil SBN untuk *benchmark* 10 tahun mencapai level tertingginya yaitu sebesar 9,2% dan 7,6% (Grafik 8.14). Meski demikian, kondisi makroekonomi yang cukup kondusif, faktor risiko fiskal yang relatif terkendali serta respons kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang positif menyebabkan imbal hasil SBN kembali bergerak normal dan mampu membukukan kinerja positif. Kinerja SBN juga relatif lebih baik dengan volatilitasnya yang rendah, baik jika dibandingkan dengan kinerja negara - negara kawasan maupun pada saat krisis Lehman Brothers.

Pergerakan imbal hasil SBN selama tahun 2011 telah menunjukkan adanya penguatan daya tahan dibandingkan dengan perilakunya pada tahun 2008. Indikasi penguatan daya tahan pada pasar SBN antara lain adalah kenaikan imbal hasil yang relatif terbatas



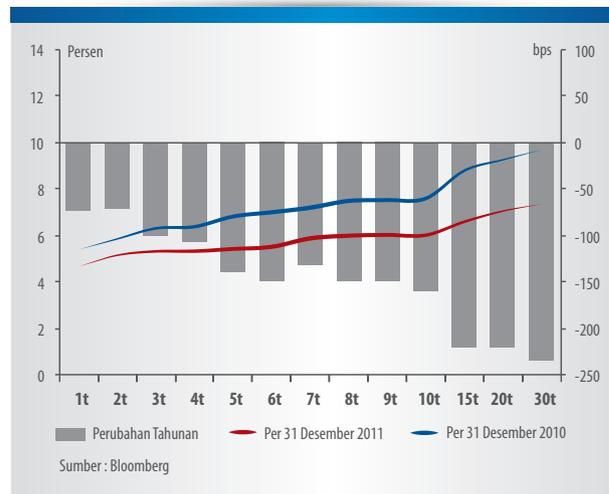
Grafik 8.12 IHSI dan Beli/Jual Neto Asing

serta kecepatan dalam pemulihannya. Terlepas dari karakteristik *shock* yang berbeda, kenaikan imbal hasil tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan imbal hasil pada tahun 2008 yang mencapai 20,9%. Bahkan ketika terjadi penurunan peringkat utang AS, tekanan dari sisi harga relatif minimal jika dibandingkan dengan kinerja pasar saham domestik. Dari sisi kecepatan pemulihan, pasar SBN memerlukan waktu sekitar 7 bulan untuk kembali normal pasca krisis Lehman Brothers tahun 2008, sementara ketika terjadi krisis utang Eropa dan permasalahan fiskal di AS pada tahun 2011, pasar SBN hanya memerlukan waktu sekitar 8 hari untuk kembali membukukan imbal hasil rata-rata sebelum periode krisis (Tabel 8.9).

Struktur pelaku pasar SBN turut menopang stabilitas harga SBN di tengah tekanan pasar keuangan global. Berbeda dengan perilaku investor SBN pada tahun



Grafik 8.13 Imbal hasil SUN dan BI Rate



Grafik 8.14 Struktur Termin SBN 2010-2011

2008, dimana tekanan jual asing tidak diimbangi oleh ketersediaan pembeli secara memadai sehingga mendorong kenaikan imbal hasil hingga 20,9% secara rata-rata untuk seluruh tenornya, selama tahun 2011 tekanan jual asing mampu diimbangi oleh pelaku pasar lainnya. Sebagai gambaran, saat sentimen penurunan peringkat utang AS terjadi pada September 2011, pembelian yang dilakukan perbankan dan Bank Indonesia mampu mengimbangi tekanan jual asing di pasar SBN. Struktur pasar yang cukup kondusif tersebut tidak terlepas dari terjaganya likuiditas di pasar SBN yang terindikasi dari meningkatnya volume perdagangan.

Otoritas fiskal dan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas pasar SBN dan pasar valas selama tahun 2011. Pada saat krisis tahun 2008, pemerintah melakukan *buyback* dengan frekuensi sebanyak 2 kali. Sementara pada tahun 2011, saat terjadi sentimen perlambatan ekonomi global (Oktober 2010 - Januari 2011), Pemerintah melakukan upaya stabilisasi harga SBN melalui *buyback* dengan frekuensi yang lebih sering yaitu sebanyak 14 kali. Pada saat pasar bergejolak akibat penurunan peringkat utang AS, Pemerintah kembali melakukan *buyback* dengan frekuensi sebanyak 6 kali.

Meski harga SBN relatif terjaga namun aksi jual asing SBN sempat memberikan tekanan yang menjalar di pasar valas. Episode tersebut terjadi pada Agustus-September 2011, investor asing membukukan jual neto sebesar Rp30,8 triliun. Tekanan jual asing pada SBN tersebut menjalar ke pasar valas. Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia melakukan stabilisasi di pasar valas dan melakukan pembelian SBN untuk menjaga

kecukupan likuiditas rupiah. Hal tersebut dikarenakan terdapat keterkaitan yang erat antara dinamika harga di kedua pasar tersebut, dimana kepemilikan pihak asing dalam SBN cukup besar. Sejalan dengan membaiknya kepercayaan investor, asing kembali membukukan beli neto sebesar Rp4,8 triliun pada periode Oktober-Desember 2011 atau sebesar Rp27,1 triliun sepanjang tahun 2011 (Grafik 8.15 dan Grafik 8.16).

Penguatan daya tahan pasar SBN tidak hanya tercermin dari perilaku pasar sekunder, namun juga di pasar primer. Dalam hal ini, lelang SBN yang dilakukan oleh Pemerintah mampu memenuhi target yang ditetapkan sehingga mampu menyokong pembiayaan APBN 2011. Hal tersebut turut diimbangi oleh tingginya peminat SBN, yang antara lain diindikasikan oleh tingginya rata-rata rasio *bid to cover*. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah melakukan *rationing* dalam rangka menetapkan jumlah pemenang. Dalam perjalanannya, kondisi pasar primer sempat terimbas oleh *shock* yang terjadi di pasar keuangan global sehingga Pemerintah terpaksa tidak memenangkan penawaran yang masuk menyusul tingginya imbal hasil yang diminta para peserta lelang.

Kinerja Pasar Reksadana

Sejalan dengan kinerja *underlying asset*, pasar reksadana mampu tumbuh positif selama tahun 2011. Secara umum, kinerja reksadana, yang antara lain tercermin dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB), tumbuh cukup tinggi. Peningkatan NAB secara keseluruhan produk mencapai 13,4% dibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan kinerja tersebut terutama ditopang oleh reksadana saham dan campuran. Peningkatan kinerja bahkan melampaui *underlying asset* seperti indeks acuan di pasar keuangan, seperti IHSG untuk

pasar saham dan IDMA untuk pasar SBN. Pada saat pasar keuangan mengalami tekanan, kinerja reksadana secara umum turut terkoreksi meski dengan besaran yang lebih rendah.

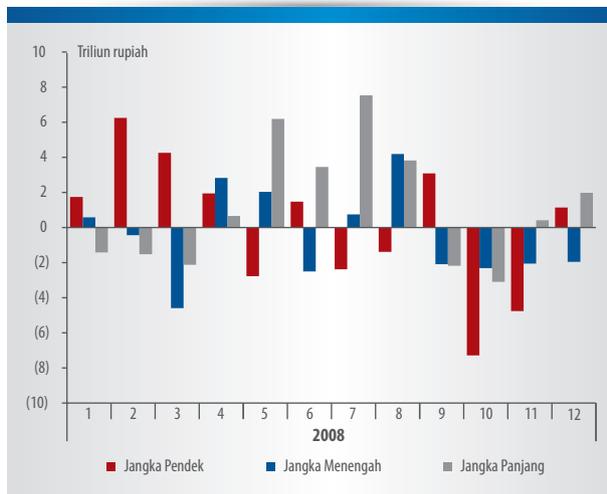
Pendalaman pasar reksadana cukup berperan dalam pendistribusian risiko. Pendalaman pasar reksadana antara lain tercermin dari makin beragamnya produk reksadana serta peningkatan nilai aset kelolaan pada produk tersebut. Berbagai macam produk tersebut yang baru diperkenalkan antara lain Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan reksadana penyertaan terbatas. Keberagaman produk tersebut membantu untuk mengurangi pemupukan risiko secara berlebih pada satu jenis produk. Di samping itu, berbagai fitur yang ditawarkan mampu mengurangi tekanan pada pasar reksadana saat sentimen negatif menekan kinerja pasar keuangan. Sebagai contoh, fitur reksadana terproteksi yang menjaga nilai investasi pada nominal tertentu.

Tingginya minat investor terhadap produk reksadana yang dibarengi dengan peningkatan kualitas investor menopang kinerja reksadana tahun 2011. Pada tahun 2011, pembelian (*net subscription*) reksadana mencapai Rp98,2 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang justru membukukan penjualan (*net redemption*) sebesar Rp34,8 triliun. Paparan data tersebut menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di reksadana cukup tinggi. Bahkan terdapat peningkatan pembelian khususnya pada reksadana saham yang diikuti oleh rendahnya angka penebusan saat pasar bergejolak, khususnya pada Februari dan Agustus-September 2011. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari upaya Bapepam yang terus melakukan edukasi termasuk pengenalan beberapa produk baru.

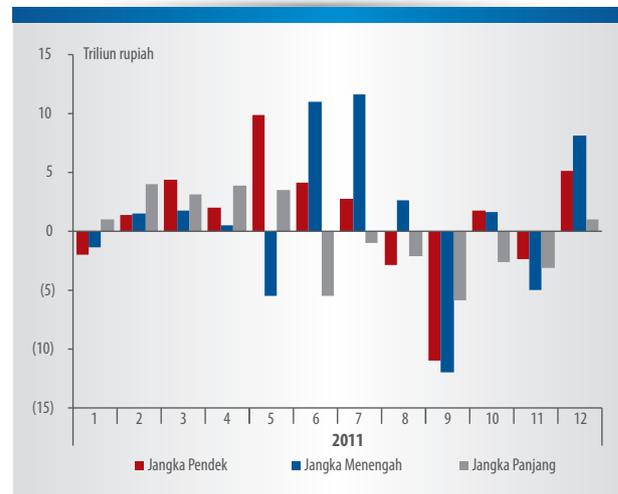
Tabel 8.9 Kecepatan Penyesuaian Pasar SBN

Penurunan Peringkat AS 2011	Indonesia	Thailand	Filipina	Malaysia
Imbal hasil tertinggi	6,46	3,57	5,55	3,41
Imbal hasil terendah	5,43	3,02	4,89	3,20
Perubahan tertinggi-terendah	1,03	0,55	0,67	0,21
Kecepatan penyesuaian*	± 1 bulan	± 1 bulan	± 2 bulan	± 2 bulan
Lehman Brothers 2008	Indonesia	Thailand	Filipina	Malaysia
Imbal hasil tertinggi	20,1	5,6	10,1	4,4
Imbal hasil terendah	8,4	2,1	5,6	3,0
Perubahan tertinggi-terendah	11,6	3,6	4,5	1,4
Kecepatan penyesuaian*	± 9 bulan	± 8 bulan	± 3,5 bulan	± 6,5 bulan

*) Dihitung berdasarkan periode saat indeks mulai mengalami tekanan sampai dengan pulih. Rentang waktu observasi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.



Grafik 8.15 Beli-Jual Neto Asing SBN 2008



Grafik 8.16 Beli-Jual Neto Asing SBN 2011

Kinerja Obligasi Korporasi

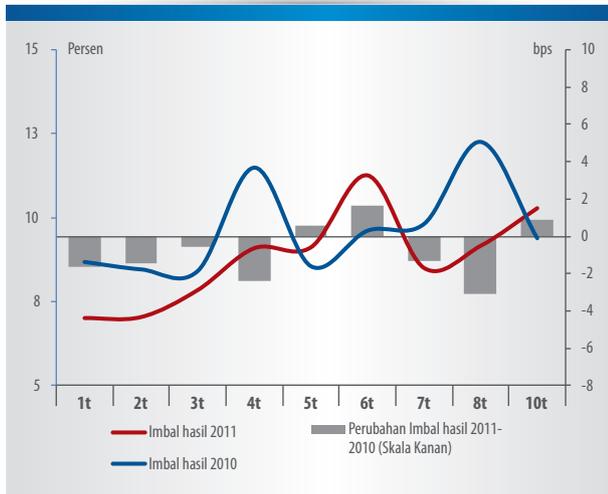
Di tengah kinerja perekonomian global yang memburuk, kinerja pasar obligasi korporasi relatif terjaga. Penurunan imbal hasil obligasi korporasi tersebut sejalan dengan penurunan BI Rate pada akhir tahun 2011. Secara umum, relatif terjaganya kinerja pasar obligasi korporasi tercermin dalam penurunan imbal hasil secara rata-rata untuk keseluruhan tenor. Pada akhir tahun 2010, imbal hasil rata-rata untuk seluruh tenor obligasi korporasi mencapai 9,63%. Sementara, imbal hasil obligasi korporasi pada tahun 2011 mencapai 8,81%. Dengan perkembangan tahunan tersebut, penurunan imbal hasil obligasi korporasi mencapai 81bps. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak merata untuk seluruh tenor, bahkan beberapa tenor mengalami kenaikan (Grafik 8.17).

Peningkatan kinerja obligasi korporasi juga tercermin dalam aktivitas pelaku pasar yang lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini volume dan frekuensi obligasi korporasi mengalami peningkatan. Rata-rata volume dan frekuensi perdagangan perhari pada tahun 2010 mencapai Rp349,2 miliar dan 57,8 kali, sementara pada tahun 2011 mencapai Rp467,8 miliar dan 68,9 kali. Perkembangan tersebut pada akhirnya berdampak positif pada penerbitan obligasi korporasi di pasar primer. Aktivitas yang lebih baik tersebut sejalan dengan terus membaiknya peringkat surat utang pemerintah yang berdampak ke pasar utang korporasi. Perbaikan peringkat tersebut pada akhirnya juga berdampak positif pada penerbitan obligasi korporasi di pasar primer (Grafik 8.18).

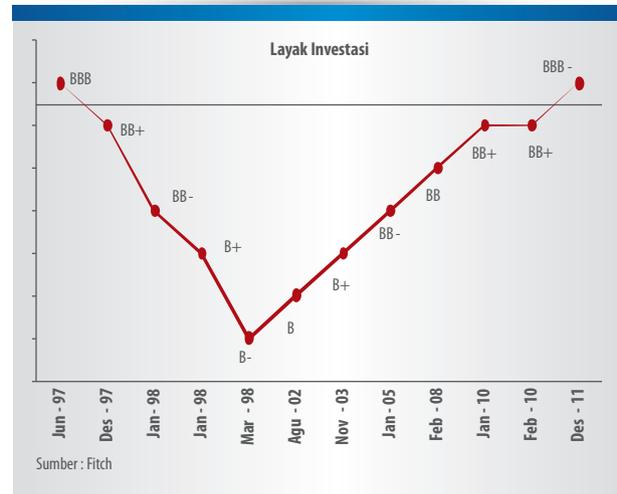
Kinerja Pembiayaan Ekonomi melalui Pasar Modal

Di tengah perkembangan ekonomi global yang masih diliputi faktor ketidakpastian yang tinggi, pembiayaan perekonomian tetap terjaga meski lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total pembiayaan melalui penerbitan saham perdana, *right issue*, dan obligasi korporasi masing-masing mencapai Rp19,6 triliun, Rp38,3 triliun dan Rp30,16 triliun (Tabel 8.10). Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, saluran pembiayaan lainnya seperti penerbitan *Medium Term Notes (MTN)*, *promissory notes* dan penawaran berkelanjutan tercatat juga kian marak pada tahun 2011. Hal tersebut mengindikasikan pasar keuangan yang kian dalam. Dalam perjalanannya, pembiayaan ekonomi melalui jalur nonbank sempat terkendala akibat gejala eksternal yang terjadi di beberapa periode pada tahun 2011.

Sementara itu, kontribusi pemanfaatan dana sendiri oleh korporasi dalam mendukung aktivitas riil yang tetap terjaga menunjukkan eksistensi daya tahan pasar keuangan terhadap perekonomian meski tengah menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi. Namun, beberapa hal yang perlu dicermati diantaranya adalah kecenderungan peningkatan porsi pembiayaan emiten sektor keuangan yang berpotensi ditempatkan kembali pada instrumen moneter dan fiskal serta belum optimalnya pemanfaatan tingginya aliran modal asing ke dalam penerbitan saham maupun obligasi korporasi.



Grafik 8.17 Struktur Termin Obligasi Korporasi



Grafik 8.18 Peringkat Surat Utang Pemerintah

Pertumbuhan laba emiten pada tahun 2011 memberikan indikasi yang kuat akan potensi pembiayaan ekonomi nonbank yang jauh lebih besar. Sejalan dengan pembukuan laba pada sebagian besar emiten, potensi pemanfaatan keuntungan tersebut sebagai bagian dalam pembiayaan kegiatan dan investasi perusahaan makin membesar. Perolehan laba emiten secara rata-rata naik sebesar 26,3% dibandingkan dengan periode sebelumnya pada

tahun 2010. Berbagai studi menunjukkan bahwa dana sendiri masih merupakan kontributor terbesar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁸ Pembiayaan melalui dana sendiri memberi manfaat lebih terhadap perekonomian, khususnya pada saat fungsi intermediasi bank belum berjalan optimal dan pasar keuangan menghadapi gejolak.

18 Survei Biro Riset Ekonomi, DKM (2010)

Tabel 8.10 Pembiayaan Ekonomi melalui Jalur Nonbank

Aktivitas	2010	2011
Emisi Saham Perdana		
- Jumlah Perusahaan	22	23
- Nilai (Triliun rupiah)	29,3	19,2
Emisi Right Issue		
- Jumlah Perusahaan	31	24
- Nilai (Triliun rupiah)	48,7	38,3
Emisi Obligasi Korporasi		
- Jumlah Perusahaan	24	28
- Nilai (Triliun rupiah)	34,7	30,2
Penawaran umum berkelanjutan		
- Jumlah Perusahaan		4
- Nilai (Juta, USD)		80
- Nilai (Triliun rupiah)		6
Emisi Sukuk Korporasi		
- Jumlah Perusahaan	2	1
- Nilai (Triliun rupiah)	0,7	0,1

BOKS 8.1 | OPTIMALISASI PERAN BPR DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF MELALUI PEMBIAYAAN UMKM

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini diiringi dengan perbaikan kualitas pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peran investasi dan ekspor disertai pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian agar tetap kuat, diperlukan optimalisasi kontribusi sektor keuangan termasuk perbankan dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian diupayakan pembiayaan tersebut dapat menjangkau seluas mungkin kepada pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal inilah yang menjadi esensi dari kebijakan keuangan inklusif pada masyarakat.

Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia secara intensif mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan BPR sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan pembiayaan usaha mikro dan kecil perlu terus dibina. Untuk itu, kebijakan Bank Indonesia bertujuan untuk mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan usaha BPR sehingga dapat mendorong terwujudnya BPR yang sehat, berkesinambungan, dan berperan sebagai katalisator perekonomian lokal. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan inklusif melalui pembiayaan UMKM. Beberapa paket kebijakan tersebut antara lain menerbitkan panduan mengenai pembentukan *Generic Model Apex* BPR dan model bisnis BPR sebagai acuan pengoperasian BPR yang berhasil pada tanggal 5 Desember 2011.

GENERIC MODEL APEX BPR

Lembaga *Apex* BPR merupakan bentuk kerjasama antara bank umum yang berperan sebagai bank induk dengan BPR sebagai anggota kerjasama *Apex*. Kehadiran lembaga *Apex* merupakan bentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani UMKM, sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara Bank Umum dan BPR. Istilah *Apex* sendiri diambil dari bahasa Yunani yang

berarti “pengayom” yang bermakna bahwa *Apex* BPR harus menjadi pengayom bagi BPR anggota. Secara umum kerjasama lembaga *Apex* BPR juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali persaingan antara Bank Umum dan BPR pada pasar keuangan mikro.

Model kerjasama *Apex* BPR telah diterapkan oleh berbagai negara. India merupakan salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan model kerjasama *Apex* BPR. Di negara tersebut, keberadaan badan *Apex* yang fokus terhadap pembiayaan mikro dilaksanakan oleh National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Lembaga ini mempunyai mandat untuk memfasilitasi aliran kredit untuk mendorong dan mengembangkan sektor pertanian rakyat, UKM, industri pedesaan, kerajinan, dan kegiatan-kegiatan produktif masyarakat pedesaan lainnya. Selain itu NABARD juga dapat mengevaluasi dan memeriksa BPR mitra, serta memberikan pelatihan dan fasilitas riset untuk BPR dan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dengan wewenang tersebut, NABARD dianggap sukses dalam mendorong *linkage programme* serta meningkatkan akses masyarakat kecil dan pedesaan terhadap perbankan.

Secara lengkap, model *Apex* BPR disusun oleh BI dalam Buku *Generic Model Apex* BPR. Buku tersebut dapat memberikan panduan dan pemahaman bagi industri perbankan dan masyarakat mengenai kerjasama *Apex* BPR. Selain itu, buku tersebut berisi pedoman umum dalam menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional *Apex* BPR. Untuk tahap awal, buku *Generic Model Apex* BPR ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan *Apex* BPR bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bertindak sebagai *Apex*. Ini sebagai tindak lanjut atas pencanangan program BPD *Regional Champion* (BRC) pada tanggal 21 Desember 2010 yang lalu. Terkait hal tersebut peran BPD terus ditingkatkan untuk menjadi *agent of regional development*. Untuk edisi selanjutnya, akan

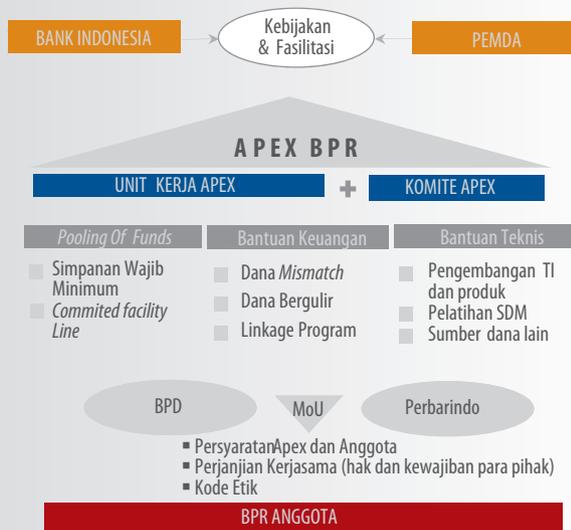


Diagram 1. Model Kerjasama Apex BPR

dikaji kemungkinan model Apex BPR dimana bank umum selain BPD bertindak sebagai Apex Bank.

Dari sisi organisasi, secara umum organisasi Apex terdiri dari 3 bagian utama yaitu pertama, bank umum sebagai Apex, yang mempersiapkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan operasional Apex, seperti penetapan satuan atau unit kerja, kantor cabang yang melayani anggota Apex, SDM pelaksanaan, *standard operating procedure* (SOP), dan teknologi informasi. Kedua, BPR sebagai anggota Apex. Dan yang terakhir adalah Komite Apex yang terdiri dari bank umum, perwakilan dewan pengurus daerah Perbarindo, dan dewan pengurus komisiariat Perbarindo.

MODEL BISNIS BPR

Kebijakan berikutnya adalah penerbitan buku Model Bisnis BPR yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola BPR pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Buku tersebut disusun untuk menjadi referensi bagi calon investor yang berminat untuk mendirikan BPR serta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan bagi BPR yang sudah ada. Selain itu, buku Model Bisnis BPR juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Manfaat yang dimaksud antara lain memberikan gambaran yang jelas mengenai proses bisnis BPR sehingga dapat mengenal hal-hal yang terkait dengan BPR.

Penyusunan buku Model Bisnis BPR dilakukan melalui observasi yang mendalam terhadap praktek industri BPR. Dalam observasi tersebut, dipilih BPR-BPR yang memiliki kinerja lebih baik dibanding BPR lainnya dan mampu meningkatkan bisnisnya secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Periode pengamatan tersebut dipandang cukup panjang untuk menilai perilaku dan kinerja BPR yang sukses tersebut, sekaligus menangkap dinamikanya di dalam siklus perekonomian.

Hasil analisis terhadap berbagai keberhasilan pengelolaan BPR diurai sebagai aspek-aspek keberhasilan usaha BPR secara umum. Aspek-aspek keberhasilan itulah yang disajikan dalam Model Bisnis BPR ini sebagai acuan umum bagi pendirian BPR baru maupun pengelolaan BPR yang sudah ada. Berdasarkan analisis ini tolok ukur keberhasilan BPR meliputi aspek kepemilikan, permodalan, lokasi,

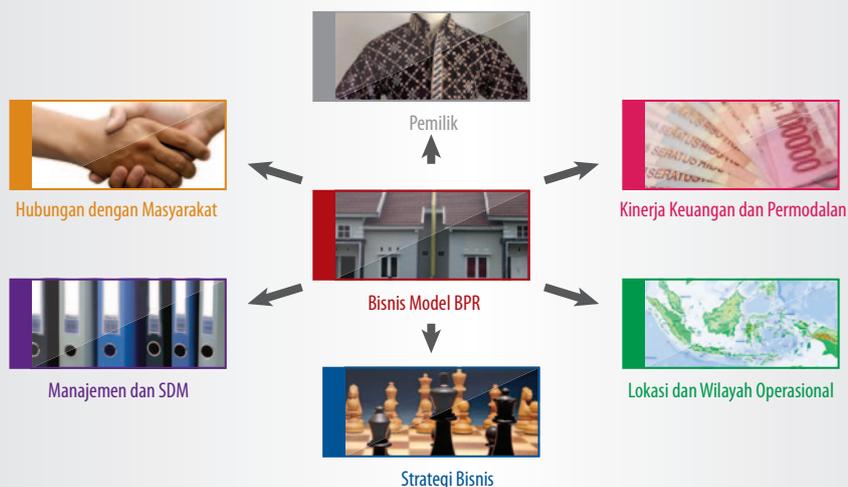


Diagram 2. Model Bisnis BPR Ideal

strategi bisnis, dan sumber daya manusia serta hubungan kemasyarakatan.

Kepemilikan

Idealnya BPR dimiliki oleh anggota masyarakat yang berasal dari daerah asal serta memiliki komitmen untuk mendorong pengelolaan BPR secara sehat dan mendapat keuntungan yang wajar guna menjamin keberlanjutan BPR sejalan dengan perkembangan usaha masyarakat sekitarnya.

Permodalan

Pemilik BPR diharapkan mempunyai kemampuan dan komitmen dalam memasok modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan operasional BPR serta penyaluran kredit.

Lokasi dan Wilayah Operasional

Pemilihan lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi ekonomi daerah, tingkat persaingan, serta kemudahan aksesibilitas masyarakat kecil terutama di pedesaan maupun kalangan pengusaha UMKM.

Strategi Bisnis

Perlunya strategi bisnis yang tepat agar bisnis BPR dapat tumbuh dan berkembang, antara lain meliputi: (i) fokus pada pembiayaan skala mikro dan kecil yang sudah dikenal baik; (ii) pemberian tingkat suku bunga kredit yang kompetitif dan terjangkau; (iii) prosedur pelayanan yang cepat dan mudah namun tetap berhati-hati dengan tetap memantau perkembangan usaha nasabah melalui komunikasi dan silaturahmi; dan (iv) mempersiapkan dukungan operasional BPR seperti teknologi informasi (TI) serta jaringan kantor.

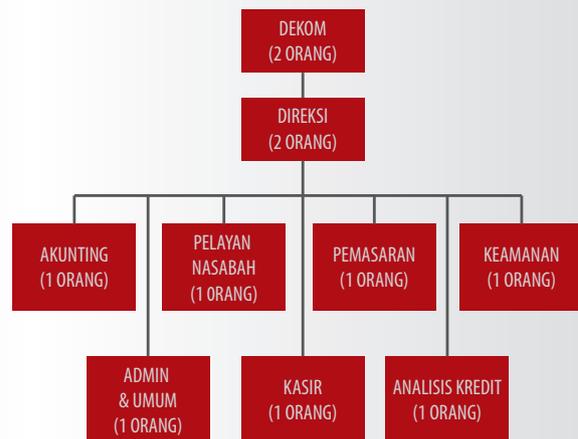


Diagram 3. Struktur organisasi ideal BPR

Manajemen dan Kebijakan SDM.

BPR yang sukses dikelola oleh SDM yang mumpuni dengan kriteria berikut: (i) berintegritas serta profesional; (ii) pemahaman terhadap potensi usaha, karakteristik wilayah dan masyarakat yang akan dilayani; (iii) mengutamakan calon pegawai yang berasal dari daerah di mana BPR tersebut berada terkait pemahaman kebiasaan, budaya, karakteristik masyarakat setempat; (iv) estimasi jumlah SDM dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung operasional BPR secara tepat dengan model struktur organisasi BPR.

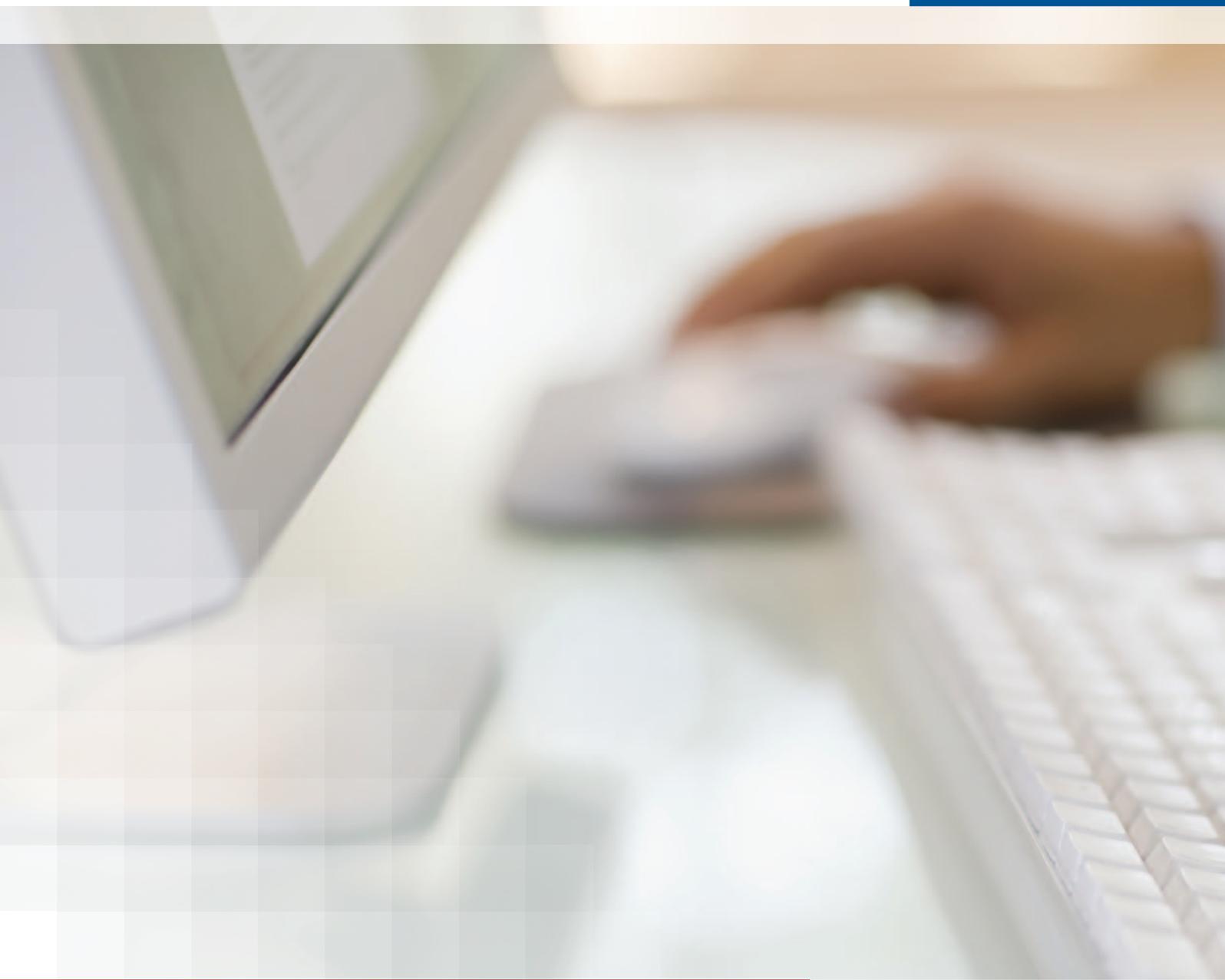
Hubungan dengan Masyarakat

Kemampuan untuk membaur dan menjadi bagian dari masyarakat setempat merupakan salah satu kunci sukses sebuah BPR. Hal ini penting dalam membangun relasi dan ikatan batin melalui keterlibatan BPR dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, misalnya, hari raya keagamaan, perayaan hari besar dan hajatan nasabah.



Bab IX

KEBIJAKAN DAN KINERJA SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGEDARAN UANG



KEBIJAKAN DAN KINERJA SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGEDARAN UANG



Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diarahkan untuk memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman dan efisien. Hal tersebut menjadi penting karena sistem pembayaran memiliki peran yang strategis untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran ditempuh melalui penataan infrastruktur sistem pembayaran yang antara lain mencakup standarisasi Kartu ATM/Debet Berbasis Chip, penyempurnaan ketentuan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), tahapan Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, dan pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway-NPG). Melalui kebijakan dimaksud, kinerja sistem pembayaran pada tahun 2011 turut mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan perputaran uang dalam aktivitas ekonomi Indonesia melalui peningkatan transaksi pembayaran, tanpa menimbulkan kegagalan penyelesaian transaksi (nontunai).

Di bidang pengedaran uang, kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam kondisi layak edar baik dari sisi nominal maupun pecahan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui kebijakan pengembangan layanan kas di wilayah terdepan dan terpencil di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin ketersediaan uang layak edar di masyarakat secara lebih merata di seluruh Indonesia. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen kas perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan penyempurnaan ketentuan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank Indonesia. Melalui sejumlah kebijakan tersebut, kinerja pengedaran uang Bank Indonesia turut berperan dalam mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan dan memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam melakukan transaksi perekonomian yang semakin meningkat.



9.1 KEBIJAKAN DAN KINERJA SISTEM PEMBAYARAN

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Sistem pembayaran memiliki peran yang strategis untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian, peran strategis sistem pembayaran terutama menjamin terlaksananya berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diarahkan untuk memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman dan efisien. Fokus kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran selama tahun 2011 adalah peningkatan keamanan, efisiensi, penguatan infrastruktur sistem pembayaran dan interkoneksi antar infrastruktur sistem pembayaran. Hal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah semakin tingginya transaksi pembayaran yang dilakukan melalui sistem pembayaran, baik melalui Sistem BI-RTGS, SKNBI, maupun saluran pembayaran lain seperti kartu kredit, kartu ATM/debet, dan uang elektronik (*e-money*). Kebijakan dan pengembangan sistem yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama tahun 2011 adalah (i) standarisasi kartu ATM/debet berbasis *chip*; (ii) penyempurnaan ketentuan APMK; (iii) tahapan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II; (iv) peningkatan layanan pengelolaan rekening Pemerintah; (v) pengembangan NPG; dan (vi) persiapan standarisasi uang elektronik.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk meningkatkan keamanan transaksi antara lain mewajibkan penyelenggara kartu ATM/debet untuk menggunakan teknologi *chip* dan Personal Identification Number (PIN) minimal 6 (enam) digit. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi biaya investasi dan memperkuat infrastruktur teknologi industri kartu ATM/debet domestik di tengah kekuatan industri pihak asing. Saat ini, standar pemroses pada industri kartu ATM/debet masih tersegmentasi berdasarkan masing-masing prinsipal. Hal tersebut menyebabkan, perbankan sebagai penerbit kartu ATM/debet harus mengakomodir standar sesuai yang ditetapkan oleh prinsipal. Kondisi ini berdampak pada biaya investasi yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada pengenaan biaya tambahan bagi masyarakat pengguna kartu ATM/debet.

Dalam mewujudkan standarisasi tersebut, selama tahun 2011 Bank Indonesia telah melakukan serangkaian koordinasi dengan perbankan dan forum prinsipal untuk membahas pembentukan institusi yang akan berperan sebagai pengelola sertifikasi industri kartu ATM/debet. Sampai dengan akhir periode laporan, forum prinsipal sedang menyiapkan infrastruktur *Certification Body* dan *Key Management* sebagai pendukung implementasi standar teknis kartu ATM/debet berbasis *chip*. Sebagai dasar hukum dari implementasi standar teknis kartu ATM/debet berbasis *chip*, Bank Indonesia sebagai regulator telah menerbitkan ketentuan sebagai payung hukum dari kebijakan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen pada penggunaan APMK, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan APMK agar pelaku dalam industri APMK dapat lebih berhati-hati dan meningkatkan aspek perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan APMK. Pokok-pokok penyempurnaan mencakup aturan mengenai kerjasama penyelenggara APMK dengan pihak lain, khususnya dengan perusahaan yang melaksanakan penagihan kartu kredit, serta persyaratan yang lebih selektif untuk memperoleh kartu kredit.

Dari sisi penguatan infrastruktur, Bank Indonesia menempuh kebijakan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Pada tahun 2011, Bank Indonesia telah mulai melakukan pengembangan aplikasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan performa layanan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS yang

ada saat ini. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini, seperti peningkatan efisiensi, layanan, dan kemampuan mitigasi risiko melalui pengembangan sistem yang merujuk pada praktek-praktek yang lazim dilakukan secara internasional. Penyediaan fitur *advanced liquidity management services* yang membantu pengelolaan likuiditas menjadi lebih efisien juga diakomodir dalam pengembangan ini. Selain itu penggunaan *standard platforms* dalam pengembangan ini dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan transaksi domestik maupun lintas batas sebagai persiapan menghadapi kondisi perekonomian yang semakin terintegrasi. Dari sisi penyediaan informasi, pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II ditujukan untuk menyediakan informasi yang bersifat segera (*real-time*) guna mendukung pelaksanaan fungsi Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Untuk meningkatkan layanan pengelolaan rekening Pemerintah, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan Sistem Bank Indonesia *Government e-Banking* (BIG-eB). Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui penambahan fungsi pada aplikasi Sistem BIG-eB dan *on-line* transaksi untuk rekening tertentu pemerintah. Selain membantu dalam pengelolaan rekening pemerintah, hal ini sekaligus memudahkan pengelolaan keuangan negara. Selama tahun 2011, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) – Kementerian Keuangan RI untuk membahas persiapan interkoneksi proses bisnis dan teknologi informasi. Koordinasi tersebut ditujukan untuk mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan RI yang akan diimplementasikan pada tahun 2012.

Pengembangan SPAN akan berdampak pada perubahan beberapa proses bisnis di Kementerian Keuangan RI, sehingga perlu adanya sinkronisasi sistem dan kebijakan di sisi Bank Indonesia sebagai pengelola rekening pemerintah. Dalam kaitan ini, penyempurnaan Sistem BIG-eB juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah terhadap perluasan fasilitas konektitas antara SPAN dan Sistem BIG-eB.

Untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia menempuh upaya untuk mengembangkan NPG. Pengembangan NPG tersebut menitikberatkan pada upaya untuk mengarahkan industri sistem pembayaran bekerjasama menciptakan *standard platform* sistem atau infrastruktur yang dapat

digunakan bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi secara nasional, sehingga investasi dapat dialokasikan untuk memperluas akses ke daerah pelosok yang masih minim infrastruktur teknologi sistem pembayarannya. Untuk memperoleh kesamaan persepsi atas pengembangan NPG, selama tahun 2011 telah dilakukan koordinasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menyusun rencana kerja ke depan dalam rangka penyusunan usulan model NPG yang dapat disepakati oleh industri sistem pembayaran ritel Indonesia.

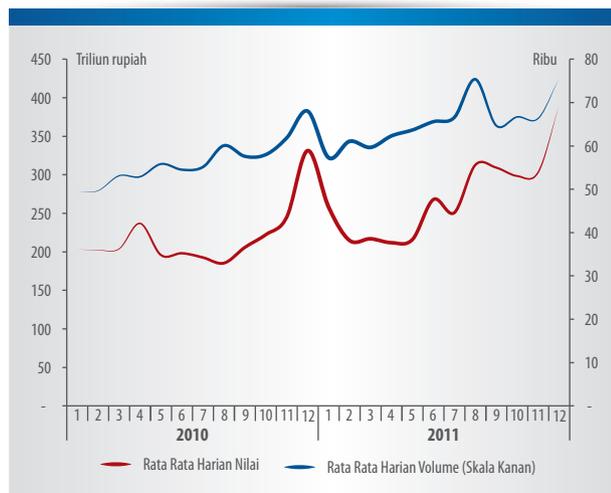
Dalam rangka meningkatkan efisiensi di sisi penyelenggaraan uang elektronik, Bank Indonesia berupaya untuk mewujudkan standardisasi uang elektronik. Dengan adanya standardisasi uang elektronik diharapkan dapat mempermudah interoperabilitas antar penyelenggara uang elektronik. Selama tahun 2011, upaya untuk mewujudkan interoperabilitas uang elektronik terfokus pada meningkatkan koordinasi dengan otoritas terkait dan memfasilitasi pihak industri. Koordinasi dengan otoritas terkait terutama dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Bank Indonesia dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Penyusunan Kebijakan dan Standar Interkoneksi dan Interoperabilitas Uang Elektronik di Sektor Transportasi.

Selain itu, dalam rangka persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Bank Indonesia berperan aktif dalam forum *Working Committee on Payment and Settlement Systems* (WC-PSS) melalui berbagai kegiatan dan koordinasi dengan negara ASEAN. Implementasi MEA pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkatkan volume dan nilai transaksi ekonomi lintas batas kawasan ASEAN (*intra-ASEAN cross-border transactions*). Peran aktif Bank Indonesia dan bank sentral negara ASEAN dalam wadah WC-PSS merupakan langkah awal dalam menilai kesiapan sistem pembayaran dan setelmen ASEAN dalam rangka mendukung integrasi keuangan ASEAN. Hal tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan sistem pembayaran dan setelmen yang efisien dan aman di tingkat regional ASEAN merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang kelancaran aktivitas ekonomi antarnegara ASEAN tersebut.

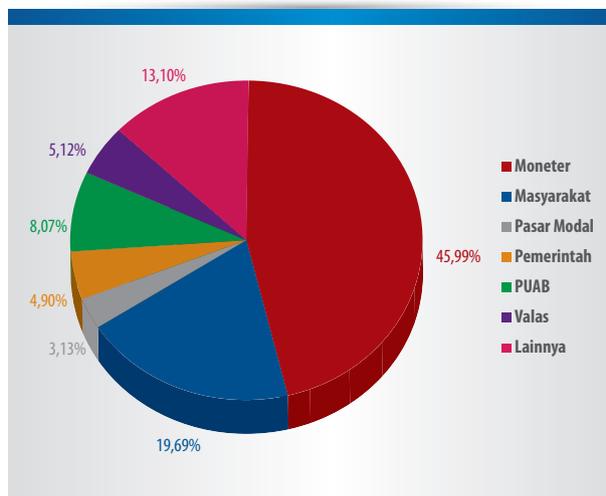
WC-PSS yang dibentuk sejak tahun 2010 telah menyusun beberapa kajian dan rekomendasi kebijakan, baik untuk pengembangan sistem pembayaran dan setelmen maupun untuk koordinasi dalam rangka harmonisasi sistem pembayaran dan setelmen di kawasan ASEAN. Selama tahun 2011, WC-PSS telah merumuskan prioritas rekomendasi kebijakan dalam pengembangan dan harmonisasi sistem pembayaran dan setelmen ASEAN untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah mendapatkan persetujuan dalam ASEAN *Central Bank Governors Meeting* (ACGM) pada bulan April 2011. Prioritas rekomendasi kebijakan tersebut yaitu: (i) mendorong penggunaan *common standard* yang memungkinkan terciptanya interoperabilitas dan *interlinkage* di antara berbagai instrumen dan infrastruktur sistem pembayaran; (ii) meningkatkan penggunaan infrastruktur sistem pembayaran yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis; dan (iii) menjajagi kemungkinan pengembangan interkoneksi antar sistem pembayaran di ASEAN yang dapat mendukung terciptanya sistem pembayaran lintas batas negara yang lebih cepat.

KINERJA SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja sistem pembayaran meningkat dibandingkan dengan tahun 2010. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi perekonomian Indonesia yang tetap kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Kinerja sistem pembayaran yang meningkat tercermin dari nilai transaksi tahun 2011 yang tumbuh 23,20% mencapai Rp71,56 ribu triliun dibandingkan dengan tahun 2010. Volume transaksi juga meningkat sebesar 22,66% menjadi 2,63 miliar transaksi dibandingkan dengan tahun 2010. Total nilai transaksi



Grafik 9.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS



Grafik 9.2 Pangsa Nilai Transaksi BI-RTGS

pembayaran melalui berbagai sistem pembayaran yang ada di Indonesia selama tahun 2011 mencapai 9,63 kali dari nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2011. Jumlah total transaksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 9,02 kali dari nilai PDB Indonesia tahun 2010.

Aktivitas transaksi pembayaran melalui Sistem BI-RTGS meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 9.1).¹ Nilai transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada tahun 2011 mencapai Rp66,93 ribu triliun atau naik sebesar 23,55% dibandingkan dengan tahun 2010. Volume transaksi tercatat sebanyak 16,16 juta transaksi atau naik sebesar 15,51% dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian, rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS sepanjang tahun 2011 mencapai nilai Rp270,96 triliun dengan volume sebesar 65,45 ribu transaksi.

Peningkatan nilai transaksi melalui BI-RTGS terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi pengelolaan moneter yang memiliki pangsa 45,99% dari total nilai transaksi BI-RTGS (Grafik 9.2). Nilai transaksi pengelolaan moneter tahun 2011 meningkat sebesar 33,23% dibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan peningkatan kegiatan pengelolaan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

1 BI-RTGS merupakan sistem pembayaran untuk memproses transfer dana antarbank yang bernilai besar dan bersifat segera (*time critical*), penyelesaian atas transaksi di pasar keuangan, hasil operasi moneter oleh Bank Indonesia, dan hasil kliring dari transaksi pembayaran antarbank.

Tabel 9.1 Tabel Perkembangan Jenis Transaksi BI-RTGS

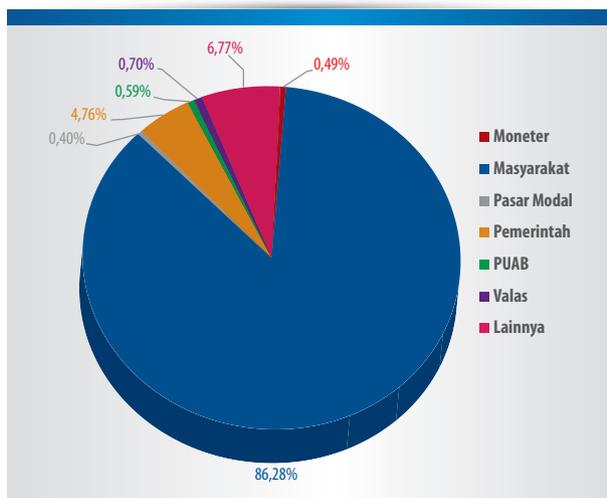
Jenis Transaksi BI-RTGS	Nilai (Triliun)		
	2010	2011	% Pertumbuhan
PUAB	4.723,21	5.403,79	14,41%
Masyarakat	10.558,10	13.176,74	24,80%
Transaksi valas	3.290,60	3.425,24	4,09%
Setelmen pasar modal	2.362,95	2.097,71	-11,23%
Transaksi pemerintah	2.507,08	3.276,34	30,68%
Pengelolaan Moneter	23.104,42	30.782,68	33,23%
Lainnya	7.623,39	8.764,89	14,97%
Total	54.169,75	66.927,38	23,55%

Jenis Transaksi BI-RTGS	Volume		
	2010	2011	% Pertumbuhan
PUAB	97,432	95,585	-1,90%
Masyarakat	11.553.796	13.948.983	20,73%
Transaksi valas	133,786	112,852	-15,65%
Setelmen pasar modal	60,372	65,444	8,40%
Transaksi pemerintah	841,071	769,957	-8,46%
Pengelolaan Moneter	81,068	78,552	-3,10%
Lainnya	1,227835	1,094.973	-10,82%
Total	13.995.360	16.166.346	15,51%

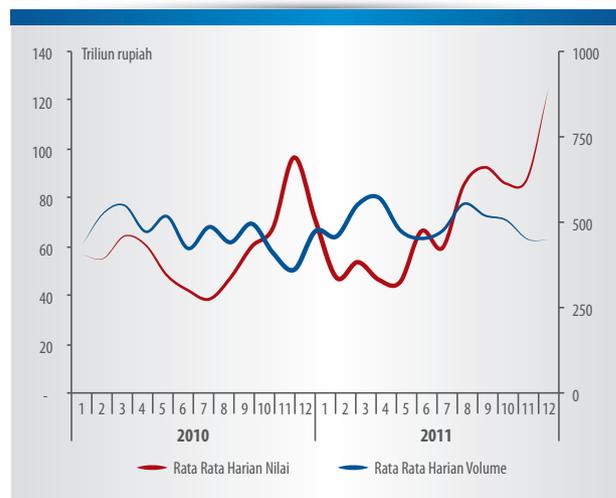
Volume transaksi melalui BI-RTGS didominasi oleh transaksi masyarakat dengan pangsa 86,28% dari total volume transaksi BI-RTGS (Grafik 9.3). Volume transaksi masyarakat di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 20,73% dibandingkan dengan tahun 2010 (Tabel 9.1). Peningkatan volume transaksi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa transfer dana melalui BI-RTGS merupakan alternatif sistem pembayaran selain transfer melalui SKNBI dan APMK. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat

membutuhkan sistem transfer dana yang lebih cepat. Dari perspektif efisiensi sistem pembayaran, Sistem BI-RTGS mendukung percepatan penyelesaian transaksi dan efisiensi dari sisi waktu.

Aktivitas pembayaran melalui Sistem BI-RTGS yang meningkat juga didukung oleh keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS. Hal tersebut diukur dari persentase penyelesaian transaksi (*settled*), ketersediaan (*availability*) sistem, dan kedisiplinan



Grafik 9.3 Pangsa Volume Transaksi BI-RTGS



Grafik 9.4 Perkembangan Transaksi BI-SSSS

dalam memenuhi jadwal atau *window time* Sistem BI-RTGS. Keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS selama tahun 2011 ditunjukkan dengan tidak terjadinya kondisi gangguan pada sistem yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian transaksi.

Transaksi melalui BI-SSSS menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 9.4).² Nilai transaksi melalui BI-SSSS pada tahun 2011 mencapai Rp17,86 ribu triliun atau meningkat sebesar 35,41% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 122,17 ribu transaksi atau meningkat sebesar 15,07% dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-SSSS tahun 2011 mencapai nilai Rp72,30 triliun dengan volume sebesar 495 transaksi.

Instrumen pembayaran nontunai yang semakin beragam mendukung perkembangan sistem pembayaran ritel. Hal ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien, aman, nyaman dan cepat. Pesatnya perkembangan instrumen pembayaran yang berbasis teknologi secara berangsur mendorong masyarakat untuk beralih menuju pembayaran nontunai (*non-cash*), khususnya di kota-kota besar, meskipun penggunaan fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan semakin meningkatnya aktivitas transaksi melalui sistem pembayaran ritel di Indonesia, kondisi *less cash society* dapat segera tercapai.

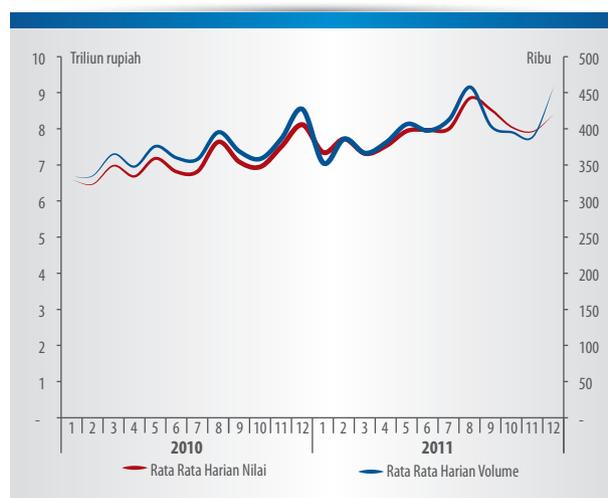
Peran sistem pembayaran ritel dalam mendukung aktivitas perekonomian semakin besar didukung oleh pesatnya perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi. Nilai transaksi melalui sistem pembayaran ritel (SKNBI, APMK, dan Uang Elektronik) selama tahun 2011 mencapai Rp4,63 ribu triliun atau meningkat 18,34% dibandingkan dengan tahun 2010. Volume transaksi selama 2011 juga meningkat mencapai 2,61 miliar transaksi atau tumbuh 22,70% dibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan transaksi melalui sistem pembayaran ritel, terutama APMK telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Peningkatan transaksi APMK tersebut sejalan dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan perputaran uang (*velocity of money*).

2 BI-SSSS merupakan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi serta menatausahakan surat berharga dan instrumen operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia.

Peran sistem pembayaran ritel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi masyarakat semakin meningkat. Perkembangan ini tercermin dari total nilai transaksi pembayaran melalui sistem pembayaran ritel di Indonesia pada 2011 yang mencapai 1,14 kali dari nilai konsumsi masyarakat, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 1,07 kali.

Aktivitas transaksi melalui SKNBI pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 9.5). Nilai transaksi melalui SKNBI pada tahun 2011 mencapai Rp1,97 ribu triliun atau naik sebesar 12,75% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 99,18 juta transaksi atau naik sebesar 9,03% dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui SKNBI tahun 2011 mencapai nilai Rp7,95 triliun dengan volume sebesar 399,92 ribu transaksi. Peningkatan nilai transaksi SKNBI melalui penggunaan cek dan bilyet giro memperlihatkan bahwa cek dan bilyet giro masih menjadi instrumen pembayaran pilihan masyarakat, khususnya bagi dunia usaha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa instrumen cek dan bilyet giro memperlancar aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Aktivitas transaksi melalui APMK pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 9.6). Nilai transaksi melalui APMK pada tahun 2011 mencapai Rp2,66 ribu triliun atau naik sebesar 22,84% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 2,47 miliar transaksi atau naik sebesar 22,90% dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui APMK tahun 2011 mencapai nilai Rp7,29 triliun



Grafik 9.5 Perkembangan Transaksi SKNBI

9.2 KEBIJAKAN DAN KINERJA PENGEDARAN UANG

KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG

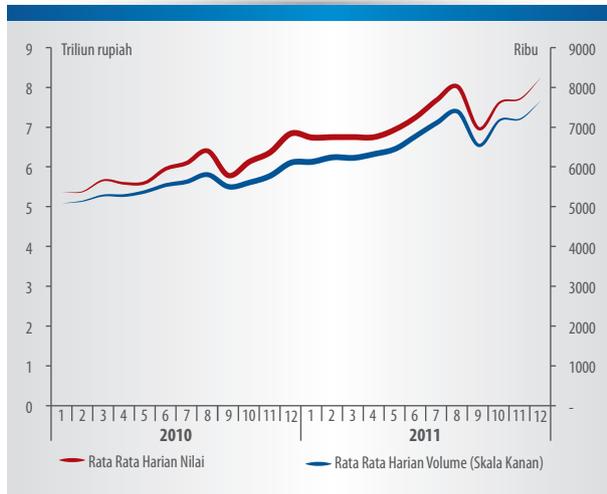
Pengedaran uang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran transaksi perekonomian. Peran tersebut terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan uang kartal sebagai salah satu alat pembayaran di masyarakat.

Kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang kartal dengan memperhatikan berbagai faktor strategis. Beberapa faktor strategis dalam menetapkan kebijakan pengedaran uang antara lain adalah pertumbuhan ekonomi dan pilihan masyarakat untuk memegang fisik uang dalam kegiatan transaksi. Faktor strategis lain adalah perlunya peningkatan kualitas dan unsur pengaman uang serta ketersediaan uang layak edar secara lebih merata di seluruh Indonesia. Selain itu, pemberlakuan UU No.7 tentang Mata Uang pada akhir bulan Juni 2011 yang memperjelas kewenangan BI dalam pengedaran uang, juga menjadi perhatian Bank Indonesia mengingat hal tersebut perlu disertai dengan penyesuaian terhadap strategi manajemen pengedaran uang secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2011, Bank Indonesia menempuh kebijakan pengedaran uang yang mengacu pada tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut yaitu i) peningkatan kualitas uang yang beredar dan pemenuhan permintaan uang sesuai kebutuhan; ii) peningkatan efisiensi operasional kas di Bank Indonesia dan perbankan; dan iii) peningkatan layanan kas Bank Indonesia kepada masyarakat dengan mengikutsertakan peran perbankan dan instansi terkait.

Peningkatan Kualitas Uang dan Pemenuhan Permintaan Uang Sesuai Kebutuhan

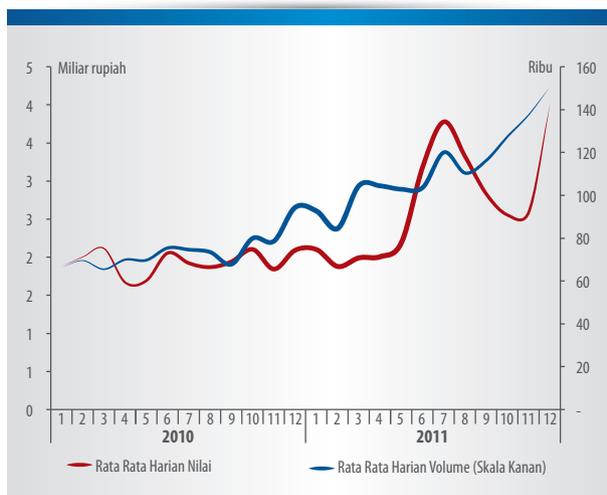
Upaya peningkatan kualitas uang dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi tersebut meliputi diseminasi standar uang layak edar bekerjasama dengan perusahaan *Cash in Transit* (CIT) dan perbankan, survei pemantauan kualitas uang, peningkatan pengamanan uang melalui peningkatan unsur pengaman pada uang kertas (UK) pecahan Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000, dan peningkatan efektivitas penanggulangan uang palsu.



Grafik 9.6 Perkembangan Transaksi APMK

dengan volume sebesar 6,77 juta transaksi. Peningkatan transaksi APMK selain didorong oleh kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Aktivitas transaksi menggunakan uang elektronik pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 9.7). Nilai transaksi menggunakan Uang Elektronik pada tahun 2011 mencapai Rp981,30miliar atau naik sebesar 41,51% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 41,06 juta transaksi atau naik sebesar 54,70% dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Uang Elektronik pada tahun 2011 mencapai nilai Rp2,69 miliar dengan volume sebesar 112,49 ribu transaksi.



Grafik 9.7 Perkembangan Transaksi E-Money

Kegiatan survei pemantauan kualitas uang yang beredar dilakukan di wilayah Kantor Pusat (KP) dan 9 Kantor Koordinator Bank Indonesia (KKBI) yang meliputi 30 Kabupaten/Kota dengan jumlah responden sebanyak 1.231. Berdasarkan survei tersebut, diperoleh informasi antara lain bahwa secara umum semakin besar pecahan uang, kondisi fisik uang yang beredar semakin baik kualitasnya; tingkat harapan responden yang lebih tinggi dari kondisi riil uang yang beredar untuk pecahan di atas Rp10.000; serta semakin jauh lokasi dari KBI, secara umum kualitas uang yang beredar semakin lusuh.

Dalam rangka pengkinian atau penyempurnaan unsur pengaman uang, Bank Indonesia mengubah sebagian elemen desain (*upgrading*) uang rupiah pecahan Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Sebagai payung hukum pengeluaran dan pagedaran uang pecahan tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) penerbitan ketiga pecahan dimaksud pada tanggal 1 Agustus 2011. Adapun pagedaran perdana ketiga pecahan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011.

Dalam upaya penanggulangan uang palsu, Bank Indonesia menempuh kebijakan peningkatan efektivitas penanggulangan uang palsu yang merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan keaslian uang rupiah. Sementara upaya represif dilakukan melalui keterlibatan Bank Indonesia sebagai saksi ahli dalam kasus pidana pemalsuan uang maupun dalam Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang, bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Sementara itu, dalam rangka pemenuhan permintaan uang sesuai kebutuhan, Bank Indonesia telah menetapkan rencana pengadaan uang dan bahan uang serta rencana cetak uang tahun 2012. Rencana tersebut disusun berdasarkan formulasi rencana kebutuhan uang 2012. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan uang pada tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar 14%.

Peningkatan Efisiensi Operasional Kas di Bank Indonesia dan Perbankan

Strategi penting dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional kas dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan prosedur layanan kas kepada perbankan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen kas serta

mengoptimalkan pengolahan uang oleh perbankan. Penerapan penyempurnaan dilakukan pada awal Maret 2011 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Ketentuan Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia. Ketentuan ini memberikan akses yang lebih luas kepada bank umum dalam menyetorkan kelebihan likuiditas rupiah dengan tetap memperhatikan optimalisasi transaksi rupiah antarbank dan efisiensi pengelolaan uang di perbankan.

Strategi lainnya adalah pemantauan kegiatan pengolahan rupiah dan layanan nasabah oleh perbankan dan perusahaan *Cash in Transit* (CIT). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perbankan dan perusahaan CIT dalam memenuhi standar pengolahan uang yang ditetapkan Bank Indonesia. Pengolahan uang oleh perbankan dan perusahaan CIT memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan selama tahun 2011 meliputi 9 bank dan 6 perusahaan CIT di berbagai wilayah.

Pengembangan Layanan Kas Bank Indonesia dengan Mengikutsertakan Perbankan dan Instansi terkait

Kegiatan layanan kas Bank Indonesia dilakukan dengan melibatkan perbankan dan instansi lainnya. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui kerjasama untuk memperluas wilayah jangkauan layanan kas Bank Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dari sisi nominal maupun pecahan. Pada tahun 2011, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan layanan kas³ antara lain melalui penambahan layanan kas titipan di beberapa wilayah dan perluasan kerjasama penukaran uang kecil bagi nasabah perbankan maupun masyarakat.

Pengembangan layanan kas juga dilakukan dengan meningkatkan penyediaan uang rupiah dan layanan kas di wilayah terdepan NKRI dan daerah terpencil. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin penyediaan uang rupiah layak edar dan layanan kas serta menjaga eksistensi rupiah terutama di daerah terpencil dan wilayah perbatasan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan armada Bank Indonesia atau transportasi umum lain serta bekerjasama dengan Kepolisian Perairan (Polair) dan TNI Angkatan Laut

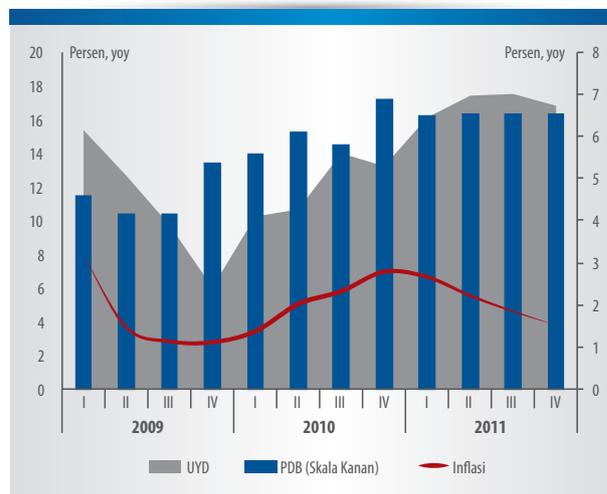
3 Layanan kas titipan merupakan salah satu layanan kas diluar kantor yang diselenggarakan di daerah tertentu dengan menunjuk salah satu bank setempat sebagai bank pengelola kas.

(TNI-AL). Kerjasama dengan Polair dilakukan di wilayah Kepulauan Seribu di Provinsi DKI, Kepulauan Sangihe Talaud di Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepulauan Natuna serta Bintang di Provinsi Riau. Sedangkan kerjasama dengan TNI-AL dilakukan di wilayah Kepulauan Ternate di Provinsi Maluku Utara, Negeri Lama di Provinsi Sumatera Utara, Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat, Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta di Berau dan Malinau di Provinsi Kalimantan Timur.

Bank Indonesia telah menempuh langkah kebijakan secara internal maupun eksternal sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang No.7/2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang tentang Mata Uang mengatur aspek mengenai macam, harga, ciri, desain, dan bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, pemberantasan rupiah palsu, pemeriksaan tindak pidana rupiah dan ketentuan tindak pidana. Berlakunya Undang-undang tersebut secara internal berdampak terhadap alur kerja dan operasional Bank Indonesia di bidang pengelolaan rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak awal semester II 2011 telah dilakukan persiapan penyempurnaan ketentuan di internal Bank Indonesia. Sementara itu secara eksternal, undang-undang tersebut mengamankan koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam hal perencanaan dan pencetakan, serta pemusnahan uang. Terkait dengan koordinasi tersebut, telah disusun draf Nota Kesepahaman yang akan diselesaikan pada semester I 2012. Selain itu, Bank Indonesia dengan pihak terkait juga berperan aktif dalam penyiapan pengaturan mengenai pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu.

KINERJA PENGEDARAN UANG

Kinerja pengedaran uang selama tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010. Perkembangan tersebut tercermin dari terpenuhinya kebutuhan uang kartal di masyarakat yang meningkat signifikan sejalan dengan perkembangan ekonomi yang membaik



Grafik 9.8 Perkembangan UYD, PDB dan Inflasi

serta masih tingginya preferensi masyarakat untuk memegang uang kartal. Kebutuhan uang kartal yang meningkat mengindikasikan peran uang kartal yang masih penting sebagai instrumen pembayaran.

Uang Kartal yang Diedarkan (UYD)

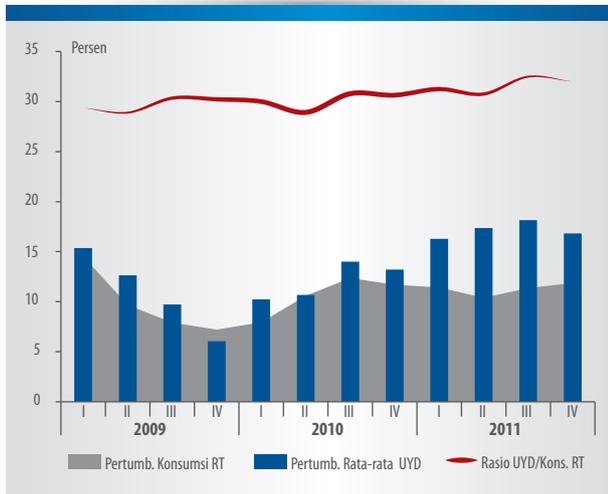
Posisi dan rata-rata UYD meningkat dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah uang kartal pada tahun 2011 mencapai Rp373,0 triliun atau meningkat 17,1% dibandingkan dengan tahun 2010 (Tabel 9.2). Peningkatan UYD terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat selama tahun 2011.

Secara rata-rata, jumlah UYD sepanjang tahun 2011 mencapai Rp320,4 triliun, atau meningkat 16,9% dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan rata-rata UYD pada tahun 2011 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 12,1% menunjukkan kebutuhan uang kartal yang meningkat sejalan dengan kinerja ekonomi yang tinggi selama tahun 2011 (Grafik 9.8).

Pertumbuhan rata-rata UYD juga lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi

Tabel 9.2 Perkembangan Posisi UYD

Periode	2010	Pertumbuhan (yoy)	2011	Pertumbuhan (yoy)
Tw I	250,6	10,6%	290,5	15,9%
Tw II	269,4	10,1%	315,5	17,1%
Tw III	288,9	5,5%	336,5	16,5%
Tw IV	318,6	14,2%	373,0	17,1%

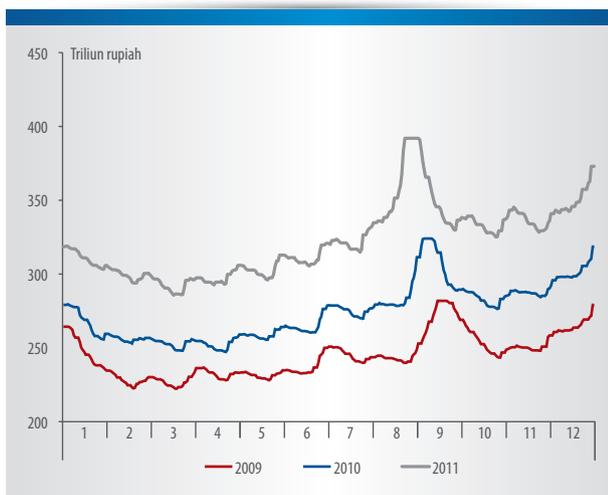


Grafik 9.9 Pertumbuhan UYD, Konsumsi RT, Rasio UYD terhadap Konsumsi RT

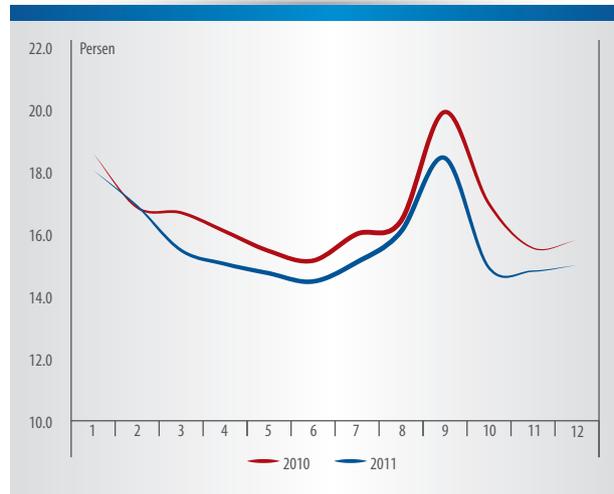
masyarakat (Grafik 9.9). Selama tahun 2011, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 11,3%, atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata UYD sebesar 16,9%. Hal ini mengindikasikan masih pentingnya penggunaan uang kartal sebagai instrumen pembayaran di masyarakat.

Dinamika perkembangan UYD masih diwarnai dengan pola musiman, antara lain hari raya keagamaan, tahun baru, dan libur sekolah (Grafik 9.10). Hal itu tercermin dari rata-rata UYD tertinggi sebesar Rp350,1 triliun yang terjadi pada bulan September pasca periode Idul Fitri dan Rp349,3 triliun pada bulan Desember bersamaan dengan hari raya Natal dan Tahun Baru.

Pangsa rata-rata UYD di perbankan cenderung menurun terutama dipengaruhi oleh implementasi



Grafik 9.10 Perkembangan UYD

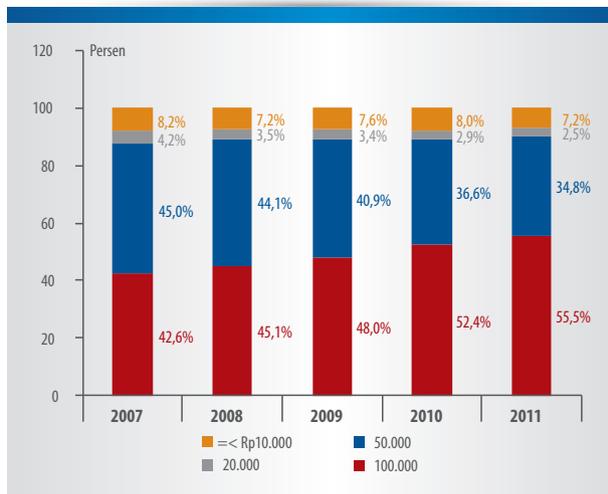


Grafik 9.11 Pangsa UYD di Perbankan

penyempurnaan kebijakan penyetoran dan penarikan uang Rupiah oleh bank umum. Sepanjang tahun 2011, pangsa rata-rata UYD di perbankan cenderung menurun meskipun sempat meningkat sebagai antisipasi atas kebutuhan uang kartal pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Rata-rata pangsa UYD diperbankan pada tahun 2011 sebesar 15,8%, menurun dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 16,6%. Penurunan pangsa di perbankan tersebut diikuti dengan kenaikan pangsa UYD di masyarakat menjadi 84,2% pada tahun 2011 dari 83,4% pada tahun 2010 (Grafik 9.11).

Pangsa rata-rata UYD di perbankan yang menurun merupakan dampak dari penyesuaian manajemen kas yang dilakukan perbankan terkait dengan implementasi penyempurnaan ketentuan penyetoran dan penarikan oleh bank umum di Bank Indonesia yang berlaku pada awal bulan Maret 2011. Melalui kebijakan tersebut, Bank Indonesia memberikan akses yang lebih luas kepada perbankan untuk menyetorkan kelebihan likuiditas rupiah ke Bank Indonesia.

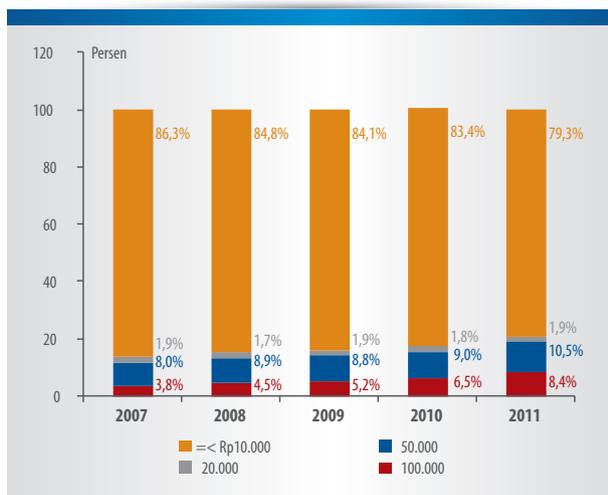
Secara nominal, UYD per pecahan didominasi oleh uang pecahan besar (Rp20.000 ke atas), sedangkan berdasarkan jumlah bilyet atau keping sebagian besar merupakan uang pecahan kecil. Berdasarkan nominal UYD, pangsa Uang Pecahan Besar (UPB) mencapai 92,8% dengan komposisi pangsa pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000 masing-masing sebesar 55,5%; 34,8%; dan 2,5% (Grafik 9.12). Sementara itu, berdasarkan jumlah lembar/keping, pangsa UPB mencapai 20,8% dengan pangsa pecahan Rp100.000 mencapai 8,4%, sedangkan pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 masing-masing 10,5% dan 1,9% dari total



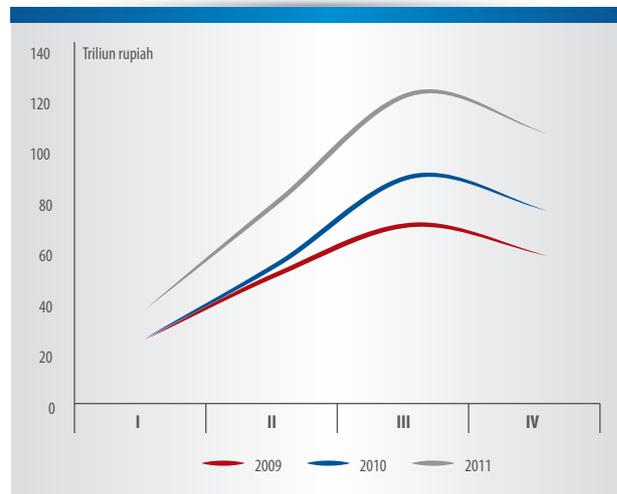
Grafik 9.12 Pecahan UYD Berdasarkan Nominal

lembar/keping UYD (Grafik 9.13). Adapun pangsa Uang Pecahan Kecil (UPK) terbesar adalah uang logam pecahan Rp100 dan Rp50 yang mencapai 18,5% dan 17,6% dari total lembar/keping UYD.

Pangsa UYD pecahan Rp100.000 secara nominal menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan nominal UYD, tren peningkatan pecahan Rp100.000 diikuti dengan tren penurunan pecahan Rp50.000, sedangkan pecahan lain relatif tidak berubah. Peningkatan pecahan Rp100.000 secara nominal diikuti dengan tren peningkatan pangsa pecahan tersebut berdasarkan jumlah lembar. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan uang Rupiah dalam bentuk pecahan terbesar yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan.



Grafik 9.13 Pecahan UYD Berdasarkan Lembar/Keping

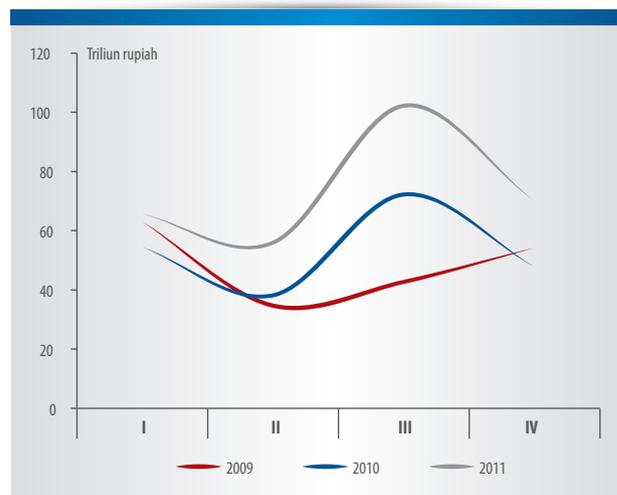


Grafik 9.14 Perkembangan Outflow

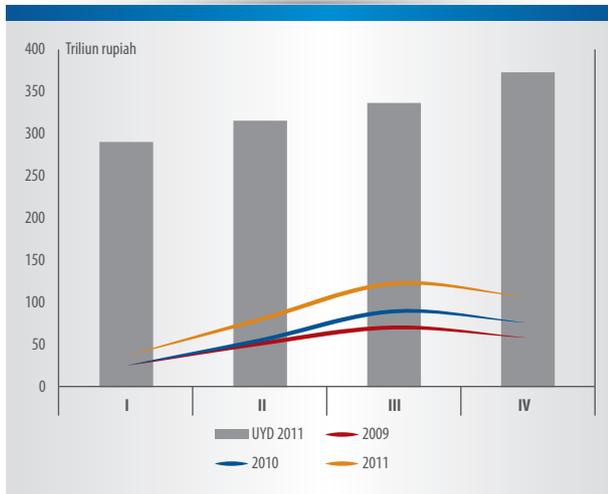
Pangsa uang kertas (UK) dan uang logam (UL) yang diedarkan relatif tidak mengalami perubahan. Pangsa UK yang diedarkan pada akhir tahun 2011 sebesar 99,0%, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 98,9% dari total UYD.

Aliran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan. Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) dan aliran masuk ke BI (*inflow*) selama tahun 2011 masing-masing sebesar Rp347,6 triliun dan Rp293,4 triliun atau meningkat 40,6% dan 39,1% dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan aliran keluar uang kartal dan aliran masuk uang kartal tersebut diikuti dengan pola fluktuasi aliran keluar uang kartal dan aliran masuk uang kartal yang relatif tidak



Grafik 9.15 Perkembangan Inflow



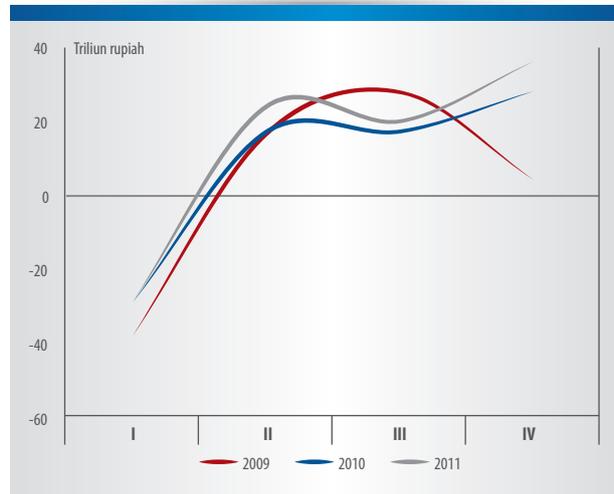
Grafik 9.16 Aliran Keluar Uang Kartal dan UYD

berbeda dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 9.14 dan Grafik 9.15).

Selain dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang meningkat, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan pengedaran uang. Dari sisi aliran keluar uang kartal (*outflow*), kenaikan aliran keluar uang kartal sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat dan preferensi masyarakat dalam memegang fisik uang dalam transaksi ekonomi mereka (Grafik 9.16). Sementara itu, dari sisi aliran masuk uang kartal (*inflow*), kenaikan aliran masuk uang kartal terutama dipicu oleh implementasi penyempurnaan ketentuan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh perbankan di Bank Indonesia pada awal Maret 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank umum dapat menyetorkan uang tidak layak edar (UTLE) maupun uang layak edar (ULE) guna mengurangi kelebihan likuiditas mereka. Setoran bank umum ke Bank Indonesia dalam bentuk UTLE dan ULE ini telah mendorong kenaikan aliran masuk uang kartal sepanjang tahun 2011.

Sebagian besar uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia ditujukan untuk memenuhi penarikan perbankan. Sepanjang tahun 2011, pangsa penarikan bank mencapai 94,9% terhadap total aliran keluar uang kartal. Kelancaran pemenuhan uang kartal, baik secara nominal maupun pecahan, turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi kinerja sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

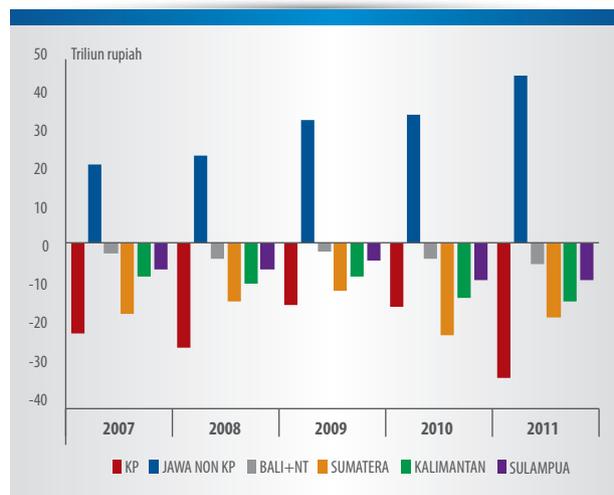
Sepanjang tahun 2011, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia ditandai dengan jumlah aliran keluar



Grafik 9.17 Net Outflow

uang kartal yang lebih tinggi dibandingkan dengan aliran masuk uang kartal (*net outflow*). Kondisi ini tercermin dari *net outflow* aliran uang kartal melalui Bank Indonesia yang meningkat 49,2% dibandingkan dengan tahun 2010 menjadi Rp54,2 triliun (Grafik 9.17). Hal tersebut mencerminkan kebutuhan uang kartal yang meningkat seiring dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Perkembangan *net outflow* berdasarkan daerah relatif tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2011, *net outflow* terjadi di Kantor Pusat (KP) dan wilayah KBI lainnya, khususnya di luar pulau Jawa. Net outflow di Kantor Pusat (KP) meningkat dari Rp17,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp38,6 triliun pada tahun 2011. Sebaliknya, *net inflow* terjadi di wilayah Jawa di luar Kantor Pusat BI, dengan tren yang meningkat (Grafik 9.18).



Grafik 9.18 Perkembangan Net Outflow KP dan KBI

Fenomena pola *net flow* tersebut mencerminkan masih tingginya preferensi masyarakat di luar Jawa dan KP untuk menarik uang kartal dari perbankan dan mengalirkan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Kondisi tersebut juga menunjukkan sumber daya ekonomi yang masih terpusat di Jawa meskipun perekonomian di luar pulau Jawa mulai berkembang.

Posisi Kas Bank Indonesia

Kebutuhan uang kartal meningkat, namun rasio kecukupan kas masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari rasio posisi kas tahun 2011 yang mencapai 3,2 bulan rata-rata aliran keluar uang kartal. Rasio ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 5,9 bulan rata-rata aliran keluar uang kartal. Penurunan rasio ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata aliran keluar uang kartal seiring dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal oleh masyarakat dan perbankan. Pada tahun 2011, jumlah posisi kas Bank Indonesia terendah mencapai rasio 2,7 bulan rata-rata aliran keluar uang kartal yang terjadi pada bulan Agustus bersamaan dengan periode Idul Fitri. Adapun posisi kas tertinggi mencapai sebesar 7,1 bulan rata-rata aliran keluar uang kartal yang terjadi pada bulan Februari 2011.

Komposisi pecahan posisi kas didominasi uang pecahan besar (Rp20.000 keatas). Komposisi uang pecahan besar (UPB) mencapai 82,7% dari total posisi kas Bank Indonesia. Uang pecahan besar tersebut sebagian besar adalah uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masing-masing mencapai 50,6% dan 21,0% dari total posisi kas BI.

Pemusnahan Uang

Kegiatan pemusnahan uang dilakukan dalam rangka meningkatkan standar kualitas uang yang dapat diedarkan kembali ke masyarakat (*clean money policy*). Sejalan dengan upaya tersebut, pada tahun 2011 jumlah pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) meningkat sebesar 17,7% dibandingkan dengan tahun 2010. Demikian pula dengan jumlah lembar/keping uang yang dimusnahkan meningkat sebesar 19,6% dari 4,9 miliar menjadi 5,9 miliar lembar/keping pada tahun 2011. Peningkatan jumlah pemusnahan uang dalam *rangka clean money policy* ini sejalan dengan

dengan tingginya aliran masuk uang dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*Inflow*).

Berdasarkan wilayahnya, jumlah pemusnahan uang tertinggi terdapat di wilayah Jawa (non KP) dan Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) masing-masing sebesar 46,3% dan 19,8%. Tingginya pemusnahan uang di wilayah Jawa (non KP) sejalan dengan pola aliran yang cenderung *net inflow*.

Rasio pemusnahan uang terhadap *inflow* sepanjang tahun 2011 menurun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ratio pemusnahan terhadap *inflow* tahun 2011 menurun dari 65,2% menjadi 55,1%. Penurunan rasio tersebut disebabkan peningkatan jumlah *inflow* menyusul penerapan penyempurnaan ketentuan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank Indonesia.

Perkembangan Temuan Uang Palsu

Jumlah temuan uang palsu menurun pada tahun 2011. Jumlah temuan uang palsu tahun 2011 menurun 42,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010. Berbagai strategi kebijakan dalam menanggulangi uang palsu baik secara preventif maupun represif telah berhasil menekan upaya pemalsuan uang rupiah. Upaya preventif tersebut dilakukan dengan memberikan informasi tentang pemalsuan uang dan keaslian uang rupiah kepada masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui kerjasama dengan POLRI.

Temuan jumlah uang palsu yang menurun diikuti dengan penurunan rasio temuan uang palsu. Sejalan dengan penurunan jumlah uang palsu, rasio temuan uang palsu selama tahun 2011 tercatat 10 lembar temuan uang palsu per satu juta lembar uang kertas yang diedarkan. Rasio tersebut jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 20 lembar temuan uang palsu per satu juta lembar uang kertas yang diedarkan.

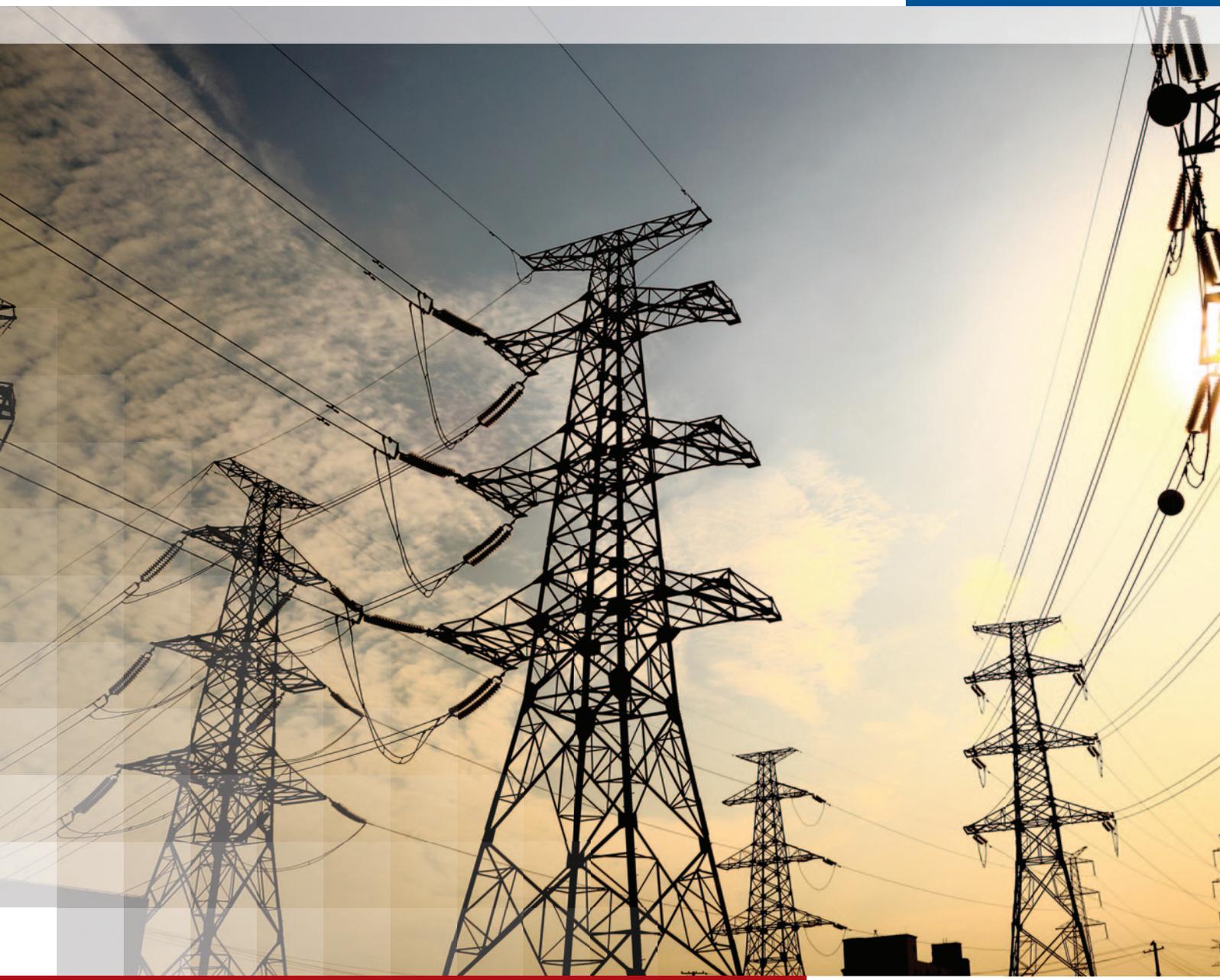
Berdasarkan komposisi per pecahan, temuan uang palsu didominasi oleh UK pecahan Rp100.000 (52,0%) dan Rp50.000 (40,7%). Sedangkan berdasarkan wilayah, temuan uang palsu terbesar berasal dari wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia dan wilayah KKBI Surabaya masing-masing mencapai 32,0% dan 29,6%.



Bab X

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KINERJA FISKAL





KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KINERJA FISKAL



Kebijakan fiskal tahun 2011 diarahkan untuk memberikan stimulus dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dengan arah tersebut, Pemerintah menerapkan berbagai upaya untuk turut mendukung tercapainya stabilitas makroekonomi dan sasaran pertumbuhan ekonomi. Di tengah beban subsidi yang meningkat, kebijakan fiskal yang berhati-hati diterapkan Pemerintah khususnya di sisi pembiayaan dan belanja negara. Belanja pemerintah terlihat membaik dengan penyerapan belanja negara dan pengeluaran belanja modal yang relatif meningkat. Secara antardaerah, alokasi belanja modal daerah khususnya provinsi DKI Jakarta dan provinsi di wilayah Jawa juga meningkat. Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja fiskal 2011 tercapai lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan defisit APBN yang mencapai 1,2% dari PDB. Kinerja tersebut tetap terjaga pada tingkat yang aman untuk mendukung sasaran pembangunan dengan rasio utang yang relatif terkendali.

Di samping itu, dalam upaya memperkuat daya dukung perekonomian nasional, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan sektoral. Kebijakan terutama ditekankan pada pembenahan struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. Kebijakan pemerintah juga difokuskan pada sektor lapangan usaha prioritas, seperti sektor industri dan sektor pertanian. Sejalan dengan hal itu, dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, Pemerintah tetap meneruskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat serta bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Sementara itu, koordinasi dan komunikasi Pemerintah dan Bank Indonesia telah berhasil mengatasi tekanan inflasi yang berasal dari keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi, khususnya bahan pangan dan energi.



mempertahankan penurunan rasio utang secara bertahap dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal.

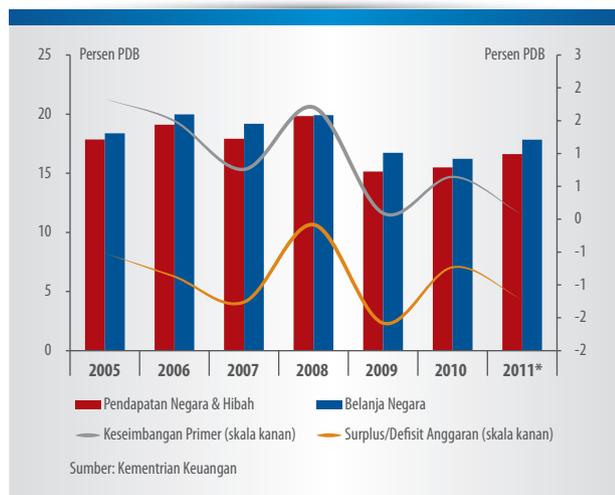
Pencapaian kinerja fiskal tahun 2011 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010 dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kinerja tersebut tercermin dari perbaikan kapasitas fiskal didorong oleh realisasi penerimaan yang sedikit melampaui target. Sementara itu, penyerapan belanja negara juga membaik, tercermin antara lain dari pengeluaran belanja modal yang meningkat ditengah beban subsidi yang tinggi. Kinerja yang tetap terjaga tersebut turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan defisit APBN yang mencapai 1,2% dari PDB (Grafik 10.1) dan rasio utang relatif terkendali pada level sekitar 24,3% dari PDB.

10.1 KEBIJAKAN DAN KINERJA FISKAL

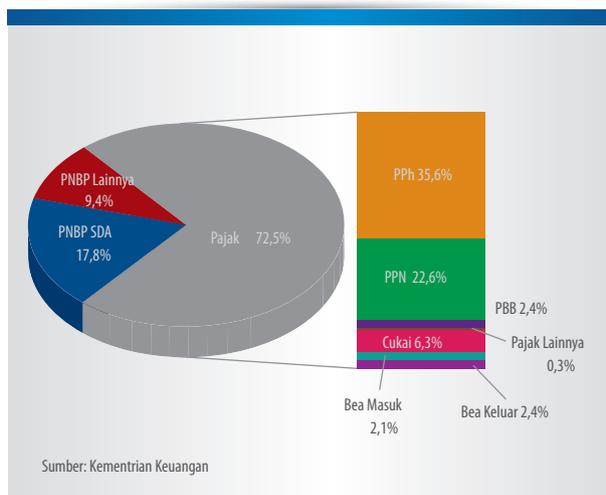
Arah kebijakan fiskal tahun 2011 tetap ditujukan untuk memberikan stimulus ekonomi dengan memelihara kesinambungan fiskal. Di sisi penerimaan, kebijakan ditempuh dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kesinambungan dunia usaha. Di sisi belanja, kebijakan diterapkan untuk meningkatkan penyerapan dan kualitas belanja agar dapat memberikan stimulus pada perekonomian. Sementara alokasi belanja subsidi ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat berupa ketahanan pangan dan energi serta stabilitas harga komoditas strategis. Di sisi pembiayaan, kebijakan dilakukan untuk

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Penerimaan pemerintah tahun 2011 lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan pada APBN-P 2011. Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2011 mencapai Rp1.201 triliun, atau meningkat 20,7% dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2010 (Tabel 10.1). Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan pangsa sekitar 73% (Grafik 10.2). Penerimaan perpajakan yang meningkat didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang masih kuat sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih tinggi, serta perbaikan kebijakan perpajakan. Penerimaan pemerintah yang meningkat juga disumbangkan oleh penerimaan bukan pajak, yaitu penerimaan sumber daya alam (SDA) sejalan dengan harga minyak dunia yang meningkat. Kinerja penerimaan pemerintah yang meningkat tersebut mendorong perbaikan kapasitas



Grafik 10.1 Operasi Keuangan Pemerintah



Grafik 10.2 Komposisi Pendapatan Negara tahun 2011

Tabel 10.1 Ringkasan Operasi Keuangan Pemerintah

Rincian	APBN-P 2010		Realisasi 2010			APBN-P 2011		Realisasi 2011*		
	Triliun Rp	%PDB	Triliun Rp	%PDB	%APBN-P	Triliun Rp	%PDB	Triliun Rp	%PDB	%APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	992	15,4	995	15,5	100,3	1.170	15,8	1.201	16,2	102,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	991	15,4	992	15,4	100,2	1.165	15,7	1.199	16,1	102,9
1. Penerimaan Perpajakan	743	11,5	723	11,2	97,3	879	11,8	874	11,8	99,4
a.l. - Pajak Dalam Negeri	721	11,2	694	10,8	96,3	832	11,2	820	11,0	98,5
- Pajak Perdagangan Internasional	23	0,4	29	0,4	128,2	47	0,6	54	0,7	115,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	247	3,8	269	4,2	108,8	287	3,9	325	4,4	113,4
a.l. - Penerimaan SDA	165	2,6	169	2,6	102,5	192	2,6	214	2,9	111,5
- Bagian Laba BUMN	30	0,5	30	0,5	102,0	29	0,4	28	0,4	97,7
- PNBP lainnya	43	0,7	59	0,9	136,7	50	0,7	69	0,9	136,3
- Pendapatan BLU	9	0,1	11	0,2	111,6	15	0,2	14	0,2	91,7
II. Hibah	2	0,0	3	0,0	159,4	5	0,1	3	0,0	55,4
B. Belanja Negara	1.126	17,5	1.042	16,2	92,5	1.321	17,8	1.290	17,4	97,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	782	12,1	697	10,8	89,2	908	12,2	878	11,8	96,7
a.l. 1. Belanja Pegawai	163	2,5	148	2,3	91,0	183	2,5	176	2,4	96,0
2. Belanja Barang	113	1,7	98	1,5	86,7	143	1,9	121	1,6	84,7
3. Belanja Modal	95	1,5	80	1,2	84,5	141	1,9	116	1,6	82,2
4. Pembayaran Bunga Utang	106	1,6	88	1,4	83,7	107	1,4	93	1,3	87,5
5. Subsidi	201	3,1	193	3,0	95,7	237	3,2	295	4,0	124,3
6. Belanja Hibah	0	0,0	0	0,0	28,8	0	0,0	0	0,0	74,1
7. Belanja Sosial	71	1,1	69	1,1	96,4	82	1,1	71	1,0	86,6
8. Belanja Lain-lain	33	0,5	22	0,3	65,8	16	0,2	7	0,1	41,8
II. Transfer Ke Daerah	345	5,4	345	5,4	100,0	413	5,6	411	5,5	99,7
1. Dana Perimbangan	314	4,9	317	4,9	100,7	348	4,7	347	4,7	99,9
- DBH	90	1,4	92	1,4	102,9	97	1,3	97	1,3	100,1
- DAU	204	3,2	204	3,2	100,0	226	3,0	226	3,0	100,0
- DAK	21	0,3	21	0,3	99,1	25	0,3	25	0,3	98,3
2. Dana Otsus & Penyesuaian	30	0,5	28	0,4	92,6	65	0,9	64	0,9	98,7
C. Keseimbangan Primer	-28	-0,4	41	0,6		-44	-0,6	5	0,1	
D. Surplus/Defisit Anggaran	-134	-2,1	-47	-0,7		-151	-2,0	-88	-1,2	
E. Pembiayaan	134	2,1	92	1,4		151	2,0	129	1,7	
I. Pembiayaan Dalam Negeri	134	2,1	96	1,5		153	2,1	149	2,0	
1. Perbankan Dalam Negeri	46	0,7	22	0,3		46	0,6	49	0,7	
2. Non Perbankan DN	88,4	1,4	74	1,1		107	1,4	100	1,3	
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	108	1,7	91	1,4		127	1,7	121	1,6	
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	0	0,0	-5	-0,1		-2	0,0	-19	-0,3	
a.l. 1. Penarikan Pinjaman LN	71	1,1	55	0,9		57	0,8	45	0,6	
2. Penerusan Pinjaman	-17	-0,3	-9	-0,1		-12	-0,2	-6	-0,1	
2. Pembayaran Cicilan Pokok	-54	-0,8	-51	-0,8		-47	-0,6	-58	-0,8	
Asumsi:										
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,8		6,1			6,5		6,5		
Inflasi y.o.y (%)	5,3		7,0			5,7		3,8		
Nilai tukar (Rp/USD)	9.200		9.087			8.700		8.776		
Suku bunga SBI 3 bln rata-rata (%)**	6,5		6,6			5,6		4,8		
Harga minyak internasional (USD/barel)	80,0		79,4			95,0		111,5		
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	965		954			945		898		

Sumber: Kementerian Keuangan

ket. * Angka sementara perkiraan Pemerintah

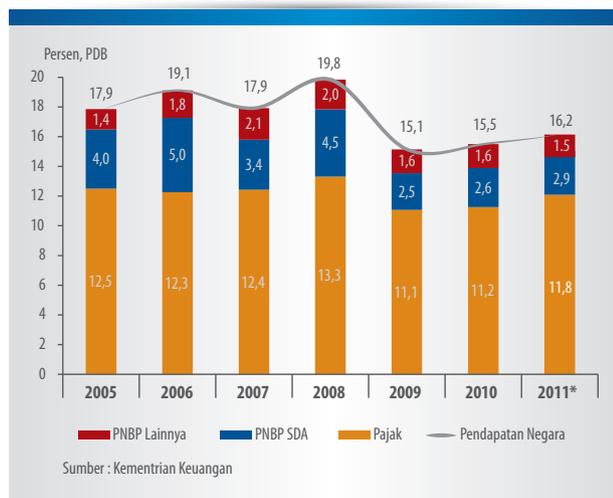
** Menggunakan SPN 3 bulan sejak Februari 2011

fiskal sehingga Pemerintah masih dimungkinkan untuk meningkatkan anggaran subsidi BBM dengan tetap menjaga rasio defisit fiskal yang rendah.

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp873,7 triliun atau meningkat 20,8% dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2010. Peningkatan tersebut berdampak pada rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang meningkat menjadi 12,3% dibandingkan dengan 11,3% pada tahun 2010 (Grafik 10.3). Selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang masih kuat dan perbaikan kebijakan perpajakan, kinerja penerimaan perpajakan yang lebih baik juga didorong oleh harga minyak yang meningkat. Kenaikan harga tersebut mampu mengkompensasi dampak dari penurunan produksi (*lifting*) minyak akibat penghentian produksi secara tidak terduga (*unplanned shutdown*) dan penurunan produktivitas sumur minyak secara alamiah.

Penerimaan pajak perdagangan internasional, baik bea masuk maupun bea keluar, meningkat seiring dengan kinerja impor yang masih tinggi dan kenaikan tarif bea keluar. Kenaikan impor didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang membaik dan pemberlakuan kerjasama di bidang perdagangan barang (*Free Trade Agreement*). Sementara peningkatan tarif bea keluar terkait dengan harga referensi *crude palm oil* (CPO) internasional yang lebih tinggi.

Peningkatan kinerja pajak juga ditunjang oleh konsistensi pelaksanaan berbagai langkah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan. Langkah kebijakan tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara.



Grafik 10.3 Perkembangan Pendapatan Negara

Beberapa upaya yang ditempuh antara lain melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan.¹ Upaya lainnya diarahkan pada peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding.

Perbaikan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai ditempuh melalui ekstensifikasi barang kena cukai dan penyesuaian tarif cukai. Sejalan dengan *road map* cukai hasil tembakau, tarif cukai tembakau dinaikkan rata-rata sebesar 5% sejak bulan Januari 2011. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menetapkan pemberian insentif fiskal berupa pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dan penghapusan biaya fiskal perjalanan keluar negeri bagi seluruh wajib pajak. Pemerintah juga tetap melanjutkan upaya perbaikan administrasi perpajakan, melanjutkan program reformasi perpajakan jilid II, dan melakukan berbagai upaya tambahan (*extra effort*) melalui pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dalam rangka perbaikan sistem administrasi perpajakan, Pemerintah telah melakukan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011. Di samping itu, PBB sektor perkotaan dan pedesaan juga direncanakan menjadi pajak daerah secara bertahap sampai dengan Desember 2013. Kebijakan ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan adanya kebijakan tersebut, porsi alokasi pajak terhadap penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan cukup tinggi, terutama di kawasan Sumatera, kawasan Jakarta, dan kawasan Timur Indonesia.

Pemerintah juga terus melanjutkan pemberian fasilitas-fasilitas perpajakan sesuai amanat Undang-Undang Perpajakan yang diharapkan mampu mendukung dunia usaha, antara lain melalui pembebasan, pengurangan dan/atau penundaan beban perpajakan. Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meneruskan pemberian stimulus fiskal di bidang perpajakan, dengan tujuan, antara lain, untuk menjaga daya beli konsumen (minyak

1 Program intensifikasi berupa pemantapan dan penambahan profil wajib pajak (WP), sedangkan program ekstensifikasi diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah WP orang pribadi khususnya berbasis profesi, pemberi kerja, *feeding* dari 1000 WP besar dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT).

goreng dan BBM bersubsidi), meningkatkan investasi (Surat Berharga Negara/SBN dan eksplorasi migas), dan meningkatkan daya saing industri tertentu (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah/BMDP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan peningkatan. Realisasi PNBP tahun 2011 mencapai Rp325,0 triliun atau meningkat 20,8% dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2010. PNBP terutama disumbang oleh penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang meningkat cukup tajam terkait dengan harga minyak yang lebih tinggi dan perluasan area tambang di sektor pertambangan umum.

Peningkatan PNBP juga dipengaruhi oleh kebijakan optimalisasi penerimaan SDA di sektor pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan panas bumi serta kebijakan efisiensi *cost recovery* (biaya pengganti kegiatan eksplorasi dan produksi) dan perbaikan infrastruktur migas. Sementara itu, meski belum mencapai target, Pemerintah mengupayakan peningkatan produksi minyak, antara lain dengan memberikan keringanan pajak untuk impor peralatan migas dan mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur minyak yang ditelantarkan. Pemerintah juga melakukan komunikasi intensif dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rangka perbaikan kinerja dalam pencapaian target produksi. Selain migas, diupayakan pula peningkatan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan di sektor pertambangan.

Kontribusi PNBP juga bersumber dari pendapatan jasa layanan Kementerian/ Lembaga Negara (K/L) yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah

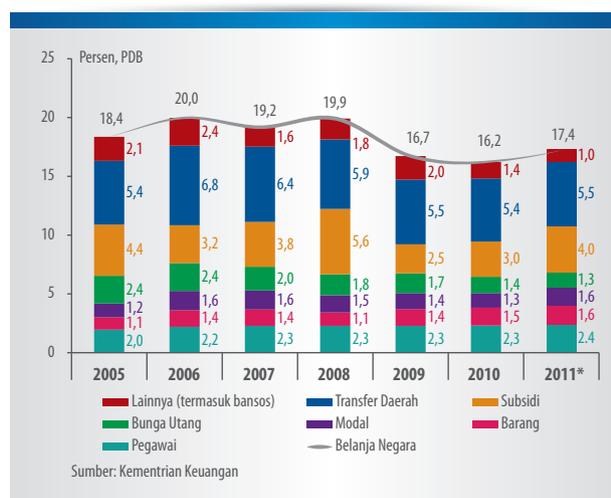
untuk mendorong peningkatan PNBP Lainnya melalui *review* jenis dan tarif dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP K/L, serta peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi. Selain itu, kenaikan penerimaan PNBP lainnya juga bersumber dari pendapatan minyak mentah *Domestic Market Obligation* (DMO) dan peningkatan penjualan hasil tambang.

BELANJA NEGARA

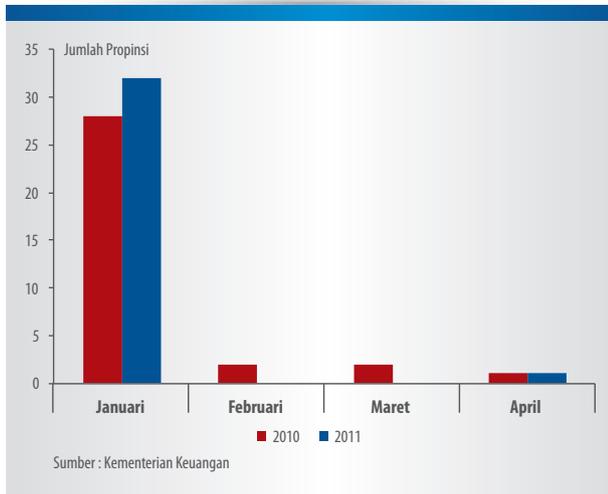
Realisasi belanja negara tahun 2011 menjadi Rp1.289,6 triliun, atau meningkat 23,8% dibandingkan dengan tahun 2010 (tabel 10.1 dan Grafik 10.4). Kondisi tersebut didukung oleh belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang tumbuh masing-masing sebesar 25,9% dan 19,3%.

Kenaikan belanja pemerintah pusat terutama bersumber dari pembayaran subsidi yang meningkat signifikan. Realisasi belanja barang dan modal juga mencatat kenaikan, namun persentase penyerapan belanja tersebut masih di bawah target APBN-P 2011. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kebijakan optimalisasi dan efisiensi terkait pembangunan gedung kantor, realisasi penyerapan pinjaman dan hibah luar negeri yang lebih rendah, serta berbagai kendala teknis di lapangan seperti masalah pengadaan/ pembebasan lahan, bencana alam dan masalah sosial. Kendala penyerapan anggaran juga disebabkan oleh pola belanja Kementerian dan Lembaga Negara (K/L), terutama belanja barang dan belanja modal yang cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Hambatan penyerapan anggaran juga terjadi di daerah, meskipun pengesahan Peraturan Daerah APBD di hampir seluruh daerah telah dilakukan lebih awal. Pada awal tahun 2011 sebanyak 32 provinsi telah mengesahkan Perda APBD, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 10.5). Namun demikian, percepatan persetujuan APBD tidak disertai dengan penyerapan anggaran yang lebih cepat, terutama di Jakarta dan Jawa. Sementara di Sumatera, penyerapan anggaran yang meningkat lebih disebabkan oleh adanya pelaksanaan proyek untuk mempersiapkan acara besar seperti SEA Games (Sumatera Selatan) dan PON (Riau). Penyerapan belanja daerah yang belum optimal terindikasi dari posisi rekening Pemda di bank umum yang masih tinggi dan rasio belanja daerah terhadap dana perimbangan yang lebih rendah. Rasio antara akumulasi belanja Pemda terhadap akumulasi dana perimbangan yang disalurkan Pemerintah Pusat relatif



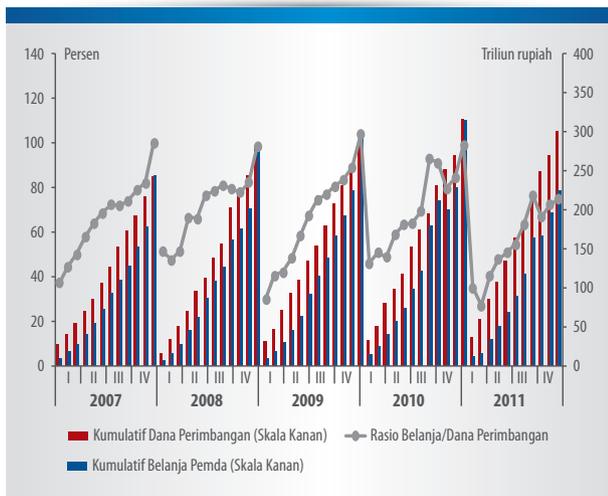
Grafik 10.4 Perkembangan Belanja Negara



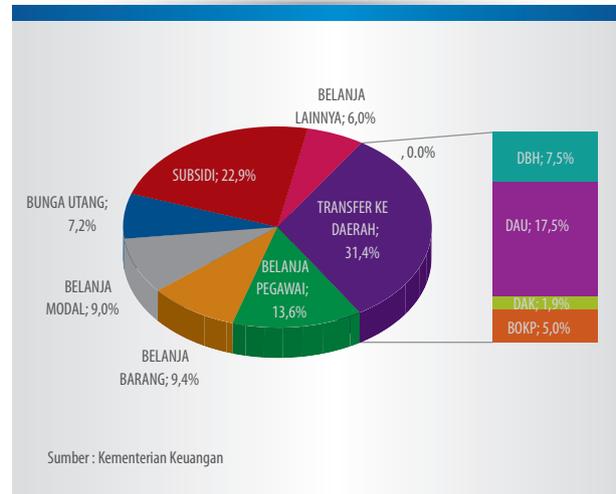
Grafik 10.5 Pengesahan APBD Provinsi

lebih rendah dibandingkan dengan rasio selama dua tahun terakhir (Grafik 10.6).

Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran. Beberapa langkah yang ditempuh Pemerintah antara lain melalui revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (seperti percepatan dan perbaikan tender, termasuk syarat untuk penetapan pemenang lelang) menjadi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Revisi tersebut dilakukan untuk memperbaiki proses pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui kompetisi dan persaingan sehat. Selain itu, untuk memecahkan masalah pembebasan lahan proyek, Pemerintah dan DPR telah menetapkan Undang-undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di akhir tahun 2011.



Grafik 10.6 Rasio Belanja Pemda terhadap Dana Perimbangan



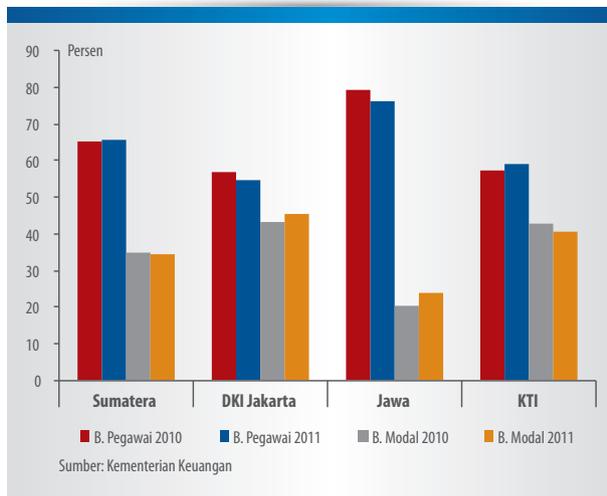
Grafik 10.7 Komposisi Belanja Negara tahun 2011

Pemerintah juga menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur (konektivitas nasional). Sampai akhir tahun 2011, implementasi proyek infrastruktur dalam program MP3EI yang ditetapkan sejak bulan Mei 2011 masih belum sesuai harapan. Beberapa proyek masih pada tahap peletakan batu pertama (*ground breaking*) dengan periode pembangunan tahunan (*multiyears project*). Pendanaan proyek umumnya berasal dari Pemerintah, BUMN dan swasta melalui pola kerjasama Pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*). Proyek MP3EI yang digarap meliputi pembangunan PLTU, pengembangan bandara, penambahan armada feri, pengembangan pelabuhan, pembangunan rel KA, serta proyek jalan tol.

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp878,3 triliun atau meningkat 25,9% dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari pembayaran subsidi yang meningkat signifikan dan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai terkait dengan kenaikan gaji pokok dan pensiun (rata-rata 10%), pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, kenaikan uang makan PNS, serta uang lauk pauk TNI/Polri (Grafik 10.7). Selain itu, kenaikan belanja pegawai juga digunakan sebagai tunjangan kinerja (remunerasi) untuk mendukung reformasi birokrasi.

Anggaran gaji pegawai daerah masih mendominasi belanja APBD (lebih dari 50%) semua kawasan, terutama di Jawa.² Namun demikian, untuk 2011,

² Dibandingkan kawasan lain, Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki 249 kabupaten/kota dari 477 kabupaten/kota, dan 17 provinsi dari 33 provinsi.



Grafik 10.8 Porsi Belanja Pegawai dan Modal

APBD di kawasan Jawa dan DKI Jakarta berupaya untuk mengalihkan anggaran belanja kepada kegiatan yang lebih produktif. Hal ini tercermin dari alokasi belanja pegawai yang menurun dan terindikasi dialihkan ke belanja modal (Grafik 10.8).

Kebijakan untuk mengalokasikan belanja subsidi dan belanja pegawai dalam jumlah yang cukup besar merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Kebijakan ini juga dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier*) bagi upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas harga.

Belanja subsidi selama tahun 2011 meningkat signifikan mencapai Rp294,9 triliun, atau meningkat 53,0% dibandingkan dengan tahun 2010 (Grafik 10.9). Kenaikan belanja subsidi tersebut terutama disebabkan oleh realisasi harga minyak (ICP) sebesar 111,6 dolar AS per barel yang lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi di APBN-P 2011 sebesar 95,0 dolar AS per barel.³ Selain itu, rencana penggunaan energi input subsidi listrik yang tidak terpenuhi dan adanya program raskin ke-13 juga turut menaikkan anggaran subsidi.

Belanja subsidi didominasi oleh anggaran subsidi energi. Subsidi energi digunakan untuk keperluan subsidi BBM tertentu, LPG tabung 3 kg (Pertamina) serta subsidi listrik (PLN). Peningkatan subsidi energi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak

³ Asumsi harga minyak dalam APBN adalah harga *Indonesian Crude Price* (ICP) yang merupakan keranjang dari lima jenis minyak mentah yang diperdagangkan secara internasional.

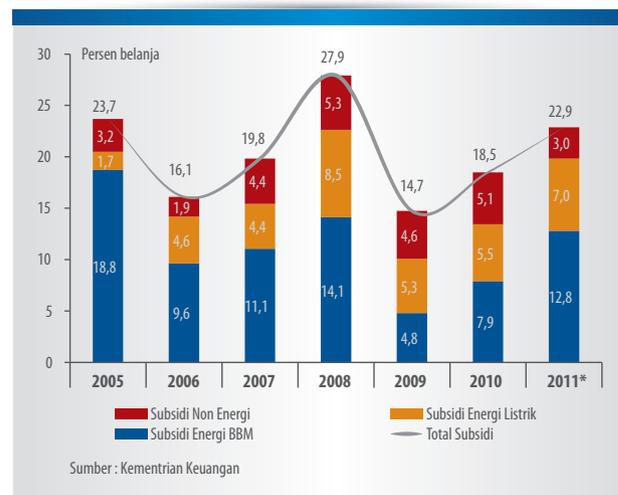
(ICP) di tengah volume konsumsi BBM bersubsidi yang melampaui pagu sebagai dampak penundaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi.⁴

Pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan penghematan subsidi BBM untuk menekan belanja subsidi energi sekaligus mendorong diversifikasi energi alternatif. Kebijakan tersebut berupa optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) yang dicampur dengan BBM bersubsidi dan bahan bakar gas (BBG); pengkajian atas pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi dan pembatasan volume; serta pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi.

Penghematan anggaran belanja subsidi BBM dan subsidi listrik juga dilakukan melalui perbaikan parameter produksi dan berbagai parameter lainnya pada perhitungan subsidi BBM dan subsidi listrik, serta peningkatan efisiensi PT. Pertamina dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Alokasi belanja subsidi nonenergi ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, serta memberikan perlindungan kesejahteraan kepada masyarakat. Belanja subsidi non-energi digunakan untuk penyediaan raskin (Bulog), subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit program. Kenaikan subsidi beras

⁴ Pada APBN-P 2011, volume konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40,5 juta kilo liter, lebih tinggi dibandingkan dengan APBN 2011 sebesar 38,6 juta kilo liter. Tambahan tersebut menggunakan asumsi bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi akan dilaksanakan.



Grafik 10.9 Perkembangan Subsidi

dipengaruhi oleh harga pokok beras dan kuantum raskin per rumah tangga sederhana yang lebih tinggi. Sementara itu, subsidi pupuk yang meningkat disebabkan oleh bertambahnya volume pupuk yang disubsidi.

Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan sarana investasi tercermin dari rasio anggaran belanja modal terhadap total belanja negara pada APBN-P 2011 yang meningkat menjadi 10,7% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 8,4%. Alokasi pembiayaan infrastruktur juga terindikasi meningkat dari realisasi Rp99,4 triliun pada tahun 2010 menjadi rencana alokasi Rp153,0 triliun pada tahun 2011.

Realisasi pembayaran bunga utang meningkat dibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan pembayaran terkait dengan penerbitan SUN dan SBN Valas di semester I 2011 dan penerbitan ORI yang dilakukan di semester II 2011. Namun, realisasi pembayaran bunga utang tahun 2011 masih di bawah pagu anggaran. Hal itu terkait dengan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan yang lebih rendah, penghematan beban bunga akibat pengurangan target penerbitan SBN, dan penarikan pinjaman luar negeri yang lebih kecil.

Penyaluran transfer ke daerah meningkat. Realisasi transfer ke daerah mencapai Rp411 triliun atau meningkat 19,3% dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari peningkatan dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Realisasi transfer ke daerah yang sesuai dengan rencana anggaran menandakan bahwa seluruh pengeluaran pemerintah pusat dan pemanfaatannya ke daerah telah sesuai dengan sasaran.

Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi, meski semakin menurun. Perkembangan ini terutama terjadi di Wilayah Jakarta, Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara sejalan dengan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat.

PEMBIAYAAN DEFISIT

Operasi keuangan pemerintah sepanjang tahun 2011 mencatat defisit Rp88 triliun atau 1,2% terhadap PDB (Tabel 10.1). Pelaksanaan kebijakan fiskal yang berhati-hati turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dengan defisit APBN yang relatif terkendali.

Untuk membiayai defisit tersebut, Pemerintah menggunakan dua sumber pembiayaan, yaitu pembiayaan non-utang dan utang, baik dari dalam maupun luar negeri. Total pembiayaan yang diperoleh Pemerintah pada tahun 2011 mencapai Rp129,3 triliun terutama bersumber dari pembiayaan utang dalam negeri. Secara neto, selama periode 2005-2011, rata-rata kontribusi pembiayaan utang adalah 78,3% dari total pembiayaan yang diperlukan.

Pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dari dalam negeri dan mengurangi sumber pembiayaan luar negeri. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara bertahap untuk menjaga kesinambungan fiskal (Grafik 10.10). Upaya lain untuk menjaga kesinambungan fiskal antara lain melalui strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada awal tahun (*front loading*), dan melalui strategi *buyback* dan *debt switching* pada pengelolaan portofolio.

Realisasi pembiayaan dalam negeri pada tahun 2011 mencapai Rp148,5 triliun, lebih rendah dari target APBN-P. Hal ini terutama disebabkan oleh pengurangan target penerbitan SBN neto sebesar Rp6,6 triliun, penarikan pinjaman dalam negeri yang lebih rendah, dan tidak adanya realisasi kewajiban pinjaman.

Penerbitan SBN masih mendominasi struktur pembiayaan dalam negeri. Penerbitan SBN tahun 2011 masih menerapkan strategi penerbitan di awal tahun, diversifikasi instrumen, dan mengutamakan penerbitan SBN domestik. Strategi *frontloading* tercermin dari penerbitan SBN yang sebagian besar (54,5%) dilakukan pada semester I 2011. Adapun diversifikasi instrumen



Grafik 10.10 Perkembangan Pembiayaan Anggaran

dilakukan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) global, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) global, SBSN ritel dan Obligasi Negara Ritel (ORI) dengan penerbitan SBN berdenominasi rupiah mencapai 85,1% dari total penerbitan SBN. Selama tahun 2011, target penerbitan SBN dapat terpenuhi didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang kondusif dengan imbal hasil yang terus menurun sejalan dengan minat investor terhadap SBN yang masih tinggi (Grafik 10.11).

Kebijakan fiskal di sisi pembiayaan menekankan pada prinsip pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang layak dan berisiko rendah, penggalan sumber pembiayaan dari dalam negeri dan pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap serta pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif. Sejalan dengan itu, pembiayaan melalui utang dilakukan dengan mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan SBN Syariah) rupiah di pasar domestik. Sementara itu, Pinjaman Luar Negeri (PLN) diprioritaskan dari sumber yang efisien, berisiko rendah dan tanpa agenda politik.

Dalam rangka mengurangi pembiayaan luar negeri yang berasal dari utang, penarikan pinjaman luar negeri selama tahun 2011 relatif rendah. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp19,2 triliun, lebih rendah dari target APBN-P sejalan dengan pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan pencairan pembiayaan. Hal ini terutama terkait dengan pembatalan penarikan pinjaman program *Low Carbon and Resilient Development Program*, serta penarikan pinjaman proyek dan penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) yang lebih rendah. Searah dengan strategi tersebut itu, rasio pinjaman

pemerintah terhadap PDB menurun hingga mencapai 24,3%, walaupun secara nominal jumlah utang masih meningkat (Grafik 10.12).

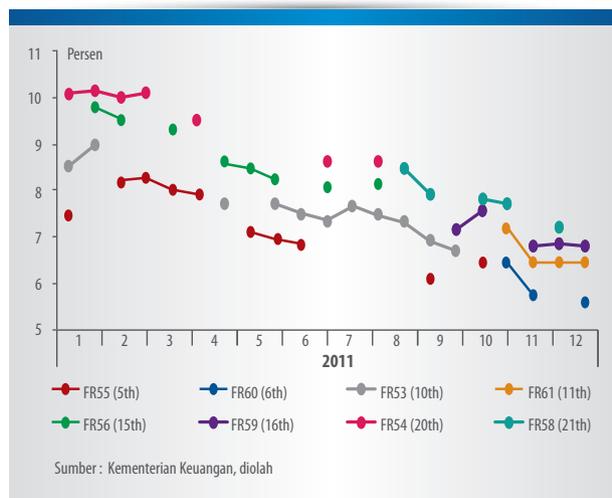
Dari sisi penjualan aset, realisasi penerimaan privatisasi sampai akhir tahun 2011 telah mencapai target. Penerimaan privatisasi tersebut bersumber dari target tahun 2010 yang berasal dari *right-issue* dan divestasi beberapa BUMN. Sementara penerimaan dari hasil pengelolaan aset oleh PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PT. PPA) masih relatif lebih rendah dari sasaran.

Dengan realisasi defisit anggaran sebesar Rp88,4 triliun, sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp129,3 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp40,9 triliun. SILPA tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran (ekstra stimulus fiskal), termasuk pembiayaan infrastruktur di tahun berikutnya.

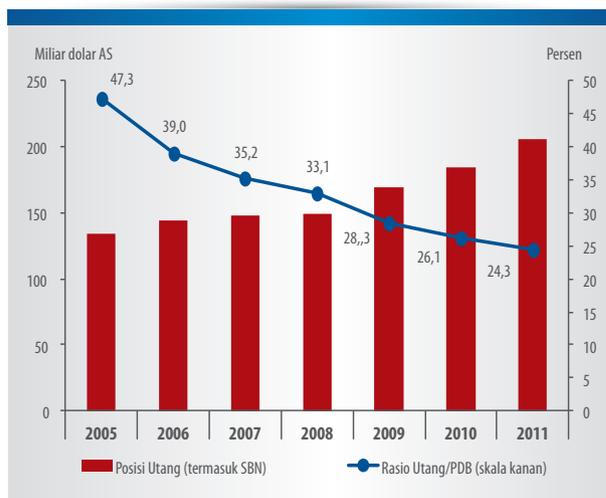
DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL DAN SEKTOR MONETER

Kebijakan fiskal ditujukan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Secara umum, operasi keuangan pemerintah tahun 2011 lebih berdampak pada konsumsi relatif dibandingkan dengan investasi pemerintah.

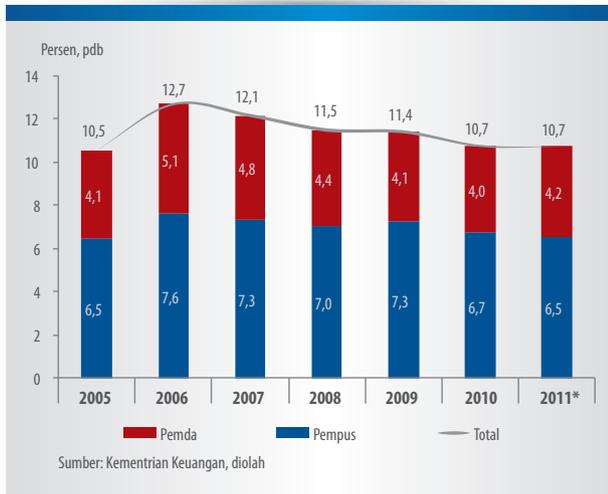
Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengalami percepatan. Hal itu tercermin dari angka rasio konsumsi dan investasi pemerintah



Grafik 10.11 Perkembangan Imbal Hasil SUN



Grafik 10.12 Perkembangan Utang Pemerintah

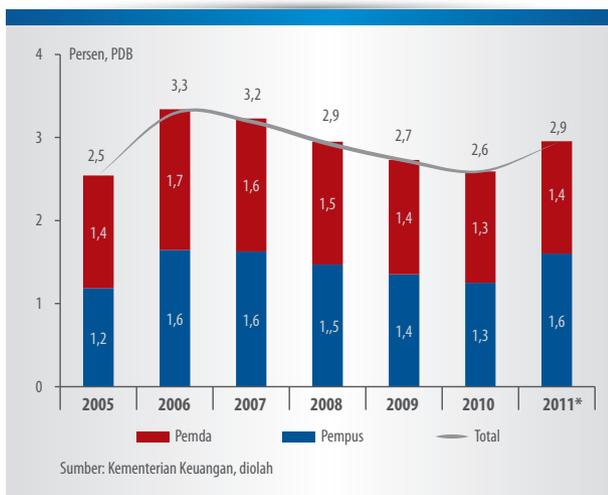


Grafik 10.13 Perkembangan Konsumsi Pemerintah

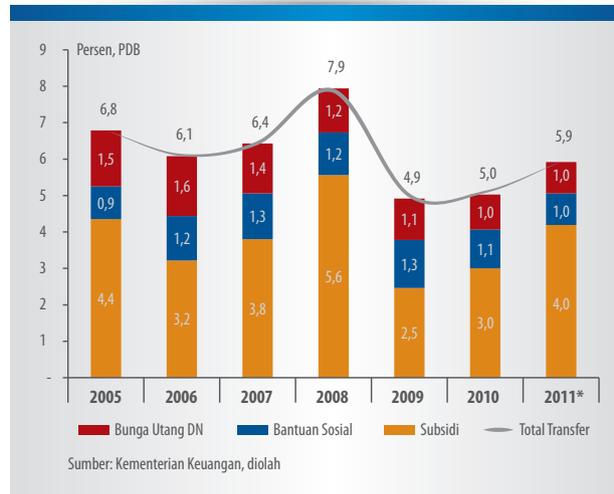
terhadap PDB yang meningkat dibandingkan tahun 2010 (Grafik 10.13 dan 10.14).

Transfer ke sektor riil yang terdiri dari subsidi, bantuan sosial dan bunga utang dalam negeri mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan penyaluran subsidi (Grafik 10.15). Realisasi subsidi juga menyebabkan pengeluaran transfer melewati target anggaran tahun berjalan.

Di sektor moneter, operasi keuangan pemerintah sepanjang tahun 2011 berdampak pada ekspansi rupiah terutama pada triwulan IV 2011. Perkembangan ini tercermin dari simpanan Pemerintah Pusat di Bank Indonesia (*Net Claim on Government*) yang mencatat akumulasi ekspansi sejak bulan September. Selama triwulan IV akumulasi ekspansi tercatat sebesar Rp128,2 triliun.



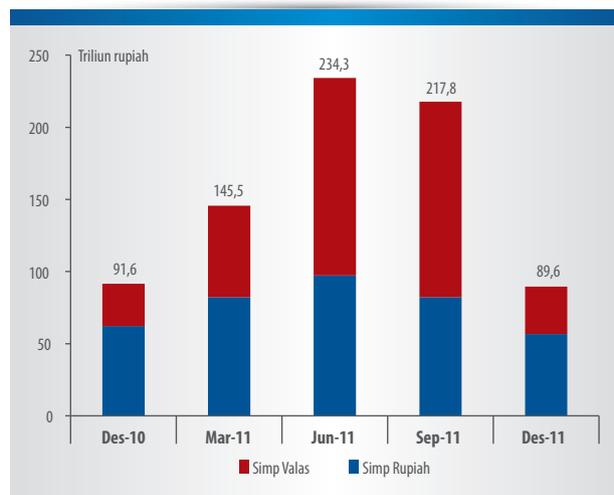
Grafik 10.14 Perkembangan Investasi Pemerintah



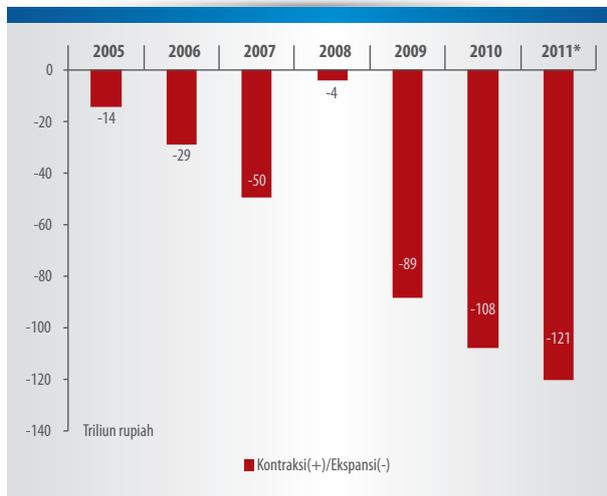
Grafik 10.15 Perkembangan Transfer ke Sektor Riil

Secara tahunan, akumulasi ekspansi neto tercatat sebesar Rp2,0 triliun. Sesuai dengan polanya, pada semester I operasi keuangan pemerintah mengalami kontraksi, perkembangan ini berdampak pada semester II mulai mencatat ekspansi. Perkembangan ini berdampak pada posisi simpanan pemerintah pusat di BI yang tercatat sebesar Rp89,6 triliun di akhir bulan Desember 2011, lebih rendah atau mengalami ekspansi dari posisi pada akhir tahun 2010 sebesar Rp91,6 triliun (Grafik 10.16).

Sumber utama ekspansi rupiah berasal dari pembayaran subsidi yang meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak ICP. Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), pembayaran gaji, dan pembayaran termin proyek serta pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) turut mendorong ekspansi operasi keuangan pemerintah pusat selama tahun 2011.



Grafik 10.16 Perkembangan Simpanan Pemerintah Pusat di BI



Grafik 10.17 Dampak Rupiah Operasi Keuangan Pemerintah

Sejalan dengan perkembangan tersebut, realisasi anggaran operasi keuangan pemerintah tahun 2011 masih berdampak ekspansif sekitar Rp120,8 triliun, lebih tinggi dari dampak ekspansi pada tahun 2010 sebesar Rp107,8 triliun (Grafik 10.17).

10.2 KEBIJAKAN SEKTORAL

Dalam upaya memperkuat daya dukung perekonomian nasional, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan sektoral. Kebijakan terutama ditekankan pada pembenahan struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian khususnya di bidang konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri. Selain itu, kebijakan difokuskan juga pada sektor lapangan usaha prioritas seperti sektor industri, pertanian serta sektor strategis lainnya. Sementara itu, koordinasi dan komunikasi Pemerintah dan Bank Indonesia telah berhasil mengatasi tekanan inflasi yang berasal dari keterbatasan pasokan dan hambatan distribusi, khususnya bahan pangan dan energi.

Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi Pemerintah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan itu, Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut antara lain berupa subsidi pangan dalam bentuk Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta

berbagai subsidi lainnya. Kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat serta bantuan sosial bagi masyarakat miskin tersebut dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

Di sisi investasi, kebijakan pemerintah diarahkan pada penyiapan infrastruktur, suprastruktur dan peningkatan iklim investasi. Kebijakan yang dilakukan antara lain perbaikan kepastian hukum berupa reformasi regulasi di tingkat nasional dan daerah; penyederhanaan prosedur berupa penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota; perbaikan logistik nasional berupa pengembangan Sistem Logistik Nasional untuk menjamin distribusi barang dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Di sisi perdagangan luar negeri, upaya peningkatan ekspor diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas dan diversifikasi pasar. Strategi yang dilakukan antara lain meningkatkan ekspor nonmigas untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya yang besar; mendorong ekspor produk kreatif dan jasa terutama yang dihasilkan oleh UKM; mendorong upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor; menitikberatkan upaya perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor nonmigas di kawasan Afrika dan Asia; dan mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.

Di sektor industri, Pemerintah telah menetapkan kebijakan industri nasional dengan pengelompokan (klaster) industri prioritas, yang meliputi: Industri Agro, Industri Alat Angkut, Industri Elektronika dan Telematika, Industri Berbasis Manufaktur, Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu, dan Industri Kecil dan Menengah Tertentu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi pembangunan sektor industri manufaktur diupayakan melalui langkah-langkah peningkatan daya saing dan kebijakan peningkatan iklim usaha, restrukturisasi permesinan, pengembangan kawasan industri khusus, penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri bahan bakar nabati, dan pengembangan standardisasi industri.

Dalam rangka mendorong peningkatan daya saing industri nasional, Pemerintah melakukan kebijakan melalui pembangunan infrastruktur penunjang

industri (energi dan pangan); pembangunan industri manufaktur berbasis UKM; peningkatan akses pembiayaan untuk industri manufaktur; pemberian insentif fiskal dan nonfiskal pada industri pionir dan lokasi tertentu; pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM serta teknologi untuk menunjang industri agar mampu berkembang dengan optimal.

Sejalan dengan itu, Pemerintah melalui PP No. 62 yang berlaku sejak tahun 2008 telah memberikan program insentif pajak berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDP) untuk sektor industri tertentu. Selain itu, dalam rangka mendorong pengembangan industri dalam negeri, Pemerintah memberikan fasilitas penangguhan dan pengurangan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (*tax holiday*) pada sektor industri pionir.⁵ Industri tersebut antara lain industri logam dasar, industri pengolahan minyak bumi/kimia dasar, permesinan, dan industri energi sumber daya terbarukan.

5 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan PPh Badan yang berlaku sejak 15 Agustus 2011.

Di sektor pertanian, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kebijakan dilakukan melalui strategi peningkatan produktivitas dan kualitas lahan pertanian, bantuan bibit dan pupuk, penanganan pascapanen, pendanaan bagi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan dan penanganan rawan pangan, serta pembangunan irigasi. Strategi peningkatan produksi pangan tersebut didukung dengan penyempurnaan langkah-langkah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan dan penanganan pangan strategis.

Di sisi pengendalian harga, Pemerintah melakukan upaya pengendalian harga pasokan komoditas utama baik di tingkat nasional dan daerah. Hasilnya, inflasi dapat terjaga dengan baik berkat koordinasi dan kerja sama Pemerintah dan Bank Indonesia di tingkat pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI), maupun antar Pemerintah Daerah dan Kantor Bank Indonesia di tingkat wilayah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

